

**KEBIJAKAN PRESIDEN UZBEKISTAN ISLAM KARIMOV  
DALAM MEMERANGI TERORISME INTERNASIONAL  
PASCA SERANGAN 11 SEPTEMBER 2001**

**SKRIPSI**



Diajukan guna memenuhi salah satu syarat ujian untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1)  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Evin Asmira**  
**NIM. 98-1010**

Aspirasi Hadiah  
Pembelian  
Terima : Tgl. 09 SEP 2003  
Dit. Untuk

5  
Klass  
303.62  
ASMA  
K

Dosen Pembimbing

**Drs. ACHMAD HABIBULLAH, M.Si.**

NIP : 131 953 242

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2003**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

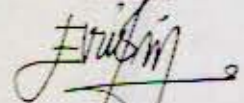
Nama : Evin Asmira  
NIM : 980910101010  
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Institusi : Universitas Jember

Sebagai penulis menyatakan bahwa : "skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui".

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 29 Juni 2003

Penulis,



EVIN ASMIRA  
NIM. 98-1010



## LEMBAR PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan didepan Panitia Penguji Skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 7 Juli 2003  
Waktu : 09.30-11.00 WIB


### Panitia Penguji

Ketua,



Prof. DR. A. Khusyairi, MA  
NIP. 130 261 689

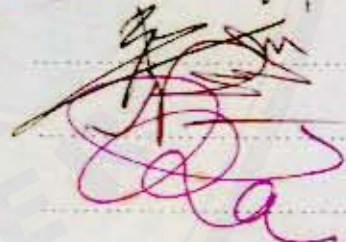
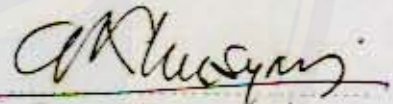
Sekretaris,



Drs. Achmad Habibullah, M.Si  
NIP. 131 935 242

### Susunan Penguji :

1. Prof. DR. A. Khusyairi, MA (Ketua)  
NIP. 130 261 689
2. Drs. Achmad Habibullah, M.Si (Sekretaris)  
NIP. 131 935 242
3. Drs. H. Nurudin M. Yasin (Anggota)  
NIP. 130 518 486
4. Drs. Pra Adi Sulistiyono (Anggota)  
NIP. 131 759 934



Mengotahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember



Drs. H. Moch. Turki  
NIP. 131 524 832

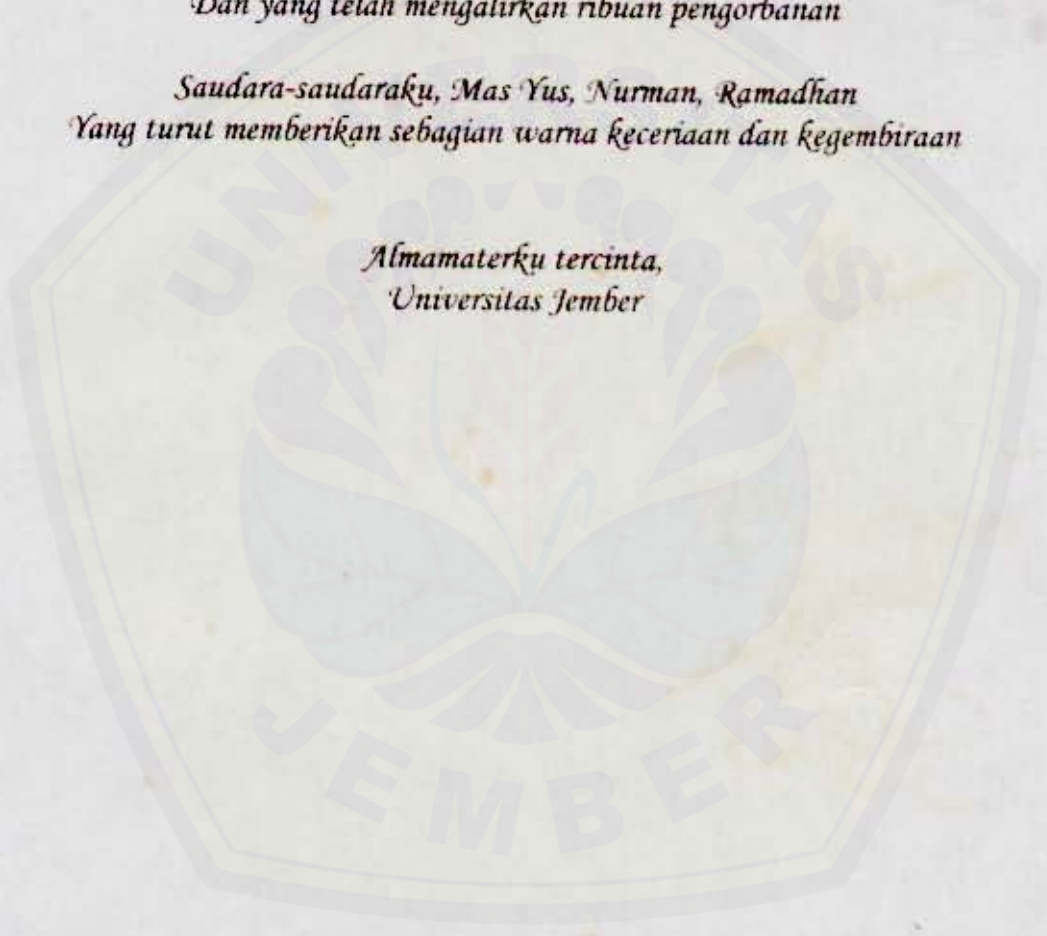
## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

*Ayahanda Abu Mansur Muhammad dan Ibunda Sri Hari Astuti  
Yang tak pernah berhenti mencurahkan kasih dan sayang,  
Yang senantiasa mengiringi langkahku dengan doa dan restu,  
Dan yang telah mengalirkan ribuan pengorbanan*

*Saudara-saudaraku, Mas Yus, Nurman, Ramadhan  
Yang turut memberikan sebagian warna keceriaan dan kegembiraan*

*Almamaterku tercinta,  
Universitas Jember*





## MOTTO

*"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: 'Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat'".*  
(Al-Baqarah :214)\*

---

\* Al-Qur'an dan terjemahnya, CV Asy-Syifa, Semarang, 1992, hal 589

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sembah sujud serta puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ KEBIJAKAN PRESIDEN UZBEKISTAN ISLAM KARIMOV DALAM MEMERANGI TERORISME INTERNASIONAL PASCA SERANGAN 11 SEPTEMBER 2001 “ ini dengan baik.

Ide penulisan skripsi ini sebenarnya berawal dari ketertarikan penulis terhadap Uzbekistan, yaitu sebuah negara berperadaban tinggi yang pernah menjadi pusat kerajaan Timurleng, pusat kekaisaran Yunani-Bachtria, serta pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam dunia, namun kini kehilangan identitas nasionalnya akibat pendudukan Uni Soviet selama lebih dari 70 tahun.

Menyusul serangan 11 September 2001 lalu yang sempat menghancurkan menara kembar *World Trade Center (WTC)* dan meluluhlantakkan sebagian Pentagon di Amerika, Uzbekistan sekarang telah menjadi partner Amerika yang baru dalam menghadapi terorisme internasional, khususnya setelah peristiwa penyerangan AS terhadap Afghanistan yang dituduh melindungi tersangka utama aksi pengeboman kedua gedung tersebut, Osama Bin Laden. Kesediaan Uzbekistan dalam menjalin kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan lapangan terbang serta instalasi militer untuk digunakan para prajurit Amerika sebagai pos penyerbuan ke Afghanistan. Dan sebagai imbalannya, Uzbekistan mendapat kucuran dana investasi senilai milyaran dolar serta bantuan keamanan dalam menghadapi serangan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok Islam radikal didalam negeri.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun secara akademis, akan memberikan dampak positif bagi penulis dan para pembaca skripsi ini nantinya.



Banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian karya ini, baik itu dalam bentuk dorongan semangat, motivasi, materi, maupun kritik. Semua itu merupakan bantuan yang tidak terkirakan pentingnya bagi penulis. Tiada kata yang dapat mewakili selain ucapan terima kasih yang tulus serta penuh hormat yang penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Achmad Habibullah, M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan kritik, saran, dan nasehat-nasehat selama menjalani proses bimbingan dari awal hingga akhir.
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko selaku dosen wali penulis.
3. Bapak Drs. Nurudin M. Yasin selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Moch. Turki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Kawan-kawan seperjuangan di HMI Cabang Jember Komisariat Fisipol : Luluk Maknunah, Ratna Diah, Surahmad, Taufiqurrahman, Arif Rahman, Deny, Asmuni, Exiadri, Maisaroh, Dwi, Maun, Dewi, Risqi, Ismanto, dan Ririd Armando. *Thanks for the generous support during our togetherness !*
6. Teman-teman kecilku : Joyo Tri Wahono, Dwi Priyo Shincan, Priyo U'ut, Jakphoo, Rio Mami Poko, Syair, Zaki, Astini Astronot, Vita, Putri, Anita, Deny, Reancy, Anggi, Yella, Edi, Deden, Mahe, Yusak, Agus Putra, Anang, Dhimas, Hari, dan Badrut Tamam. *Every moment with you guys, will be the most beautiful memories I had ever felt... Keep on Fighting !*
7. Kakak-kakakku : Mas Yanto, Mas Rony, Mas Barid, Mas Boli, Mas Yasin, Mas Deniar, Mas Samsul, Mbak Atik, Mbak Aini, Mbak Vivi, etc. *Thanks a lot!*
8. Teman-teman KKN kelompok 62 Desa Panduman Kecamatan Jelbuk : Pak Kebo, Malik, Tiyok, Yeni, Reni, I'in, Endang, Dewi, Ruwi, Desi, dan Arin. *Always keep in touch, guys !*

9. Keluarga besar LPBA OXFORD : Pak Yanto, Bu Yetty, Mbak Anis, Mbak Wiendha, Mbak Ririn, Pak Gun, Pak Kukun, etc. yang telah banyak memberi, mendengar, dan membagi rasa ....
10. Teman-temanku di Nihon-go no kurasu : Joko-san, Rosa-san, Didi-san, Agung-san, Maria-san, Masruroh-san, to Eddi-sensee. *Doomo arigato gozaimasu. Sayonara. Oai dekite ureshikatta desu. Itsuka mata oaishitai desu ne...*
11. Korps HI '98 : Mamad, Arif, Luluk, Ratna, Sigin, Unin, Ana, Hari, Hardian, Ishom, Nita, Wisnu, Elli, Mahendra, Deni, Nurbi, Yonny, Iqul, Multazam, Yudi, Verry, etc. Rasanya kita masih seperti "*yesterday afternoon kids*"...
12. Teman-teman kos dari Jawa hingga Belitung : Yuni, Eni, Sita, I'tit, Dian, Risa, Ratna, Luluk, Lina, etc. *Thanks*.
13. Teman-teman di IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Mojokerto) : Dudung Arif Rahmanto, Sinyo, Puguh, Aida, mas Yudhi, mas Al, Yoga, Adis, Anas, Endah, mas Heru, dll.
14. Semua orang yang pernah ada, dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di kota ini, yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Jember, 27 Juni 2003

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN OTENTISITAS PENULIS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
I.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
I.2. Ruang Lingkup Pembahasan .....	9
I.3. Rumusan Permasalahan .....	11
I.4. Kerangka Dasar Teori .....	13
I.5. Hipotesa .....	18
I.6. Metode Penelitian .....	20
I.7. Pendekatan .....	23
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM UZBEKISTAN KETIKA BERGABUNG DENGAN UNI SOVIET</b>	
II.1. Proses Terbentuknya Negara Uzbekistan .....	25
II.2. Bergabungnya Uzbekistan Ke Dalam Konfigurasi Uni Soviet .....	32
II.3. Implementasi Kebijakan Rusifikasi dan Sovietisasi Di Uzbekistan	
II.3.1. Bidang Ekonomi .....	34
II.3.2. Bidang Sosial .....	37
II.3.3. Bidang Politik .....	42

**BAB III. REPUBLIK UZBEKISTAN PASCA DISINTEGRASI UNI SOVIET**

III.1. Kondisi Politik Uzbekistan Pasca Proklamasi Kemerdekaan .....	45
III.1.1. Munculnya Oposisi Sekuler-Demokratik.....	49
III.1.2. Munculnya Oposisi Islam .....	59
III.1.3. Munculnya Partai Politik .....	68
III.2. Reformasi Ekonomi Model Uzbek.....	76
III.3. Persaingan Antar Etnis dan Jaringan <i>Patronage</i> .....	82

**BAB IV. FAKTOR PENDORONG DIMULAINYA HUBUNGAN BILATERAL  
ANTARA UZBEKISTAN-AMERIKA SERIKAT PASCA SERANGAN**

**11 SEPTEMBER 2001**

IV.1. Kegagalan Reformasi Ekonomi.....	89
IV.2. Serangan Kelompok Islam Radikal / IMU.....	92
IV.3. Penandatanganan Deklarasi <i>Partnership</i> .....	94

**BAB V. KESIMPULAN .....** 105

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Peta Republik Uzbekistan
2. Lampiran 2 : Konstitusi Republik Uzbekistan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Alasan Pemilihan Judul

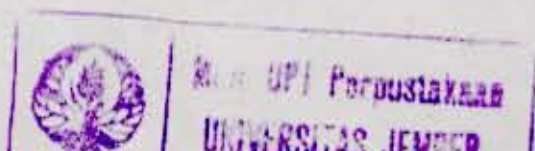
Uzbekistan adalah sebuah negara di kawasan Asia Tengah yang pernah terintegrasi kedalam konfigurasi Republik Sosialis Uni Soviet<sup>1</sup>. Sejarah republik ini, sebenarnya bisa dilihat dari pengambilan kata "Uzbekistan" sebagai nama negaranya. Uzbekistan, berasal dari kata "Uzbek" dan "stan". *Uzbek* artinya adalah tuan / guru / lord / khan. Sedangkan "stan" diambil dari bahasa Turki yang berarti negara.<sup>2</sup> Jadi, "Uzbekistan" secara singkat bisa diterjemahkan sebagai tempat kediaman para tokoh. Hal ini dapat pula berarti bahwa Uzbekistan, merupakan daerah pusat ilmu pengetahuan (yang diajarkan oleh para guru) dan berbagai kegiatan pemerintahan (yaitu lord / khan yang merupakan simbol dari seorang pimpinan).<sup>3</sup> Dan sejarah memang membuktikan, bahwa sebelum datangnya ekspansi Rusia dibawah naungan kaum Tsarist, Uzbekistan adalah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Republik Sosialis Uni Soviet atau *Union of Soviet Socialist Republics* (dalam bahasa Rusia disebut *Soyuz Sovyetskikh Sotsialisticheskikh Respublik*), adalah sebuah negara federal multinasional yang terdiri atas 15 anggota, yaitu Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Kyrgystan, Turkmenistan, Tajikistan, Belorusia, Georgia, Moldova, Estonia, Latvia, Lithuania, Azerbaijan, Armenia, dan Uzbekistan. USSR terbentuk setelah Revolusi Rusia meletus pada bulan Oktober 1917 yang melanda kawasan kekaisaran Rusia dan bubar pada tahun 1991 setelah negara komunis dengan luas wilayah terbesar didunia ini mengalami pembaharuan dalam negeri pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev. Lihat dalam Fadli Zon, *Gerakan Etnonasionalis : Bubarnya Imperium Uni Soviet*, PT Surya Multi Grafika, Jakarta, 2002, hal 5

<sup>2</sup> KOMPAS, 5 Oktober 2001

<sup>3</sup> Melalui periodisasi sejarah Uzbekistan, dapat dibuktikan bahwa daerah ini dulunya adalah pusat kerajaan Timur Leng, pusat kekaisaran Yunani-Bachtria, dll. Lihat dalam Zamira Eshanova, "*History of Uzbekistan*", <http://www.eurasianet.org/departmen/insight/articles/eas080601.shtml>

<sup>4</sup> *Ensiklopedi Umum*, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1984, hal. 1144





Uzbekistan merupakan tempat kelahiran tokoh-tokoh muslim yang paling berpengaruh dalam perkembangan dunia intelektual. Sebut saja Ibnu Sina, seorang filsuf serta pakar dibidang kedokteran. Ada Imam Bukhari, seorang ulama hadist terkemuka. Selain itu, masih ada pula Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Khaitami, Umar Khayam, dan masih banyak lagi tokoh lain yang namanya tertoreh dengan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam.<sup>5</sup>

Pada pertengahan abad 19, yaitu tepatnya setelah tentara Tsar berhasil menguasai kawasan Asia Tengah, keadaan mulai berubah. Memang pada masa imperium Rusia, Tsar relatif tidak turut campur dalam masalah struktur sosial Islam dan tidak berusaha keras dalam memodernisasi masyarakat. Namun pendudukan Uni Soviet pasca Revolusi Oktober 1917 selanjutnya, benar-benar telah mengubah identitas keislaman yang dulu begitu melekat kuat pada masyarakat Turkistan, khususnya Uzbekistan. Melalui kebijakan Rusifikasi dan Sovietisasi, pemerintah Soviet berusaha mencabut akar tradisi Islam yang dianggap menjadi sumber kendala bagi perkembangan ekonomi, misalnya dalam hal subordinasi perempuan.<sup>6</sup>

Namun demikian, meskipun ideologi komunis ditetapkan sebagai standar hidup yang baru, keinginan untuk mempertahankan tradisi dan budaya asli masih tetap ada dan menggema di telinga setiap pribadi bangsa Uzbekistan. Tetapi apakah daya, sistem komunis yang mengikat mereka begitu kuat mencengkeram setiap desah

---

<sup>5</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam : Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2000, hal. 92

<sup>6</sup> Fadli Zon, Op. Cit, hal. 94

nafas dan urat nadi kehidupan. Merekapun tidak bisa berbuat banyak untuk memperjuangkan kemerdekaan negerinya dan melepaskan diri dari jeratan pasukan garda merah dibawah komando pemerintah Soviet. Padahal, dalam Konstitusi Uni Soviet, khususnya pasal 27, disebutkan bahwa Uni Soviet menjamin kebebasan setiap republik federasi untuk meraih kemerdekaannya. "*Za kazhdoy soyusnoy respublikoy sokhra-nyaetsya pravo svobodnogo vikhoda i SSSA*". Demikian bunyi pasal tersebut. Artinya adalah setiap Republik Serikat dijamin hak-haknya untuk bebas keluar dari Uni Soviet.<sup>7</sup> Namun ternyata pada prakteknya keputusan untuk berpisah dari Republik Uni sama artinya dengan bunuh diri. Selain persyaratan dan prosedurnya yang berat dan berbelit-belit, proses pembebasan ini juga memakan waktu lama. Belum lagi biaya ganti rugi yang sangat tinggi serta berbagai tekanan ekonomi yang dikenakan pada negara bersangkutan.

Pada tahun 1991, seiring dengan diadakannya berbagai perubahan sistem dalam negeri yang diterapkan pemerintah Soviet waktu itu, maka republik komunis dengan wilayah terluas di dunia ini pun ambruk. Kebijakan *glasnost*, *perestroika*, dan *democratisatzia* ( keterbukaan, restrukturisasi, dan demokratisasi ), ternyata malah membawa kehancuran bagi Uni Soviet yang telah dibangun selama 73 tahun sejak masa Revolusi Oktober.

Disintegrasi Uni Soviet dan berbagai peristiwa serta perubahan politik yang terjadi berikutnya mendorong negara-negara satelit Uni Soviet untuk segera

---

<sup>7</sup> Dwi Susanto dan Zainuddin Djafar, *Perubahan Politik di Negara-negara Eropa Timur*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal. 26



memproklamlirkan kemerdekaannya. Sebelum bulan Maret 1990, telah ada 5 republik yang menyatakan kedaulatan dan kemerdekaannya. Mereka adalah Azerbaijan, Estonia, Latvia, Lithuania, dan Georgia. Pada bulan Juni 1990, bahkan Parlemen Rusia sendiri dibawah Presiden Boris Yeltsin pun ikut memproklamirkan Republik Federasi Rusia sebagai negara yang berdaulat.<sup>8</sup> Pernyataan kedaulatan itu kemudian diikuti oleh negara-negara federasi yang lain seperti Moldova, Ukraina, Armenia, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kazakhstan. Sedangkan Uzbekistan baru menyatakan diri resmi bebas dari Soviet pada tanggal 31 Agustus 1991.

Pasca proklamasi kemerdekaannya, Uzbekistan kembali dihadapkan pada permasalahan baru yang lebih rumit, yaitu bagaimana membangun tanah airnya yang secara *de jure* telah resmi bebas dari Uni Soviet, namun secara *de facto* sistem serta struktur komunisme yang sudah mengakar lama masih berdiri tegak dan kokoh. Selain itu mereka juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah identitas nasional, rehabilitasi ekonomi, serta konsolidasi kebijakan dalam dan luar negeri yang sempat mengalami stagnasi menjelang akhir pemerintahan Gorbachev. Disatu sisi, rakyat Uzbek benar-benar ingin menghapus seluruh warisan komunisme peninggalan Uni Soviet dan mengganti semuanya dengan sistem serta struktur Islam yang pernah mereka terapkan sebelum Rusia datang menaklukkan

---

<sup>8</sup> Proklamasi Rusia ini adalah suatu kejutan yang sulit dibayangkan karena Rusia adalah sebuah negara yang luasnya sepertiga bagian dari Uni Soviet, setengah jumlah penduduknya menguasai Uni Soviet, dan di Moskow, Rusia, terletak ibukota Uni Soviet. Tiba-tiba ia menyatakan diri berpisah dari Uni Soviet dan berdiri otonom. Hal ini semakin mendorong negara-negara federasi lain untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Fadli Zon, Op. Cit, hal. 35



Uzbekistan pada tahun 1875 dan disusul dengan pendudukan Uni Soviet sejak tahun 1924. Mereka merindukan kejayaan Islam masa lalu di Asia Tengah. Namun disisi lain, rakyat Uzbekistan masih merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari struktur lama yang pada kenyataannya tetap mewarnai sendi-sendi kehidupan di negara yang dulunya merupakan pusat Kerajaan Tamer Lane atau Timur Leng ini. Dibidang keamanan saja misalnya. Selama lebih dari satu abad, Uzbekistan mendapatkan jaminan dari Rusia, mulai dari era Tsarist sampai masa Soviet. Rusia hadir sebagai kekuatan perekat yang menyatukan, ataupun melakukan kontrol terhadap berbagai kelompok masyarakat.<sup>9</sup>

Sedangkan dibidang keagamaan, Rusia melakukan pengawasan yang sangat ketat. Meskipun agama Islam diperbolehkan berkembang pada awal pendudukan Uni Soviet, namun selanjutnya agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad ini dimusnahkan secara besar-besaran. Sekolah-sekolah yang berbau Islam ditutup. Pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan hukum Islam dilarang. Huruf Arab dihapuskan. Sebagai gantinya, diajarkan huruf Latin dan bahasa Rusia dijadikan bahasa resmi negara.<sup>10</sup>

Pada bidang perekonomian, segala sesuatunya tidak banyak berbeda. Dulu, semasa Uni Soviet masih eksis, setiap republik saling bergantung satu sama lain. Jika republik yang satu menghasilkan bahan mentah, maka yang lain membuat produknya.

---

<sup>9</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Qalam, Yogyakarta, 1996, hal. 282

<sup>10</sup> Shirin Akiner, *Conflict, Stability, and Development in Central Asia* dalam *Between Development and Destruction : An Enquiry Into The Causes of Conflict*, Mac Millan Press, London, hal. 293



Apabila sebuah negara difokuskan untuk menangani bidang pertanian, yang lain dikhususkan industri. Urusan perdagangan dan tukar menukar diatur dari pusat. Setelah merdeka, mereka pun kebingungan tentang siapa yang akan mengatur jalannya roda perekonomian tersebut. Hal ini menjadi alasan utama mengapa rakyat Uzbekistan lebih memilih untuk kembali pada kebijakan lama yang pro Rusia.<sup>11</sup>

Dibawah pemerintahan Presiden Islam Abduganievich Karimov, Uzbekistan benar - benar mengalami masa transisi yang sangat sulit. Selain program reformasi yang banyak menemui hambatan, negara penghasil kapas terbesar didunia ini juga sangat rentan terhadap gerakan-gerakan separatisme yang justru timbul dari dalam negeri. IMU (*Islamic Movement of Uzbekistan*) adalah kendala terbesar yang tidak boleh diabaikan. IMU merupakan gerakan Islam Uzbekistan yang selama ini menjalin kerja sama dengan kelompok Taliban di Afghanistan. Fokus utama dari gerakan Islam militan ini adalah mendirikan sebuah negara Islam yang berpusat di Lembah Ferghana.

Aksi yang dilakukan oleh IMU ini sempat menarik perhatian internasional ketika pada tahun 1999 dituduh sebagai pelaku aksi pengeboman di Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Akibat dari pengeboman tersebut, 13 orang meninggal dunia dan lebih dari 100 orang terluka parah.<sup>12</sup> Sehubungan dengan sikap IMU yang radikal itulah, maka Presiden Islam Karimov yang sejak awal periode pemerintahannya

---

<sup>11</sup> Samuel P. Huntington, Op. Cit, hal. 295

<sup>12</sup> ICG Central Asia Briefing Paper, *Central Asian Perspectives on 11 September 2001 and The Afghan Crisis*, 28 September 2001, hal. 5, lihat dalam <http://www.Crisisweb.com>

dikenal sangat loyal pada Moskwa, mendapatkan jaminan penuh dari Rusia untuk meredam aksi pemberontakan tersebut.

Masalah lain yang harus ditangani oleh pemerintah Uzbek adalah memulihkan kondisi perekonomian yang sempat mengalami stagnasi. Kebijakan ekonomi yang bergaya Soviet memang mempunyai kontribusi besar atas terjadinya kemiskinan diwilayah ini. Rata-rata penghasilan resmi rakyat Uzbekistan hanya sekitar 20 dolar (kira-kira Rp. 20.000) per bulan. Bahkan beberapa bulan sebelum serangan 11 September 2001 yang menghebohkan dunia itu terjadi, Dana Moneter Internasional (IMF) meninggalkan negeri ini karena tidak pernah melihat pembaharuan-pembaharuan yang berarti.<sup>13</sup>

Dari fakta-fakta tersebut dapat dilihat bahwa nasib Uzbekistan berada diujung tanduk. Sedikit saja angin bertiup, ia akan langsung jatuh. Maka tidak mengherankan jika dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah bubarnya Soviet, langkah transisi di Uzbekistan masih seperti *puzzle*. Kejadian-kejadian dalam negeri, seperti kondisi politik, pembangunan ekonomi, dan berbagai peristiwa sosial lainnya kebanyakan masih merupakan kelanjutan dari cerita masa lalu, daripada reformasi yang seharusnya dilakukan. Uzbekistan disibukkan oleh masalah-masalah internal dan eksistensinya dalam kancah politik internasional secara perlahan mulai memudar.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Loc. Cit

<sup>14</sup> Olivier Roy, *The New Central Asia : The Creation of Nations*, I.B. Tauris Publishers, New York, 2000, hal. 3



Pasca serangan 11 september 2001 yang lalu, Uzbekistan tiba-tiba muncul sebagai sebuah negara dengan kekuatan yang patut diperhitungkan. Selain karena letak geografisnya yang berdekatan dengan Afghanistan, Uzbekistan yang juga merupakan daerah penting bagi invasi Soviet di tahun 1970-an itu memiliki sarana transportasi dan pangkalan udara yang bagus, serta kapabilitas militer yang bisa diandalkan. Hingga saat ini tercatat ada 267 pelabuhan udara terdapat di Uzbekistan. Inilah salah satu negara satelit eks Uni Soviet, sekaligus negara yang berbatasan langsung sepanjang 137 km dengan Afghanistan, yang sejak awal memberikan "lampu hijau" bagi upaya koalisi internasional yang digalang oleh Presiden George W. Bush setelah aksi terorisme 11 September 2001 menggemparkan dunia internasional.<sup>15</sup>

Kebijakan Presiden Islam Karimov yang sangat kooperatif terhadap Amerika Serikat dalam menangani masalah teroris ini sempat menjadi sebuah perdebatan yang kontroversial ketika kemudian negara-negara Islam lain mengecam tindakan berani Karimov itu. Akan tetapi, kecaman tersebut agaknya tidak menyurutkan langkah Karimov untuk tetap memberi ijin terhadap masuknya pasukan darat AS ke wilayahnya serta menggunakan sebuah pangkalan udara milik Uzbekistan untuk pesawat-pesawat tempur AS. Hanya beberapa jam setelah Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld memberikan jumpa persnya usai bertemu Karimov pada tanggal 5 Oktober 2001 lalu, pesawat Kargo pertama AS C-17 milik Divisi Gunung ke-10 dari

---

<sup>15</sup> KOMPAS, 5 Oktober 2001

Port Drum, New York, AS, mendarat di pangkalan udara Khanabad, tak jauh dari kota di selatan Uzbekistan, Karshi. Disamping itu, tengah dalam perjalanan 1000 orang tentara dari divisi yang sama, yang diberitakan akan melakukan misi spionase, pencarian, serta penyelamatan (SAR).<sup>16</sup>

Berangkat dari paparan diatas, maka pada penulisan karya tulis ilmiah ini penulis tertarik untuk mengambil judul :

**KEBIJAKAN PRESIDEN UZBEKISTAN ISLAM KARIMOV  
DALAM UPAYA MEMERANGI TERORISME INTERNASIONAL  
PASCA SERANGAN 11 SEPTEMBER 2001**

**1.2. Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, ruang lingkup pembahasan diperlukan untuk memberikan arah dan batasan yang tepat dalam membahas permasalahan. Dengan adanya batasan, kecenderungan pembahasan masalah yang tidak seksama serta kemungkinan terjadinya pembiasan masalah dapat dihindari. Selain itu, fokus pembahasan bisa lebih tajam sehingga bobot karya ilmiah akan meningkat. Ruang lingkup juga memberikan kemudahan bagi penulis dalam pencarian data serta menganalisisnya.

Menurut Sutrisno Hadi :

---

<sup>16</sup> KOMPAS, 7 Oktober 2001



“Sekali suatu persoalan telah ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok permasalahan tersebut. Bagi penyelidik sendiri, pemberian batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja, sedangkan bagi orang lain kepada laporan penelitian ini hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah kekaburan wilayah persoalannya.”<sup>17</sup>

Menurut Joseph Frankel :

“Pada suatu titik tertentu, kejadian historis adalah unik, karena itu semakin luas ruang lingkup studi kita, maka akan semakin sukar untuk membuat pernyataan”.<sup>18</sup>

Ruang lingkup pembahasan yang dimaksud, penulis bagi menjadi dua yaitu batasan waktu dan batasan materi.

## 1.2.1. Batasan Waktu

Batasan waktu adalah rentang waktu yang diambil dari suatu peristiwa yang menjadi pokok pembahasan. Disini penulis berusaha membatasi waktu menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pada tahun 1991, yaitu ketika Uzbekistan resmi melepaskan diri dari Uni Soviet, dan yang kedua yaitu pada pasca serangan 11 September 2001 dengan asumsi bahwa pada saat itulah Presiden Uzbekistan Islam Karimov mulai menunjukkan sikapnya yang kooperatif terhadap Amerika dalam upaya memerangi terorisme internasional. Titik waktu yang kedua ini sekaligus menjadi patokan diawalinya kebijakan-kebijakan pemerintah Uzbek untuk lebih

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984, hal. 18

<sup>18</sup> Joseph Frankel, *Hubungan Internasional*, Aris Sungguh Bersaudara, Jakarta, 1980, hal. 20

serius dalam menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat, terutama dalam bidang ekonomi dan militer keamanan.

## **1.2.2. Batasan Materi**

Batasan materi merupakan pusat bahasan dari materi dimana bahasan tersebut dibatasi ruang lingkungannya agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu melebar dari inti permasalahan. Dalam karya tulis ini, penulis mencoba membatasi materi penulisan pada latar belakang ekonomi, sosial, dan politik di Uzbekistan yang menjadi alasan utama dikeluarkannya kebijakan pemerintah Uzbekistan ketika menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dalam kampanye anti terorisme di Afghanistan. Karya tulis ini mencoba menyajikan suatu fenomena dimana sebuah negara yang dulu sangat kental nilai-nilai keislamannya, berubah menjadi salah satu negara komunis yang sangat loyal kepada Moskwa, hingga kemudian menjadi sekutu baru Amerika Serikat dalam memerangi terorisme internasional terutama setelah peristiwa penyerangan Amerika terhadap Afghanistan pasca tragedi 11 September 2001.

## **1.3. Problematika**

Pada dasarnya masalah merupakan jiwa dari penelitian ilmiah. Karena berawal dari sebuah permasalahan maka proses berpikir dan penyelidikan serta usaha-usaha pemecahan masalah dapat terjadi. Menurut Prof. Dr. Winarno Surakhmad, M. Sc, Ed. :



“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang harus dilalui (dengan jalan mengatasinya) apabila kita akan berjalan terus”.<sup>19</sup>

Setelah Amerika Serikat melakukan intervensi ke Uzbekistan berkaitan dengan kepentingannya dalam kampanye untuk memerangi terorisme internasional di Afghanistan, maka sikap pemerintah Uzbek terhadap Moskwa tampaknya mulai memudar. Kalau dulunya Uzbekistan terkenal sangat loyal dengan Moskwa, sekarang yang terjadi justru sebaliknya. Presiden Uzbekistan Islam Abduganievich Karimov, lebih memilih untuk bekerja sama dengan Amerika dengan harapan akan mendapatkan paket bantuan ekonomi dan keamanan daripada tetap bertahan dan menggantungkan diri pada bantuan Rusia.

Langkah kooperatif Karimov tersebut diawali dengan memberikan ijin terhadap pasukan darat AS untuk masuk ke wilayah Uzbekistan serta digunakannya sebuah pangkalan udara Uzbek bagi pesawat-pesawat tempur AS yang akan melakukan penyerangan ke Afghanistan untuk menggempur negeri yang melindungi tersangka utama aksi peledakan dua gedung utama di Amerika Serikat, World Trade Center dan Pentagon, Osama bin Laden. Uzbekistan adalah wilayah yang amat berarti bagi Amerika Serikat karena secara logis, serangan militer dari pangkalan militer Pakistan nyaris tak mungkin dilakukan mengingat begitu besarnya tantangan dari kelompok Islam militan dari dalam negeri.

---

<sup>19</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito Bandung, Bandung, 1994, hal. 16

Sesuatu yang akan penulis jadikan obyek permasalahan dari paparan fenomena diatas adalah :

**Mengapa Presiden Islam Karimov mengambil kebijakan untuk membangun koalisi dengan Amerika Serikat dalam upaya memerangi terorisme internasional pasca serangan 11 September 2001 ?**

#### 1.4. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan suatu bentuk penjelasan umum tentang fenomena tertentu yang diungkapkan secara sistematis, lugas, dan memuaskan kepada seseorang yang mengenal karakteristik realitas-realitas yang sedang dipelajari.<sup>20</sup>

Menurut Mohtar Mas' oed untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu, teori memerlukan proses pembuktian secara sistematis. Teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak melalui analisa yang jelas dan penggunaan data yang sistematis serta memuat konsep-konsep yang jelas.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ilmiah diperlukan dasar-dasar untuk melihat sejauh mana aspek pemilahan dan penyusunan data yang akan dipergunakan untuk menganalisa suatu masalah. J. C. Plano memberikan batasan teori secara umum adalah :

“Suatu gagasan atau kerangka berpikir yang mengandung penjelasan, ramalan, atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Dalam ilmu pengetahuan empiris, teori mengacu pada kaidah yang logis pada

<sup>20</sup> James Dougherty dan Robert Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations*, Longman, New York, 1997, hal. 49

<sup>21</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal. 204



perangkat proposisi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel, dengan maksud menjelaskan atau meramalkan atau kedua-duanya."<sup>22</sup>

Secara lengkap James E. Dougherty dan Robert Pfaltzgraff mendefinisikan teori sebagai berikut :

"Suatu cara mengorganisir pengetahuan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pantas dicarikan jawabannya dan membimbing kita ke arah jawaban-jawaban yang valid."<sup>23</sup>

Sementara itu Mc cain dan Segal mendefinisikan teori sebagai :

"Serangkaian statement yang saling berkaitan yang terdiri dari kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dari teori itu. Kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement teoretik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empirik ( yaitu hipotesis )."<sup>24</sup>

Teori yang baik adalah teori yang tidak berbelit-belit, hanya memiliki sebuah ide sentral yang tertentu, sederhana dan mudah untuk dipahami. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena.

Teori lebih mengibaratkan tirai yang terdiri dari potongan-potongan kecil serta tambahan-tambahan yang disambung-sambung, daripada sepotong bahan lebar tanpa jahitan-jahitan yang menutupi pengetahuan kita mengenai proses-proses hubungan internasional.

<sup>22</sup> J.C. Plano, Robert E. R. dan Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 266

<sup>23</sup> James Douegherty dan Robert Pfaltzgraff, Op. Cit, hal. 49

<sup>24</sup> Mohtar Mas' oed, Op. Cit, hal. 204

Keputusan Presiden Islam Karimov untuk bergabung dengan Amerika dalam memerangi terorisme internasional merupakan sebuah fenomena baru bagi fora internasional. Selama ini, Uzbekistan dikenal dunia sebagai salah satu negara satelit Rusia yang sangat loyal kepada Moskwa. Bukan hanya karena sisi ketidak mampuan pemerintah Uzbekistan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri yang membuat negara ini tetap bergantung pada Rusia, akan tetapi juga karena Karimov sejak awal karirnya merupakan anggota senior dari golongan "nomenklatura" (kaum elite) Partai Komunis.<sup>25</sup> Oleh karena itulah kemudian penulis beranggapan bahwa **Teori Dependensia, Teori Pembangunan Ekonomi, serta Teori Politik Luar Negeri**, lebih tepat apabila digunakan sebagai alat analisis dalam kasus ini.

Secara sederhana, Theotonio Dos Santos mendefinisikan dependensia sebagai suatu situasi dimana perekonomian negara-negara tertentu dikondisikan oleh perkembangan dan ekspansi dari perekonomian negara-negara lain.<sup>26</sup> Sesuatu dapat dikatakan dependen apabila beberapa negara yang dominan dapat berkembang dan terus berkembang dengan kekuatan sendiri, sementara negara-negara lain yang tergantung hanya dapat berkembang sebagai refleksi dari ekspansi negara-negara dominan tersebut. Ekspansi itu dapat berupa pinjaman luar negeri, akses pasar, bantuan militer, dan sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> KOMPAS, Jum'at, 12 Maret 1993, hal.9

<sup>26</sup> Theotonio Dos Santos dalam Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 63

<sup>27</sup> Umar Surya Bakri, *Ekonomi Politik Internasional*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Universitas Jayabaya, Jakarta, 1997, hal. 67



Sementara itu menurut Mohtar Mas'ood, inti dari teori dependensia adalah penetrasi asing dan ketergantungan eksternal. Kedua unsur tersebut menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktur ekonomi yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik sosial dan akan mendorong timbulnya penindasan negara terhadap rakyat.<sup>28</sup>

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa sebuah negara yang dependen ibarat menghadapi buah simalakama. Jika tetap bergantung pada ekspansi ekonomi negara-negara maju maka mereka tidak akan pernah menjadi negara yang mandiri atau tidak dapat menentukan kemajuan dengan cara-cara sendiri. Disisi lain, jika negara memutuskan ketergantungan tersebut, tidak ada pilihan lain kecuali harus bisa *survive* dan siap untuk menghadapi segala resiko termasuk kebangkrutan ekonomi, pergolakan dalam negeri, dan keterbelakangan.

Sedangkan dalam Teori Pembangunan Ekonomi yang diungkapkan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu sangat ditentukan oleh tabungan dan investasi.<sup>29</sup> Kalau tabungan dan investasinya rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah serta sebaliknya. Mereka juga mengatakan bahwa masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah menambahkan investasi modal dan masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal, dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh

<sup>28</sup> Mohtar Mas'ood, Op. Cit, hal. 204

<sup>29</sup> Evsey Domar dan Roy Harrod dalam Arief Budiman, Op. Cit, hal. 19

Blomstrom dan Hettne, bahwa ketika ada perbedaan yang tampak antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang, maka dibuatlah usaha-usaha untuk menggambarkan tingkat dan macam-macam aspek dari keterbelakangan. Persoalan keterbelakangan kemudian dirumuskan sebagai masalah kekurangan modal.<sup>30</sup> Oleh karena itu, berdasarkan pada model ini, resep para ahli ekonomi pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga untuk memecahkan persoalan keterbelakangannya adalah dengan mencari tambahan modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sedangkan dalam Teori Politik Luar Negeri, seperti yang diungkapkan oleh Zucher dan Smith, Politik Luar Negeri adalah suatu tujuan yang bersifat relatif (tidak konsisten dan selalu mengalami perubahan) yang dirumuskan secara matang oleh para pembuat keputusan (*policy maker*) negara yang bersangkutan.<sup>31</sup> Pelaksanaan politik luar negeri akan selalu menyesuaikan dengan *national interest* yang ada pada suatu waktu dan juga akan mengalami perubahan pada masa-masa yang akan datang.

Gambaran para teoritis di atas relevan dengan fenomena yang terjadi di Uzbekistan bahwa dalam putaran sejarah dimulainya roda pemerintahan Republik Uzbekistan dibawah pimpinan Presiden Islam Karimov, negeri ini selalu diwarnai oleh suasana pergolakan dan ketidakpastian. Mulai dari serangan yang dilancarkan oleh IMU (Islamic Movement of Uzbekistan) yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintah hingga persoalan reformasi ekonomi yang tak kunjung usai. Persoalan-persoalan inilah yang kemudian mendorong pemerintah Uzbekistan untuk merubah

---

<sup>30</sup> Blomstrom dan Hettne dalam Arief Budiman, Op. Cit, hal. 19

<sup>31</sup> K.J.Holsti, **Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis**, Penerbit Erlangga, 1988, hal. 107



arah kebijakan luar negerinya yang selama ini hanya bergantung pada bantuan Rusia dengan beralih ke Amerika. Perubahan kebijakan yang sangat signifikan dalam hubungan bilateral kedua negara ini, baik itu Uzbekistan-Rusia maupun Uzbekistan-Amerika, membawa pengaruh besar dalam kondisi internal ekonomi dan keamanan di Uzbekistan. Sementara itu, Rusia sendiri tampaknya tidak begitu merespon tindakan Uzbekistan yang memilih untuk berpartner dengan Amerika. Hal ini dikarenakan oleh kondisi-kondisi dalam negeri Rusia yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan sejak disintegrasi yang melanda kawasan Soviet sepuluh tahun yang lalu.

Terhitung sejak tanggal 11 Maret 2002 yang lalu, Presiden Islam Karimov mulai mengadakan kunjungan persahabatan ke Amerika Serikat. Kunjungan ini tidak lain adalah untuk mengembangkan kerja sama ekonomi dan keamanan yang lebih serius antara Tashkent dengan Washington. Menurut Sergei Blagov, Karimov bahkan akan menekan pemerintah AS supaya mendapatkan bantuan dana investasi yang lebih besar daripada sebelumnya. Sampai saat ini tercatat ada 305 perusahaan di Uzbekistan yang telah menerima kucuran dana dari Amerika Serikat. Data lain menyebutkan bahwa pemerintah AS telah memberikan 100 juta dolar pada perjanjian pertama yang ditanda tangani bulan Desember 2001 dan selanjutnya akan mencairkan lagi investasi sejumlah 60 juta dolar pada periode perjanjian selanjutnya.

Sebelum keberangkatannya ke negeri Paman Sam, Karimov mengatakan bahwa ia akan menandatangani deklarasi *partnership*, dimana dalam hubungan tersebut Uzbekistan diharapkan dapat segera bangkit dari kondisi keterpurukan

akibat kegagalan reformasi ekonomi serta membangun negara itu menjadi lebih demokratis.

Pernyataan Presiden Karimov yang bersedia melakukan kerja sama dengan Amerika dalam memerangi terorisme internasional pada dasarnya lebih merupakan pernyataan politis yang berujung pada paket bantuan atas imbalan yang diberikan Uzbekistan dengan memperbolehkan pesawat-pesawat AS untuk menggunakan salah satu pangkalan udara Uzbekistan di bagian selatan daripada kesungguhannya untuk memerangi teroris itu sendiri.

## 1.5. Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan atau jawaban sementara dari analisis permasalahan yang harus diuji kebenarannya. Sutrisno Hadi mendefinisikan hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis dipandang sebagai salah satu konklusi yang sifatnya sangat sementara atau dugaan yang mungkin benar mungkin salah. Dia akan menolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta membenarkan. Penerimaan atau penolakan hipotesis dengan begitu sangat tergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta yang dikumpulkan.”<sup>32</sup>

Hipotesis yang baik adalah secara logic tumbuh dari atau ada hubungannya dengan laporan ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari dan hendaknya jelas, sederhana, terbatas, serta dapat diuji.

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, Op. Cit, hal. 18



Uzbekistan adalah sebuah negara kunci yang mempunyai posisi strategis dalam aksi militer balasan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan pasca serangan 11 September 2001. Selain memiliki 267 pangkalan udara serta sarana transportasi yang bagus, Uzbekistan juga memiliki kapabilitas militer yang dapat diandalkan. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah AS tak segan-segan menggandeng Uzbekistan untuk memburu Osama bin Laden yang dituduh sebagai pelaku aksi pengeboman gedung WTC dan Pentagon di Amerika. Dan usaha tersebut tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. Presiden Karimov menyambut baik maksud Bush dengan mengizinkan sebuah pelabuhan udaranya untuk dijadikan pangkalan udara bagi tentara Amerika yang akan menggempur Afghanistan. Selain itu Karimov juga menyediakan fasilitas lain, yaitu sebuah instalasi militer canggih.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas dan berpegang pada landasan teori yang ada, maka penulis mengajukan hipotesis yaitu :

“Bahwa Presiden Islam Karimov mengeluarkan kebijakan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme internasional dilatar belakangi oleh kondisi keamanan dan perekonomian Uzbekistan yang semakin terpuruk sejak Uni Soviet hancur. Dengan sikapnya yang lebih terbuka terhadap Amerika maka diharapkan Uzbekistan akan dapat memperoleh paket bantuan berupa dana investasi dan bantuan keamanan untuk menghadapi serangan kelompok Islam radikal yang menamakan diri sebagai IMU( Islamic Movement of Uzbekistan).”

## **I.6. Metode Penelitian**

Dalam menyusun sebuah karya tulis, metode penelitian harus diuraikan dengan jelas agar semua pihak yang hendak menganalisa suatu permasalahan yang sama, dalam setiap langkahnya dapat mengulangi sendiri penelitian itu jika diperlukan.

### **I.6.1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu tahap dimana penulis melakukan suatu penelitian terhadap suatu sumber dan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Pengujian hipotesis dari studi yang dilakukan pada karya tulis ini menggunakan metode non-reaktif, yaitu observasi yang tidak memerlukan reaksi dari obyek penelitian. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penelaahan secara sistematis atas buku-buku, jurnal, berita dari koran dan majalah, serta segala informasi yang tercatat dan menunjang jalannya penelitian. Sehingga kemudian yang didapat adalah data sekunder yang berupa kumpulan laporan dari pihak lain yang sebelumnya merupakan sumber asli.

Pengambilan data yang dilakukan oleh penulis berasal dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Pusat Informasi Kompas Jakarta
4. Beberapa web site yang berhubungan dengan tema karya tulis ini.



Selain itu penulis juga mengambil sumber-sumber data lain yang dianggap menunjang dalam penelitian untuk memperoleh tambahan bahan guna memperlancar jalannya penelitian untuk memecahkan permasalahan yang telah diajukan.

### **1.6.2. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah uraian tentang cara mengkaji data dan mengolah data awal sehingga menjadi data atau informasi tentang cara menganalisisnya. Menurut The Liang Gie, yang dimaksud dengan analisa adalah :

“Segenap rangkaian pembuatan pikiran yang menelaah sesuatu hal secara mendalam, terutama untuk mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat.”<sup>33</sup>

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis menggunakan cara berpikir yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan diatas, yaitu dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Menurut Mohtar Mas'ood, metode deduktif adalah :

“menarik prinsip-prinsip umum dengan menghasilkan prinsip yang lebih rendah sehingga sesudahnya kita bisa menguji masing-masing proposisi dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus itu bisa dijelaskan dan diramalkan dengan teori yang telah ditetapkan.”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, UGM Press, Yogyakarta, 1984, hal. 65

<sup>34</sup> Mohtar Mas'ood, *Op. Cit.*, hal. 80

Sesuai dengan metode tersebut, maka untuk memudahkan penyajian bentuk paparan penulisan maka penulis menggunakan teori pembangunan ekonomi dan teori *dependencia* sebagai alat analisis permasalahan yang telah ditetapkan diatas.

Bagi sebuah negara yang baru merdeka, pembangunan adalah suatu tantangan, terlebih lagi pembangunan dibidang ekonomi yang merupakan pondasi utama kehidupan suatu bangsa. Penggunaan sumber daya alam secara optimal seharusnya menjadi prioritas pertama untuk mengurangi beban hutang maupun pinjaman terhadap negara lain. Namun melihat gaya kepemimpinan Karimov yang tidak jauh beda dengan pemerintahan Soviet, maka Uzbekistan akan sulit untuk berubah. Selama ini Karimov hanya mengandalkan uluran bantuan dari Rusia yang kemudian dialihkan kepada Amerika. Dengan demikian, proses pembelajaran untuk bisa menjadi sebuah negara yang mandiri itu belum pernah dilakukan. Dan terciptanya sebuah kondisi ketergantungan terhadap pihak lain akan menimbulkan sikap yang kurang inovatif dan progresif dalam mencapai suatu tujuan demi sebuah kemajuan.

## **1.7. Pendekatan**

Dalam penulisan suatu karya tulis, pendekatan diperlukan untuk mempermudah pengolahan data sehingga nantinya akan didapat suatu hasil yang benar-benar tepat bagi penulisan karya tulis tersebut. Miriam Budiarjo menjelaskan mengenai pendekatan sebagai berikut :



“Pendekatan mencakup standar atau tolok ukur yang dipakai untuk memilih masalah yang menentukan data mana saja yang akan diteliti dan data mana yang hendak dikesampingkan.”<sup>35</sup>

Sedangkan menurut The Liang Gie, pendekatan merupakan cara atau langkah berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada akhirnya merupakan cara yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan yang dibuat mengenai suatu gejala yang akan diteliti.<sup>36</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah pendekatan sejarah-politik ( *political-hystoris approach* ), yaitu pendekatan yang menggunakan suatu deskripsi kronologis dari kenyataan politik mengenai berbagai hal, baik itu bersifat institusional maupun non-institusional dalam kehidupan suatu negara (sosial-politik).

Uzbekistan adalah sebuah negara yang memiliki akar sejarah cukup panjang. Ia pernah menjadi bagian dari kekuasaan Alexander Yang Agung, pusat kerajaan Timurleng, serta pusat kekaisaran Yunani-Bachtria. Selain itu ia juga merupakan bagian dari wilayah Dinasti Abasyiah dan sempat menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pasca pendudukan kaum Arab inilah, sejarah mulai berubah. Tentara Rusia yang menyerbu kawasan Asia Tengah, yang kemudian dilanjutkan dengan Uni Soviet, menghapus tradisi serta corak asli kebudayaan masyarakat

---

<sup>35</sup> Miriam Budiarmo, *Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik*, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, AIPI, Jakarta, 1986, hal. 4

<sup>36</sup> The Liang Gie, *Op. Cit.*, hal. 79

setempat dari yang tadinya penuh dengan nuansa Islam, menjadi nasion Soviet yang sekuler berhaluan Eropa dan Rusia. Sejarah mencatat bahwasanya pendudukan Uni Soviet telah mampu mengubah sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat Uzbekistan. Penerapan ideologi komunis di wilayah ini ternyata tidak mampu menjawab persoalan-persoalan dalam negeri yang makin lama semakin membawa negeri ini kedalam jurang perpecahan. Bahkan pasca runtuhnya Soviet pun, mantan negara-negara satelitnya masih berada dalam suasana pergolakan, baik itu serangan dari kelompok-kelompok radikal maupun permasalahan ekonomi yang pada dasarnya masih tetap bergantung dan menggunakan sistem sentralisasi seperti periode sebelumnya.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM UZBEKISTAN

#### KETIKA BERGABUNG DENGAN UNI SOVIET

Periode ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang sejarah pemerintahan komunis di Uzbekistan. Era pendudukan Tsar yang kemudian dilanjutkan dengan revolusi Oktober oleh kaum Bolshevik, secara tidak langsung telah memprakarsai terbentuknya negara sosialis Uzbekistan dalam konfigurasi Uni Soviet. Bersamaan dengan itu pula, identitas masyarakat Uzbekistan mengalami perubahan, yaitu dari warna Islam menjadi nuansa Soviet yang penuh dengan tradisi Rusia dan Eropa. Perubahan yang signifikan terjadi juga pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan di Uzbekistan.

#### II.1. Proses Terbentuknya Negara Uzbekistan

Apabila kita berbicara tentang sejarah berdirinya negara Uzbekistan, maka kita tidak mungkin bisa lepas dari sejarah kawasan Asia Tengah. Kawasan ini, sejak dulu dikenal sebagai jalur utama lintasan para kafilah yang akan menuju ke Asia dari Eropa, ataupun sebaliknya. Rute perdagangan ini kemudian terkenal sebagai *The Ancient Great Silk Road* (jalur sutra kuno).

Kawasan Asia Tengah adalah kawasan yang kaya akan sejarah. Demikian menurut prediksi para sejarawan. Penemuan-penemuan arkeologis menunjukkan bahwa proses penghunian daerah Asia Tengah telah berlangsung sejak jaman batu, dan bukti-bukti informasi kuno tentang nasionalisme bangsa Asia Tengah banyak



ditemukan dalam dokumentasi AVESTA, yaitu kode lagu-lagu suci bagi penganut Zoroastranisme. Banyak pengamat berpendapat bahwa Asia Tengah merupakan tanah asli dari pemeluk aliran Zoroaster ini.

Menurut sumber dari Persia, sejak abad ke-6 SM hingga abad ke-4 SM sebagian besar tanah Uzbek dihuni oleh suku bangsa Soghdia, Bactria, dan suku-suku lain.<sup>1</sup> Mereka dipemerintah oleh dinasti Persia Akhemenids. Sedangkan penulis-penulis yang berkebangsaan Yunani menyebutkan bahwa pada waktu itu sudah didirikan kota Marakanda (sekarang Samarkand) dan Kiropol di Ferghana.

Sejak dulu, kesuburan tanah Uzbekistan selalu menarik perhatian penakluk-penakluk dari luar. Pada awal abad ke-3 SM, Uzbekistan beserta negara-negara lain di kawasan Asia Tengah ditaklukkan oleh prajurit-prajurit Macedonia dibawah pimpinan **The Great Alexander**<sup>2</sup>. Penaklukan ini, nantinya akan memberikan perubahan cukup besar pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Era pemerintahan Alexander ini sekaligus menandai awal dimulainya pembangunan di kawasan Asia Tengah dan bahkan pada beberapa periode sesudahnya, Asia Tengah telah mengalami jaman keemasan di bidang arsitektur dan kesenian, baik itu berupa

<sup>1</sup> Selain bangsa Turki, orang-orang Persia juga sudah sejak lama menghuni kawasan Asia Tengah. Sebagian besar dari mereka tinggal di Tajikistan. Lihat Zamira Eshanova, "*History of Uzbekistan*" dalam <http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/easv080601.shtml>

<sup>2</sup> The Great Alexander, atau Alexander III, atau Iskandar yang Agung, atau Iskandar Zulkarnain. Lahir di Pella pada 365 SM, putra Philip II, Raja Macedonia, dengan Olympias, istrinya, putri bangsawan dari Mollosia. Kisahnya terdapat dalam Al-Qur'an, surat 18: 83 dan seterusnya. Dalam literatur disebut-sebut sebagai orang yang telah berjasa menyatukan Timur dan Barat. Dikenal pula sebagai pendiri kota Iskandariyah (Alexandria) di Mesir, sekaligus pencetus filsafat Hellenisme, yaitu perpaduan antara filsafat murni Yunani (*Hellenic*) dengan agama dan mistik Timur. Lebih jelasnya lihat dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 1992, hal.443



lukisan, kerajinan tangan, maupun musik. Pada pertengahan abad ke-3 SM, daerah-daerah yang ditaklukkan tersebut berhasil memerdekakan diri, dan dinasti-dinasti lokal pun kemudian ganti berkuasa. Muncullah kemudian Kekaisaran Yunani-Bactria yang diperintah oleh suku bangsa Bactria dengan pusat ibu kota di selatan Uzbekistan dan Tajikistan. Lalu pada periode selanjutnya, tampuk pemerintahan dipegang oleh Kekaisaran Kushan.

Pada abad ke-7 hingga 8 Masehi, Asia Tengah ditaklukkan dan dikuasai oleh Khalifah Arab. Seiring dengan itu pula, agama Islam mulai merambah negeri Transoksania ini. Dan meskipun Islam belum dianut secara meluas sampai abad ke-14, namun orang-orang Uzbekistan telah menjadi sokoguru lembaga-lembaga kebudayaan Islam. Pada pertengahan abad ke-8, konstruksi bangunan, seni, dan ilmu pengetahuan sempat mengalami kemunduran akibat tekanan perang. Penciptaan peraturan-peraturan baru oleh kaisar dari dinasti bangsawan lokal, yaitu Tahirid dan Samanid pada periode sesudah itu membuat orang-orang Arab dipaksa untuk menarik diri dari wilayah ini. Dinasti Samanid kemudian menduduki singgasana.

Ismail Samani, pendiri Dinasti Samanid, memilih Bukhara sebagai ibu kota negara. Era pemerintahannya ditandai dengan penciptaan struktur budaya yang khas dan unik, yaitu masjid yang beratapkan kubah. Abad ke-9, 10, dan 11 M adalah jaman keemasan pusat kota-kota kuno seperti Bukhara, Samarkhand, dan Termez. Contoh lain yang paling menarik dari arsitektur abad ke-10 adalah makam Ismail Samani di Bukhara. Bangunan itu dipercaya sebagai salah satu dari monumen-



monumen besar dunia Islam yang dibangun pada abad ke-9. Menara K-alon di Bukhara adalah karya besar lain dari periode ini.

Pada tahun 1220-1221, Asia Tengah tidak dapat bertahan dari invasi pasukan Tartar (Mongol) dibawah pimpinan Jenghis Khan.<sup>3</sup> Sebagai seorang pemimpin, Jenghis Khan, yang mempunyai nama asli Bitujin, adalah seorang politikus ulung, cerdas, pemberani, dermawan, pandai mengatur kerajaan dan rakyatnya, sekaligus panglima perang yang tak pernah menyerah kepada ujian dan kesulitan apapun. Gaya perangnya penuh kekejaman dan horor. Dalam berperang ia mengikutsertakan tawanan perangnya yang ia letakkan didepan pasukan sebagai pagar hidup.<sup>4</sup> Maka tak heran bila ribuan orang tewas (di Samarkand sendiri, hanya 50.000 dari 1 juta orang yang masih hidup) dan banyak kota di Uzbekistan seperti Bukhara dan Khorezm dirusak.

Pendudukan Mongol setelah Arab, sebagaimana disebutkan oleh Karen Armstrong, merupakan gebrakan politis terbesar di Timur Tengah. Mereka tercatat mampu mengendalikan dan mendisiplinkan kelompok nomadennya, serta mampu menjadikan mereka mesin perang dengan kekuatan menghancurkan yang tidak pernah ada sebelumnya di dunia. Penguasa manapun yang tidak segera menyerahkan diri pada para pemimpin Mongol bisa dipastikan akan menyaksikan kota - kota

---

<sup>3</sup> Tartar adalah komunitas suku yang tinggal di Asia Tengah diantara Danau Haikal dan Pegunungan Altani yang merupakan anak gunung yang berpusat diantara Rusia dan Cina. Dan Mongol adalah bagian dari bangsa Tartar. Lihat dalam Dr Muhammad Sayyid Al-Wakil, *Wajah Dunia Islam dari Dinasti Bani Umayyah hingga Imperialisme Modern*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998, hal. 233

<sup>4</sup>Ibid, hal. 235



pentingnya hancur dan penduduk mereka dibantai. Namun tidak seperti bangsa Arab sebelumnya, tentara Mongol datang tanpa membawa serta spiritualitas bersama mereka. Mereka tenggang rasa terhadap semua agama, walaupun mereka cenderung menganut agama Buddha.<sup>5</sup>

Pada awal abad ke-14, Uzbekistan menjadi pusat kerajaan Timur Lenk.<sup>6</sup> Penguasa kerajaan ini, yang dikenal sebagai penguasa dengan semangat nasionalisme yang tinggi di zamannya, adalah seorang keturunan Turki dari Lembah Syr yang dibesarkan di Chaghaytay Mongol, Samarkand. Raja dari dinasti Timur ini memerintah wilayahnya tidak kalah kejam daripada pendahulunya, Jenghis Khan. Walaupun terkenal sebagai penguasa yang lalim, ternyata ia juga giat dalam pembangunan. Ia menggabungkan kesenian dan ilmu pengetahuan serta banyak mendirikan gedung-gedung indah di Samarkand. Pada pertengahan abad ke-14, Timur Lenk diserang oleh suku pengembara Uzbek yang berdomisili di Utara. Suku nomaden ini kemudian menaklukkan negara-negara feodal kecil Timurid, lalu mendirikan negara sendiri yang selanjutnya dikenal dengan nama Uzbekistan. Kata Uzbek sendiri berarti *lord, khan, guru, atau tuan atas seseorang*. Setelah wilayah Uzbekistan terdefiniskan, 2 daerah besar segera dibangun (Bukhara dan Khiva). Isolasi terhadap negara pun segera berkurang, dan perdagangan serta hubungan

<sup>5</sup> Karen Armstrong, *ISLAM : Sejarah Singkat*, Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2002, hal. 136

<sup>6</sup> Tamerlane (Timur Lenk). Timur mendapatkan panggilan "*Lang*" (dalam bahasa Turki) yang berarti "pincang" (*Timur-l Lang*). Ia kemudian menjadi terkenal dalam literatur sebagai Timur Lenk, Tamerlane, atau Tamburlaine. Lebih jelasnya lihat dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Op. Cit., hal. 946



dengan negara lain perlahan-lahan membantu pembangunan ekonomi di wilayah ini. Kondisi perekonomian Asia Tengah di masa lalu berhutang pada kestabilan hubungannya dengan Cina, India, dan Eropa.

Semenjak ada ikatan serta kontrak-kontrak perdagangan antara negara-negara Asia Tengah dengan negara-negara lain, peradaban dunia tumbuh dan berkembang pesat lewat ilmu pengetahuan dan kerja-kerja spiritual yang ditandai dengan lahirnya pemikir-pemikir besar seperti Ibn Sina, Al-Biruni, At-Turmudzi, Farghani, Al-Farabi, Ulul Beg, Navoiy, Babur, Al-Khowarizmi, dan lain-lain.

Para arsitek Asia Tengah telah menyumbangkan kontribusi yang demikian besar bagi dunia kearsitekturan. Gaya arsitekturnya yang unik kemudian menyebar di seluruh kawasan dan mewarnai kota-kota besar kuno seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva, yang merupakan pusat ketrampilan desain dan seni terbaik di negeri ini. Seseorang dapat merasakan atmosfer kota-kota Asia Tengah di abad pertengahan dengan terpesona, termasuk tempat para kafilah, pusat-pusat perdagangan dan kerajinan tangan yang telah berusia berabad-abad.

Pada pertengahan abad ke-19, Bukhara, Khiva, dan Kokand bergabung dengan kekaisaran Rusia. Selama periode ini, bidang pertanian digalakkan secara besar-besaran dengan satu alasan, yaitu bahwa secara ekonomis, penanaman kapas di Asia Tengah merupakan pengganti impor Rusia terhadap Amerika. Sejak saat itulah kapas menjadi produk pertanian yang sangat penting dinegeri ini.

Ketika terjadi Revolusi Rusia dan perang saudara (1917-1923), lebih dari 500.000 penduduk Uzbek bermigrasi ke bagian utara Afghanistan. Pada tahun 1924



dibentuk Republik Soviet Sosialis Uzbek. Samarkand, kota pusat budaya klasik Islam, menjadi ibu kota republik itu. Pada tahun 1931, Tashkent yang sebelumnya menjadi pusat administrasi Propinsi Turkistan<sup>7</sup>, menjadi ibu kota negara menggantikan Samarkand.

Sejak menjadi bagian dari Uni Soviet, Uzbekistan, sebagaimana republik-republik lainnya, mengalami modernisasi, sekularisasi, kolektivisasi, dan industrialisasi. Semenjak itu pula, usaha untuk mengikis pengaruh penerapan hukum Islam dan lembaga-lembaga syariat lainnya, seperti perampasan (penyitaan) badan wakaf, dijalankan. Usaha itu diikuti dengan penutupan lembaga pendidikan *maktub* dan *madrasah*, serta masjid-masjid. Untuk mengelabui pandangan dunia luar terhadap pembasmian pengaruh Islam tersebut, pada tahun 1956 pemerintah Uni Soviet melakukan usaha yang kelihatannya mendukung atau setidaknya bersikap netral terhadap agama, dengan jalan membuka sekolah-sekolah latihan bagi sejumlah kecil ulama-ulama Islam di Bukhara (*Madrasah Barak Khan*) dan di Tashkent (*Madrasah Mir-i Arab*).

Meskipun kebijaksanaan pemerintah Moskwa atas Uzbekistan seperti yang tersebut diatas berlangsung lama, namun pengaruh Islam diwilayah itu tidak dapat dikikis begitu saja. *Glasnost* (keterbukaan) dan *perestroika* (restrukturisasi) yang

---

<sup>7</sup> Dalam sejarahnya, Turkistan merupakan sebuah negeri Islam yang menyatukan beberapa suku, seperti Uzbek, Tajik, Kyrgys, Turkmen, dan Kazakh. Sudah sejak lama Turkistan terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Barat dan Timur. Turkistan Barat kini adalah 5 republik berdasarkan kesukuan yang pernah tergabung dalam imperium Uni Soviet. Sedangkan Turkistan Timur yang mayoritas terdiri atas suku Kazakh, kini menjadi wilayah propinsi Sin Kiang dalam kekuasaan Cina. Dalam bahasa Cina, Sin Kiang berarti Negeri Baru. Turkistan pada jaman keemasannya dikenal sebagai Andalusia yang kedua. Lihat dalam Dr. Najib Kaelani, *Komunis Sang Imperialis*, Media Insani, Yogyakarta, 2001, hal. vi-vii.



dilakukan oleh Mikhail Gorbachev, menunjukkan bahwa rakyat Uzbekistan masih tetap merasa sebagai orang Islam. Pada tanggal 14 Agustus 1991, Uzbekistan dan lima republik Islam Soviet (empat di Asia Tengah dan satu di Kaukasus) bersepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi diantara mereka.

Menyusul kudeta yang gagal terhadap Mikhail Gorbachev, sebagaimana republik-republik muslim lainnya, Uzbekistan menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1991. Segera setelah pernyataan kemerdekaan tersebut, negara Pakistan membuka kantor perwakilan dan jalur penerbangan langsung ke Tashkent.

Perkembangan yang menghancurkan komunisme dan mengakhiri negara Uni Soviet tersebut tidaklah lalu berarti usaha Uzbekistan untuk melepaskan diri dari konservatisme menjadi mulus. Upaya untuk memanfaatkan perubahan-perubahan yang cepat terjadi setelah bubarnya Soviet masih harus menguji Uzbekistan untuk menyambunginya dengan akar keislaman, yang telah lama terbenam pada masa pemerintahan komunis. Pada akhir tahun 1991, republik Uzbekistan ikut bergabung dengan CIS (*Commonwealth of Independent States*) yang dibentuk oleh tiga negara raksasa (Rusia, Ukraina, dan Kazakhstan) yang mendominasi 70 % penduduk bekas Uni Soviet.

## **II.2. Bergabungnya Uzbekistan Kedalam Konfigurasi Uni Soviet**

Sejarah mencatat bahwa pemerintah Soviet, lewat pasukan garda merahnya, telah melakukan ekspansi ke kawasan Asia Tengah sejak tahun 1918, dan semenjak hegemoni Moskwa merambah negeri Transoksania ini, perubahan-perubahan besar dan mendasar segera dilakukan. Serangkaian kebijakan disusun untuk memodernisasi



sekaligus mensovietisasi wilayah penghasil minyak dan gas bumi terbesar di dunia setelah Timur Tengah tersebut. Sebagai langkah awal, pemerintah menerapkan kebijakan "*National Delimitation*"<sup>8</sup> atau pembatasan nasional, yaitu pembentukan negara dengan menggunakan garis linguistik sebagai batas teritorialnya.

Setiap suku bangsa Asia Tengah, yaitu Kazakh, Tajik, Uzbek, Kyrgys, dan Turkmen, menggunakan bahasa yang berbeda, meskipun nenek moyang mereka sama-sama berasal dari Turki dan hampir semua penduduknya menganut agama Islam beraliran Sunni.<sup>9</sup> Perbedaan bahasa inilah yang kemudian dijadikan landasan operasional bagi pemerintah Moskwa untuk memberlakukan kebijakan *national delimitation*. Dengan demikian, batas teritorial setiap negara secara jelas telah terdefiniskan. Pembeneran filosofis atas argumen ini didukung pula oleh sebuah tesis yang menyatakan bahwa bahasa mendefinisikan sebuah bangsa.<sup>10</sup> Berdasarkan teori Marxis-Stalinist-dan Leninist, semenjak adanya evolusi dari suku menjadi bangsa, maka hal tersebut merupakan bagian dari sebuah proses pembangunan dimana pembentukan negara-bangsa adalah prasyarat dari modernisasi.<sup>11</sup> Kebijakan pembatasan nasional ini bisa dikatakan berhasil, karena selama proses tersebut

<sup>8</sup> Shirin Akiner, *Conflict, Stability, and Development in Central Asia* dalam *Between Development and Destruction : An Enquiry Into The Causes of Conflict in Post Colonial States*, Mac Millan Press, London, 1996, hal. 258

<sup>9</sup> Ibid, hal. 257

<sup>10</sup> Pada mulanya, tesis ini berasal dari pemikiran orang-orang Barat. Masyarakat Asia Tengah sendiri menganggap bahwa bahasa bukanlah sesuatu hal yang signifikan untuk membentuk identitas sebuah suku bangsa, karena perbedaan itu dianggap sebagai hal yang wajar. Lihat A.D Smith, *The Ethnic Revival*, Cambridge University Press, dalam Ibid, hal. 258

<sup>11</sup> I. Stalin, *Marksisn I Natsionel'nyj Vopros* ( OGIZ, 1939 ), hal 267 - 270 dalam Shirin Akiner, Op. Cit, hal. 268

berjalan, tidak ada gerakan perlawanan apapun yang menentanginya, bahkan dari kelompok keturunan Turki sendiri yang merupakan mayoritas penduduk Asia Tengah. Sejak itu pula, secara resmi berdirilah 5 republik baru yang langsung masuk dalam lingkaran Republik Sosialis Uni Soviet. Mereka adalah Republik Soviet Sosialis (RSS) Kazakhstan, RSS Uzbekistan, RSS Tajikistan, RSS Kyrgystan, dan RSS Turkmenistan. Dari batas-batas baru tersebut kemudian dibentuklah sebuah kerangka fisik baru masyarakat tradisional yang didekonstruksi dan dicetak ulang menjadi nasion Soviet.<sup>12</sup>

### **II.3. Implementasi Kebijakan Rusifikasi dan Sovietisasi di Uzbekistan**

#### **II.3.1. Bidang Ekonomi**

Setelah 5 Republik Soviet Sosialis di Asia Tengah dan batas teritorialnya terbentuk, maka langkah pemerintah Soviet selanjutnya adalah menerapkan kebijakan Rusifikasi dan Sovietisasi di seluruh kawasan tersebut. Dalam hal ini, bidang ekonomi mendapatkan perhatian utama karena ia dianggap sebagai sendi dasar kehidupan masyarakat. Ketika menjalankan roda kegiatan perekonomian nasionalnya, pemerintah Soviet menggunakan sistem ekonomi sosialis sebagai *rule of the game* dari seluruh aktivitas perekonomian negara. Perekonomian Soviet merupakan suatu sistem gabungan yang utuh dan menyeluruh, yang didasarkan atas spesialisasi, pembagian kerja, dan perdagangan internal antar republik di kawasan Uni Soviet sendiri.

---

<sup>12</sup> Loc. Cit



Sistem ekonomi sosialis yang dianut Soviet mengutamakan rasa kebersamaan atau kolektivisme. Peran pemerintah dalam pembangunan sangat kuat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pada tahap perencanaan saja misalnya, program kerja dibuat secara menyeluruh, mulai dari tingkat wilayah sampai nasional, dimana setiap tahunnya seluruh rangkaian tersebut dievaluasi serta disempurnakan. Perencanaan ini mencakup tentang penentuan sasaran produksi dan sumber daya bagi setiap sektor ekonomi. Kebutuhan akan sumber daya dan segala sesuatu yang berkaitan didalamnya diatur secara berimbang berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Semua keputusan penting mengenai produksi dan distribusi dibuat oleh sebuah badan khusus, yaitu Komisi Perencanaan Pusat yang berkedudukan di Moskow.<sup>13</sup>

Berbeda dengan sistem liberal dimana semua tindakan didasarkan pada rasio dan akal, dimana atas dasar prinsip ini pula, semua orang diasumsikan akan mengambil alternatif terbaik bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam sistem sosialis, tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi. Bagi para pakar sosialis, setiap orang mungkin bisa mengurus dirinya sendiri. Akan tetapi, untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat luas adalah wewenang pemerintah yang disusun, diatur, dilaksanakan, dan dikontrol oleh partai, yaitu Partai Komunis.

Di Uni Soviet, negara dengan luas wilayah terbesar didunia ini, terdapat 2 macam milik umum. Yaitu milik negara (milik seluruh rakyat) dan milik koperasi

<sup>13</sup> Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 33

atau kolkhos. Segala tanah dan kekayaan alam, hutan, air, transportasi air dan udara, alat komunikasi yaitu pos, telepon, telegraf, semua perusahaan, pabrik, tambang, bank, stasiun, listrik, perusahaan dagang, lembaga ilmu pengetahuan dan kebudayaan, perusahaan pelayanan sehari-hari, semua hasil produksi dari semua perusahaan industri dimiliki oleh seluruh rakyat yang diurus oleh negara Soviet.

Sedangkan yang dimaksud dengan kolkhos, adalah sebuah perusahaan pertanian kolektif yang didirikan oleh kaum tani. Tanah, yang pada awalnya direbut secara paksa oleh negara, kemudian diberikan secara cuma-cuma untuk digunakan seterusnya oleh rakyat tanpa batas waktu yang ditentukan. Negara juga menyediakan mesin-mesin yang mutakhir bagi perusahaan pertanian tersebut. Begitu pula halnya dengan bahan-bahan kimia serta kredit-kredit dari bank, bila memang diperlukan. Semuanya disediakan oleh negara. Negara adalah pembeli utama hasil-hasil produksi pertanian, sekaligus menjamin adanya tempat pemasaran bagi produk-produk hasil pertanian tersebut.

Sistem kolkhos ini berlaku diseluruh republik Soviet, termasuk didalamnya Uzbekistan. Sebagian tanah Uzbekistan yang subur, karena terletak diantara 2 sungai yaitu Amu-darya dan Syr-darya, mendorong maju dan pesatnya bidang pertanian. Kapas, anggur, buah-buahan serta sayur-sayuran adalah hasil panen utama Uzbekistan yang sejak awal telah diijonkan pada Moskow. Moskowlah yang kemudian mengatur perputaran barang dan jasa di seluruh republik dan memegang kendali semua sektor kehidupan.



### II.3.2. Bidang Sosial

Ketika rezim Soviet memegang kendali pemerintahan, masalah sosial pun tak luput dari sasaran pengaturan. Dalam upaya membentuk nasion Soviet dikalangan bangsa-bangsa Asia Tengah, pemerintah menghilangkan tradisi dan menghapus corak asli kebudayaan setempat dengan menjalankan program transmigrasi antar suku ke berbagai republik di lingkungan Uni Soviet. Usaha ini dimaksudkan oleh pemerintah Soviet adalah untuk mencairkan perasaan kedaerahan di setiap negara federasi. Pemerintah juga memberikan jaminan bagi para transmigran ditempat yang baru, seperti pekerjaan, gaji, tempat tinggal, serta kehidupan yang lebih baik daripada rakyat setempat.<sup>14</sup>

Namun kenyataannya tidak semua orang ingin ditransmigrasikan, meskipun ada imbalan yang cukup besar. Kebanyakan transmigran yang dikirim ke berbagai penjuru adalah tahanan politik dengan latar belakang pendidikan tinggi<sup>15</sup> yang dituduh melakukan tindakan subversif terhadap pemerintah yang sah. Mereka ditransmigrasikan sebagai narapidana buangan. Kedatangan para transmigran ditanah perantauan ini dicurigai penduduk setempat, sehingga benih perpecahan pun tak dapat dihindarkan. Kurangnya sosialisasi dan sikap yang eksklusif para pendatang itu turut pula mewarnai garis-garis permusuhan diantara mereka yang semakin lama semakin tajam. Apabila pada awalnya konflik bermula dari perbedaan kultur, maka yang terjadi selanjutnya adalah lebih mengarah pada alasan-alasan politis.

<sup>14</sup> KOMPAS, 12 Maret 1993

<sup>15</sup> Prof. DR. A. Z. Abidin, S.H., *Bahaya Komunisme*, CV. Bulan Bintang, Jakarta, 1982, hal. 164

Ketika kehadiran orang-orang asing dalam sebuah komunitas suku bangsa dirasa sangat meresahkan, maka secara otomatis mereka akan mulai dimusuhi dan dikucilkan. Demikianlah yang kemudian dialami oleh 25 juta orang keturunan Rusia yang hidup diluar Republik Rusia. Mereka dimusuhi secara terang-terangan oleh penduduk lokal, dan nasibnya menjadi serba tidak menentu lagi setelah Uni Soviet secara resmi sudah bubar.<sup>16</sup> Sebagian memilih untuk kembali ke Rusia, dan lainnya lebih senang tetap tinggal di republik yang sebelumnya telah mereka tempati.

Kondisi sosial lain yang perlu dicermati disini adalah masalah keagamaan, dimana didalamnya kita juga akan menemukan teori dan fakta yang sangat bertolak belakang. Di negara penganut paham sosialis terbesar di dunia ini, agama dipisahkan dari negara dan sekolah dipisahkan dari agama. Negara tidak campur tangan dalam urusan intern agama. Undang-Undang Dasar Soviet tidak menghalangi warganegaraanya untuk menganut agama apapun, dan menjamin kebebasan untuk menjalankan adat istiadat maupun agama manapun juga. Penduduk yang menganut suatu agama tidak akan memperoleh pemotongan hak-haknya sebagai warganegara. Mereka tetap mempunyai hak pilih yang sama seperti layaknya warganegara lain. Merkapun dapat bekerja dalam instansi-instansi pemerintah manapun. Mereka juga dapat ikut serta secara aktif dalam kehidupan sosial didalam negeri, dan diberikan hak yang sama dihadapan hukum. Mereka wajib taat pada undang-undang, harus mengikuti dinas militer, dan lain sebagainya. Instansi-instansi pemerintah

---

<sup>16</sup> KOMPAS, 15 Maret 1993



bahkan tidak mencantumkan perihal agama yang dianut oleh para pegawainya. Begitu pula dalam paspor, kartu tanda penduduk, akta nikah, akta kelahiran maupun kematian, serta dokumen-dokumen penting lainnya.

Pada awal tahun 1980-an, diwilayah Soviet terdapat lebih dari 5 agama yang dianut oleh rakyatnya. Mereka adalah pemeluk agama Ortodoks Rusia, Katolik Roma, agama Luther, agama Armenia Gregorian, agama Reformatoris, agama Metodis, agama Islam, agama Yudea, gabungan penganut agama Kristen-Baptis, gabungan penganut agama Adventis Hari ke-7, serta gabungan dari sekte-sekte agama yang lebih kecil lainnya. Tidak ada agama yang dominan di Uni Soviet.

Secara teori, semua aturan diatas memang benar. Namun dalam prakteknya, sungguh diluar dugaan. Di Uzbekistan sendiri saja misalnya. Agama Islam, yang telah mewarnai segala sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat Uzbek selama berabad-abad, dieliminasi secara besar-besaran. Kepercayaan dan pelaksanaan kegiatan peribadatan dimusnahkan. Sekolah-sekolah serta kursus-kursus yang berbau keislaman ditutup. Pengadilan yang menggunakan hukum Islam dilarang. Pajak keagamaan (zakat) dihapuskan. Sumbangan (amal) apapun bentuknya, disita oleh negara. Hampir semua masjid ditutup. Huruf Arab diganti dengan huruf Latin. Bahasa Rusia dijadikan sebagai bahasa resmi negara, serta ditetapkan sebagai lingua franca.<sup>17</sup> Disamping usaha pemerintah Soviet yang terus-menerus mengeliminasi Islam tersebut, pemerintah juga melakukan pembaharuan yang sangat signifikan.

---

<sup>17</sup> Shirin Akiner, Op. Cit, hal 258

Diantaranya yaitu dengan menerapkan program pemberantasan buta huruf bagi semua warga negara. Berbagai sekolah dasar, menengah sampai atas didirikan di setiap republik. Setiap tahunnya, kurikulum lembaga-lembaga pendidikan itu terus diperbaiki dan disempurnakan. Anak-anak mulai memasuki sekolah pada usia 7 tahun, dan mereka diwajibkan menuntut ilmu minimal selama 10 tahun. Apabila dulunya sekolah hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, maka sekarang anak-anak perempuan pun diberi kesempatan yang sama. Tidak ada pembatasan apapun yang dapat menghalangi seorang anak untuk pergi ke sekolah.

Kesempatan yang sama juga diberikan oleh pemerintah pada kaum perempuan dalam segala lapangan kehidupan dan kegiatan. Mereka bebas berkarir diluar rumah. Pemerintah telah menjamin upah yang sama bagi laki-laki dan perempuan yang bekerja disektor yang sama pula. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Penerangan Kedutaan USSR di Indonesia yang diterbitkan tahun 1970 disebutkan bahwa dari seluruh warga negara Soviet,  $\frac{3}{4}$  dari semua dokter,  $\frac{2}{3}$  dari semua guru, lebih dari separuh ahli ekonomi, hampir separuh dari ahli agronomi, ahli peternakan, dan ahli-ahli pertanian lainnya adalah kaum perempuan. Keahlian insinyur, yang pada awalnya hanya dipandang sebagai milik laki-laki saja, kini mencapai lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian yang berjenis kelamin perempuan dari jumlah insinyur di Uni Soviet. Dibidang antariksa, penerbangan mengagumkan yang dilakukan dalam pada Juni 1963 keruang angkasa oleh astronot perempuan pertama didunia, Valentina Teresykova, merupakan salah satu bukti nyata dari penerapan hak yang sama rata terhadap kaum perempuan di Uni Soviet saat itu.



Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Soviet terus melakukan upaya-upaya pembangunan dengan jalan memberikan fasilitas pendidikan tinggi bagi setiap republik, yaitu sebuah universitas, beberapa politeknik, dan sekolah-sekolah kejuruan. Di Uzbekistan juga dibangun sebuah akademi ilmu pengetahuan nasional, beberapa institut penelitian, termasuk didalamnya yang mempelajari ilmu murni dan terapan, serta sudah diakui oleh standar internasional.

Berbagai institusi dan peraturan baru diperkenalkan oleh pemerintah Soviet, dan hal tersebut langsung diadaptasi oleh penduduk lokal. Pemerintah juga melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan model Soviet, dimana jalan-jalan yang luas dan apartemen-apartemen berblok-blok dibangun, yang menandakan bahwa era baru telah datang. Tari balet dengan gaya barat, opera, dan berbagai macam permainan yang mencerminkan nuansa Soviet disebarluaskan menggantikan kesenian tradisional daerah. Lukisan-lukisan dan seni pahat maupun ukir yang menggunakan obyek bernyawa, yang sebelumnya dilarang, diperbolehkan berkembang karena hal tersebut dianggap sebagai seni estetika baru. Rusifikasi dan Sovietisasi benar-benar diterapkan diseluruh republik Soviet, tidak terkecuali Uzbekistan. Setiap hal, dari yang paling besar sampai yang paling kecil dan rumit sekalipun, tidak lepas dari perubahan. Seperti nama jalan saja misalnya. Semua nama jalan dan gedung bangunan dirubah dengan nama pemimpin-pemimpin komunis Soviet. Masa kejayaan Alexander, Mongol (baik itu Jenghis Khan maupun Timurleng), serta pendudukan Arab di Asia Tengah mulai dilupakan.

### II.3.3. Bidang Politik

Ketika kita berbicara tentang kondisi politik Uzbekistan pada periode 1924-1991, berarti kita tak mungkin bisa lepas dari situasi politik Uni Soviet itu sendiri. Sama seperti halnya pada bidang ekonomi, kita juga akan banyak menemukan persamaan dalam bidang politik, dimana peran negara (pemerintah) sangat dominan. Semua struktur dan kebijakan republik sosialis diatur dan dikontrol pelaksanaannya oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Moskow. Sistem sentralisasi sangat kental sekali mewarnai seluruh aspek kehidupan berpolitik dan bernegara di republik-republik Soviet pada masa itu.

Uni Soviet merupakan sebuah negara federasi berhaluan sosialis-komunis yang terdiri atas 15 negara bagian, yaitu (1) Rusia, (2) Ukraina, (3) Belorusia, (4) Kazakhstan, (5) Georgia, (6) Uzbekistan, (7) Tajikistan, (8) Turkmenistan, (9) Azerbaijan, (10) Armenia, (11) Kyrgystan, (12) Latvia, (13) Estonia, (14) Lithuania, dan (15) Moldova. Masing-masing republik tersebut merupakan negara yang berdaulat penuh.

Dalam Undang-Undang Dasar USSR yang disahkan pada tanggal 5 Desember 1936 disebutkan bahwa kekuasaan negara seluruhnya ada di tangan rakyat.<sup>18</sup> Sedangkan negara Soviet Sosialis merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat. Rakyat menjalankan kekuasaan yang dimilikinya melalui wakil-wakil rakyat terpilih yang disebut Soviet Utusan Rakyat Pekerja (*Soviets of Working People's Deputies*).

<sup>18</sup> Untuk lebih jelasnya lihat dalam "Worldmark Encyclopedia of The Nations", Worldmark Press Ltd, New York, 1971, hal. 283



Semua badan kekuasaan pusat dan setempat dibentuk dengan jalan pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Kekuasaan pusat di Uni Soviet dijalankan oleh Soviet Tertinggi yang terdiri dari 2 majelis, yaitu Majelis Uni dan Majelis Bangsa-Bangsa. Majelis Uni mewakili kepentingan umum semua warganegara diseluruh republik, sedangkan Majelis Bangsa-Bangsa mewakili kepentingan warga negara sesuai dengan kepribadian nasional mereka. Kedua majelis dari Soviet Tertinggi ini mempunyai hak yang sama. Undang-Undang manapun akan dianggap sah hanya apabila sudah diterima dan disetujui baik oleh Majelis Uni maupun Majelis Bangsa-Bangsa. Semua republik berhak menempatkan wakil-wakilnya di Majelis Bangsa-Bangsa. Setiap Republik otonom diberikan jatah 11 orang utusan, sedangkan daerah-daerah otonom hanya 5 orang utusan dan tiap propinsi cukup 1 orang utusan saja.

Soviet Tertinggi merupakan badan legislatif yang punya kuasa penuh untuk membuat, merubah, dan mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar URSS. Soviet Tertinggi, yaitu Parlemen Soviet, berhak untuk menyusun pemerintahan negara Soviet yang terdiri atas Dewan Menteri URSS, Mahkamah Agung, serta Jaksa Agung.

Kekuasaan tertinggi di setiap republik dijalankan oleh presiden masing-masing republik sosialis yang bertanggungjawab kepada Presidium Soviet Tertinggi URSS, yang terdiri dari ketua, 15 wakil ketua (sesuai dengan jumlah republik yang ada), seorang sekretaris, dan 20 orang anggota. Dewan Presidium ini juga bertugas mengangkat dan menarik kembali duta-duta besar di setiap republik dan duta-duta



Uni Soviet di negara-negara lain, termasuk pula meratifikasi, ataupun membatalkan perjanjian-perjanjian internasional. Masing-masing republik di wilayah Soviet mempunyai Soviet Tertinggi sendiri, yang membuat dan merubah Undang-Undang Dasar Republik serta menctapkan undang-undang yang berlaku di wilayah suatu republik. Berbeda dari Soviet Tertinggi seluruh Uni Soviet, Soviet Tertinggi dari setiap republik hanya mempunyai satu Majelis saja. Soviet Tertinggi ditingkatan republik ini memilih Dewan Presidiumnya sendiri yang nantinya akan menjalankan kekuasaan pemerintah di sebuah republik.

Presiden terpilih di wilayah Republik Soviet Sosialis Uzbekistan pada waktu itu adalah Sharaf Rashidov, yang memimpin Uzbekistan sejak tahun 1953. Sedangkan Islam Abduganievich Karimov, baru memimpin Uzbekistan pada tahun 1989, ketika kekuasaan Soviet akan berakhir. Kedua tokoh penting ini, adalah aktivis golongan nomenklatura (elit) Partai Komunis Uzbekistan, yaitu anak cabang dari Partai Komunis Uni Soviet. PKUS sendiri merupakan satu-satunya partai politik resmi yang diakui oleh pemerintah Soviet, seperti yang tercantum dalam pasal 126 Konstitusi USSR yang menyebutkan bahwa Partai Komunis Uni Soviet adalah representasi dari seluruh organisasi rakyat pekerja, baik itu organisasi yang sifatnya *governmental* maupun *non-governmental*. PKUS adalah wadah dari seluruh aktivitas kenegaraan pemerintah Soviet, dimana semua rencana pembangunan nasional dan keputusan-keputusan pemerintah didiskusikan bersama dalam kongres partai.



### BAB III

## REPUBLIK UZBEKISTAN

### PASCA DISINTEGRASI UNI SOVIET

Periode ini merupakan gambaran era satu dekade pemerintahan Uzbekistan setelah resmi bebas dari cengkeraman Uni Soviet.<sup>1</sup> Dalam jangka waktu 10 tahun, pemerintah Uzbekistan yang dipimpin oleh Presiden Islam Karimov, telah berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan dengan melakukan reformasi diseluruh bidang kehidupan yang sempat mengalami stagnasi akibat program pembaharuan Gorbachev<sup>2</sup> yang ternyata tidak mampu menjawab situasi dan kondisi turbulensi republik-republik federasi sejak akhir pemerintahan Brezhnev.

#### III.1. Kondisi Politik

Sebagai negara Asia Tengah yang paling padat penduduknya<sup>3</sup> dan memiliki kekuatan militer terbesar,<sup>4</sup> Uzbekistan mempunyai peran strategis yang sangat penting di seluruh kawasan regional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

<sup>1</sup> Uzbekistan telah menyatakan kedaulatannya pada bulan Agustus 1990, namun deklarasi kemerdekaannya baru dinyatakan pada tanggal 31 Agustus 1991, tidak lama setelah peristiwa kudeta terhadap Gorbachev 19-20 Agustus 1991 terjadi. Lihat dalam Fadli Zon, *Gerakan Etnonasionalis Babarnya Imperium Uni Soviet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 11

<sup>2</sup> Program pembaharuan Gorbachev yang sangat terkenal yaitu *glasnost*, *perestroika*, dan *demokratisatzia* (secara sederhana diterjemahkan menjadi keterbukaan, restrukturisasi, dan demokratisasi) secara tidak langsung justru menyebabkan Uni Soviet runtuh dan akhirnya resmi dibubarkan pada bulan Desember 1991.

<sup>3</sup> Berdasarkan data UNDP, populasi Uzbekistan mencapai 24,5 juta. Ini adalah separuh dari jumlah total seluruh penduduk Asia Tengah. Lihat dalam UNDP Uzbekistan, *Uzbekistan : Human Development Report*, 2000 (Tashkent : Centre for Economic Research, 2000) atau <http://www.cer.uz/NHDR/2000/2000-e.htm>.

<sup>4</sup> Lebih jelasnya lihat dalam "Central Asia : Fault Lines in the New Security Map", ICG Asia report, No. 20, 4 Juli 2001 atau di <http://www.Crisisweb.com>





Karimov, dalam jargon-jargon kampanyenya berjanji akan selalu menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian, serta menjadikan Uzbekistan sebagai negara besar dan kuat yang mendominasi kawasan regional. Pernyataan Karimov ini didukung oleh pernyataan para pengamat dari Barat yang menilai bahwa status Uzbekistan sebagai sebuah negara yang kuat sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan itu<sup>5</sup>.

Banyak program yang direncanakan Presiden Islam Karimov untuk merombak sistem lama yang dibawa kaum sosialis sebelumnya. Perubahan itu antara lain meliputi upaya pengakuan atas hak asasi manusia, penegakan sistem demokrasi, kebebasan pers, serta penerapan sistem ekonomi pasar. Namun ternyata, relita kembali berbicara lain. John Schoeberlein, Direktur *HFCAS (Harvard Forum for Central Asian Studies and of The International Crisis Group's Central Asian Project)* menilai bahwa pembangunan di Uzbekistan, dalam waktu 10 tahun terakhir ini, lebih banyak mengarah pada otoritarianisme daripada demokrasi. Hal ini dapat dilihat pada penerapan sistem sentralisasi yang sangat kentara mewarnai segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam satu dasawarsa pasca proklamasi kemerdekaannya, Uzbekistan telah berhasil menyandang gelar sebagai salah satu negara yang paling otoriter dikawasan Asia Tengah.<sup>6</sup> Karimov juga terbukti kembali membawa Uzbekistan untuk masuk dalam pusaran sosialis-komunis

<sup>5</sup> Untuk lebih jelasnya lihat dalam "*Making Eurasia Stable*", *Foreign Affairs* Vol 74, No 1 1996, hal. 80-92 atau klik di <http://www.eurasianet.org>

<sup>6</sup> Lihat dalam "*Central Asia : Uzbekistan at 10- Repression and Instability*", ICG Asia Report, No.21, 21 Agustus 2001



dengan menjadi anggota CIS<sup>7</sup> (Commonwealth of Independent States) yang didirikan pada tanggal 8 Desember 1991. Inti dari kebijakan-kebijakan Karimov, sebenarnya hanyalah perpindahan kekuasaan otoriter dari tangan Moskwa ke Tashkent.<sup>8</sup> Demikian pendapat para pengamat dan pemerhati Barat terhadap kawasan Asia Tengah. Sistem serta struktur sosialis-komunis pada dasarnya belum punah. Baru namanya saja yang dirubah. Hal ini sudah terbukti pada episode awal pemerintahan Karimov dimana kaum komunis, yang memegang pemerintahan sejak Soviet berkuasa, tetap memegang tampuk kekuasaan hingga sekarang. Dan meskipun Uzbekistan mengadakan pemilu pada 29 Desember 1991, golongan nomenklatura (elite) Partai Komunis tetap memperoleh kemenangan sebab semua oposisi dilarang oleh pemerintah, kecuali satu partai kecil yang tidak berbobot. Bahkan Presiden Islam Karimov sendiri, menurut seorang aktivis Partai Pencerahan Islam (IRP-*Islamic Renaissance Party*) yang dinyatakan sebagai partai terlarang di Uzbekistan, adalah seorang mantan anggota Partai Komunis. Ia berkolaborasi dengan pengusaha dan menghembuskan ide demokratisasi sekedar untuk mempertahankan kekuasaannya.<sup>9</sup>

Pasca proklamasi kemerdekaan Uzbekistan, seperti halnya kebanyakan republik-republik Asia Tengah lainnya, para elit yang muncul dan mewarnai kancah

<sup>7</sup> CIS (Commonwealth of Independent States) atau Persemakmuran Negara-Negara Merdeka adalah sebuah organisasi pemerintah yang didirikan atas prakarsa Rusia, Ukraina, dan Belorusia pada tanggal 8 Desember 1991. Anggota CIS terdiri atas mantan negara-negara federasi yang pernah tergabung dalam URSS kecuali Latvia, Estonia, dan Lithuania.

<sup>8</sup> KOMPAS, 12 Maret 1993.

<sup>9</sup> KOMPAS, 9 April 1995.



percaturan politik dalam negeri sebagian besar adalah tokoh-tokoh elite lama yang kembali berkuasa dengan menggunakan nama baru.<sup>10</sup> Semuanya masih sama dan tidak ada yang berubah. Begitu pula dengan Presiden Islam Karimov. Beliau kembali menggunakan otonomi barunya untuk membangun kontrol penuh di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah juga berargumen bahwa kebijakan otoritarianisme adalah salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk membangun perekonomian dan menghindari kekacauan politik yang terjadi didalam negeri.

Kebijakan otoritarianisme ini diawali dengan pengeliminasian pihak oposisi dalam negeri yang dianggap membahayakan kekuasaan pemerintah yang sah. *Pressure* dari pemerintah ini menimbulkan permusuhan antara pemerintah dengan pihak oposisi yang dalam hal ini dimotori oleh IMU (Islamic Movement of Uzbekistan), yaitu sebuah organisasi Islam radikal. Bahkan menurut Tholib Yakubov, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Masyarakat Peduli HAM di Uzbekistan, Presiden Islam Karimov telah menciptakan sebuah "*huge machine*" untuk melawan para oposan. Mesin ini dapat menampung sekitar 40.000 orang polisi keamanan yang ditempatkan di Tashkent, serta merekrut sebanyak 2.500 orang informan baru pada setiap bulannya.<sup>11</sup> Di Uzbekistan, penjara dan pengasingan, hukuman tambahan (*extra detention*) bagi narapidana, penyalahgunaan HAM, maraknya tindakan-

<sup>10</sup> KOMPAS, 5 Oktober 2001

<sup>11</sup> Lihat dalam "*Uzbek Government Seen as Increasingly Repressive*", RFE/RI Press Release, 29 Mei 2001, atau klik di <http://www.rferl.org/welcome/english/releases/2001/03/30-300301.html>.



tindakan represif, telah menjadi suatu hal yang biasa dan dianggap wajar. Belum lagi budaya korupsi yang sudah berurat akar, pengebirian oposisi-oposisi politik dalam negeri, persoalan stagnasi ekonomi, dan populasi yang demikian tinggi, ditambah dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan, hal tersebut diatas merupakan faktor yang mempengaruhi tumbuh suburnya kalangan oposisi dikalangan elit Uzbek sekaligus menjadi faktor penghambat dalam membangun suatu budaya politik yang lebih demokratis.

Beberapa tahun belakangan ini, Uzbekistan sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Salah satu dari sekian banyak penyebab instabilitas itu adalah munculnya berbagai kekuatan yang saling berlomba dan bersaing untuk mendominasi panggung perpolitikan di dalam negeri. Kekuatan - kekuatan politik yang telah lama terpendam, yaitu sejak era pemerintahan Soviet, mulai muncul ke permukaan. Meskipun demikian, Uzbekistan berusaha menampakkan diri untuk tetap stabil dan bersikap monolitik.

### III.1.1. Munculnya Oposisi Sekuler-Demokratik

Diakhir tahun 1980-an, Gorbachev menjalankan program reformasi *glasnost*, *perestroika*, dan *democratisatzia* yang pada akhirnya mengakui eksistensi kelompok-kelompok oposisi. Meskipun reformasi ini pada awalnya sangat ditentang jika diterapkan di Uzbekistan dan di negara-negara Asia Tengah yang lain, namun kebijakan ini tetap diimplementasikan di seluruh wilayah Uni Soviet, tanpa terkecuali. Dengan adanya pemberian kebebasan berpolitik tersebut, maka kelompok-

kelompok oposisi yang selama ini kekuatannya terpendam mulai merambah kepermukaan.

Munculnya oposisi yang berhaluan sekuler-demokratik di Uzbekistan dipelopori oleh *Birlık Popular Movement* (Gerakan Kesatuan) yang berdiri tahun 1989 dan resmi diakui pemerintah. Program-program gerakan ini lebih banyak diwarnai oleh paham demokrasi dan nasionalisme, termasuk didalamnya pembaharuan bagi budaya Uzbek, demokrasi multipartai, serta independensi dari Moskow. Gerakan *Birlık* mengusung reformasi yang berbau liberal, menghormati kebebasan individu, menjadikan bahasa uzbek sebagai bahasa resmi negara, serta memfokuskan diri pada masalah-masalah ekologi dan kesehatan.<sup>12</sup>

Untuk mewujudkan sebuah otonomi penuh yang bebas dari Moskow, maka para politisi *Birlık* menganggap bahwa pemerintah seharusnya memperbolehkan rakyat bebas berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini merupakan respon dari kebijakan pemerintah yang memblokir partisipasi para tokoh gerakan *Birlık* dalam pemilihan anggota parlemen pada bulan Februari 1990, sekaligus menjadi titik awal perpecahan diantara anggota *Birlık* sendiri.

Pecahnya *Birlık* akhirnya memunculkan 2 kelompok besar, yang pertama tetap menggunakan nama *Birlık*, dan yang kedua menamakan diri sebagai *Erk* (kebebasan). Ketua Umum *Birlık* kemudian dijabat oleh Abdurrahim Polat, yaitu

---

<sup>12</sup> Gerakan *Birlık* ini segera menempati peringkat sepuluh besar dari ribuan gerakan oposisi lain yang serupa dan merupakan cikal bakal bagi terbentuknya Partai *Birlık* (Partai Kesatuan). Lebih jelasnya lihat dalam Zamira Eshanova, "Crackdown on the Opposition in Uzbekistan", <http://www.birlık.net/appeal/tobush.html>



seorang ilmuwan komputer yang mengepalai laboratorium Institut Penelitian Sibernetika (Cybernetics Research Institute) di Uzbekistan. Sedangkan gerakan *Erk* dipimpin oleh Muhammad Salih, seorang penulis dan penyair yang dikenal mempunyai nama samaran Salay Madaminov, sekaligus anggota inti dari gerakan *Birlik* itu sendiri.

Gerakan *Erk* (kebebasan) secara formal didirikan pada bulan April 1990. Ia merupakan cikal bakal dari Partai Demokrasi *Erk* yang diresmikan 5 September 1991. Dibawah kepemimpinan Salih, gerakan ini mendapatkan dukungan dari kaum intelektual. Ia berargumen bahwa gerakan pendahulunya (yaitu *Birlik*) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan visi dan misi *Erk* karena metode-metodenya yang terlalu radikal.<sup>13</sup>

Gerakan *Birlik* yang dikenal radikal, bahkan dapat dikatakan bermusuhan dengan pemerintah, tidak diijinkan menggunakan hak politiknya untuk menaikkan Abdurahim Polat sebagai kandidat presiden dalam tahap pencalonan pada pemilu tahun 1991. Sedangkan Muhammad Salih, diijinkan untuk ikut dalam pemilihan presiden karena ia adalah seorang anggota parlemen, lebih dari itu ia juga pendukung setia Karimov yang senantiasa menekan ide-ide progresif bagi liberalisasi ekonomi dan privatisasi dalam program gerakannya.

Ketegangan hubungan antara pemerintah yang berwenang dan kelompok-kelompok oposisi semakin memburuk ketika *Birlik* memperbesar kekuatan

<sup>13</sup> Muhammad Salih, "Secret and Deceptive Information in Uzbekistan", dalam <http://www.uzbekistanerk.org/s12en010603.htm>



perlawanannya dengan menggelar aksi protes dan demonstrasi besar-besaran yang mengkritik kebijakan presiden Uzbekistan terpilih yang baru, yaitu Presiden Islam Karimov, yang dinilai terlalu otoriter.<sup>14</sup> Aktivitas *Birlık* yang “berani” tersebut membuat partai ini kemudian disangkal status legalnya sebagai partai politik, meskipun pada bulan Januari 1992 ia telah berhasil mengumpulkan 3.500 buah tanda tangan (menurut aturan yang berlaku, jumlah itu merupakan standar minimal pembentukan sebuah partai).

Dengan dihapusnya nama *Birlık* dari daftar kepartaian, maka secara otomatis gerakan *Erk* yang pro-pemerintah itu akhirnya menjadi satu-satunya kelompok oposisi sekuler demokratik di Uzbekistan. Namun demikian, meskipun Partai *Erk* dikenal sangat loyal pada penguasa, pemerintah tetap menindasnya, bahkan makin lama semakin keras. Pemerintah menganggap bahwa segala bentuk oposisi, apapun bentuknya, sebagai sebuah gerakan perlawanan yang menentang kekuasaan yang sah. Surat kabar harian Partai *Erk* pernah menulis berita “suatu saat nanti, ketika pemerintah sudah tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaannya, ia akan mulai melakukan kampanye keluar negeri untuk memperoleh dukungan agar kelompok oposisi tak bisa bergerak lagi”. Karena berita ini, pemerintah kemudian mencabut ijin penerbitan dan memecat dewan redaksi serta memenjarakan pimpinan media massa

<sup>14</sup> Akibat dari peristiwa ini, Abdurahim Polat, yaitu pemimpin Partai *Birlık*, diserang dan dipukuli habis-habisan oleh orang-orang tak dikenal ketika ia dimintai keterangan di Kantor Kejaksaan. Demi keamanan dirinya ia lalu bermigrasi ke Turki, dan pada tahun 1998 kemudian pindah ke Amerika. Lihat dalam “*Birlık Againts President Islam Karimov's Ruthless Statements*”, dalam <http://www.birlık.net/appeal/baysap99.html>



tersebut. Pada bulan April 1993, Muhammad Salih, yaitu Ketua Partai *Erk*, ditangkap. Namun kemudian pemerintah membebaskannya kembali karena tekanan-tekanan internasional. Kepemimpinan Partai ini semakin melemah ketika tak lama kemudian Sekretaris Jendral Partai *Erk*, yaitu Atanazar Aripov, serta pimpinan redaksi harian *Erk*, Ibrahim Haqqul, dan beberapa anggota lain yang duduk dalam Komisi Eksekutif Partai *Erk*, turut ditangkap. Muhammad Salih sendiri, diasingkan ke Turki pada tahun 1993 dan kemudian pindah ke Norwegia tahun 1999.

Ditahun 1993, seluruh partai politik dan organisasi-organisasi non-pemerintah diharuskan untuk mendaftar ulang dimana pemerintah kemudian menghapus status *Birlık* dan *Erk* dari daftar kepartaian. Dan pada pertengahan tahun 1993, semua kelompok oposisi dinyatakan terlarang. Dalam rentang waktu 2 tahun, presiden Islam Karimov telah berhasil menindas, memecah belah, dan melarang eksistensi oposisi politik yang dianggap membahayakan kekuasaannya.<sup>15</sup>

Disamping mengeliminasi partai-partai oposisi, pemerintah juga menyerang independensi media. Seluruh publikasi *Birlık*, *Erk*, dan berbagai macam media informasi lainnya dilarang. Pemerintah juga melarang keras pengedaran koran-koran luar negeri dan mengurangi siaran transmisi TV Rusia yang menyiarkan berita tidak sesuai dengan posisi pemerintah Uzbekistan. Surat kabar Rusia yang memuat edisi tentang Uzbekistan pun harus diedit dulu untuk menghilangkan bagian-bagian yang dianggap merugikan sebelum dicetak dan didarkan. Pemerintah, lewat Komisi

---

<sup>15</sup> Lihat dalam Ilmira Hasanova, "Karimov Moves to Bolster Authoritarian Rule in Uzbekistan", <http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav120701.shtml>

Pengontrol Rahasia Negara (*Committee for the Control of State Secret*) juga melakukan pelarangan terhadap kebebasan pers dengan membentuk sebuah Lembaga sensor Negara.<sup>16</sup>

Pada tahun 1995, Karimov mengumumkan pembatalan pelaksanaan pemilihan presiden yang seharusnya jatuh pada tahun 1996. Dengan menggunakan sistem referendum seperti yang pernah dilakukan dimasa Soviet, Karimov memperpanjang jabatannya tanpa ada proses pemilu lagi hingga tahun 2000.<sup>17</sup>

Pada Tahun 1999, terjadi peristiwa pengeboman di Tashkent yang hampir saja melukai Presiden Karimov dan merusak sebuah gedung milik pemerintah. Beberapa jam setelah peledakan itu terjadi, pemerintah mengumumkan bahwa ia mengetahui siapa dalang dari peristiwa tersebut. Para pengamat menilai bahwa pengeboman itu diprakarsai oleh "orang-orang dalam" yang duduk dalam struktur kekuasaan meskipun pelakunya adalah orang-orang dari kelompok bawah tanah.

Teori "orang dalam" yang digulirkan ini dimaksudkan untuk menunjukkan pada pihak penguasa bahwa didalam tubuh pemerintah itu sendiri sebenarnya juga ada kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Karimov. Pengeboman yang dilakukan oleh pihak oposisi (ataupun orang dalam) ini, adalah sebuah wujud respon terhadap sikap pemerintah yang terus

---

<sup>16</sup> Pembentukan lembaga ini sebenarnya sangat bertentangan dengan Konstitusi Republik Uzbekistan, khususnya Bab XV Pasal 67 tentang media massa yang menyebutkan bahwa *ensorship is impermissible*.

<sup>17</sup> KOMPAS, 9 April 1995.



menindas pihak oposisi, baik itu oposisi Islam maupun oposisi sekuler-demokratik. Muhammad Salih, dituduh telah berkolaborasi dengan IMU untuk mengorganisir peledakan ini. Meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menunjukkan bukti-bukti keterlibatan Salih, namun ia tetap dijatuhi hukuman pengasingan selama 15 tahun. Bahkan 3 orang saudara laki-laki Salih pun ikut dipenjara dengan tuduhan anti-pemerintah dan bekerja sama dengan para "teroris".

Hukuman pengasingan Salih ini dimaksudkan pemerintah adalah untuk mendiskreditkan figur-figur oposisi sekuler demokratik dan mencegah timbulnya dukungan terhadap Salih, jika mereka diperbolehkan pulang kembali dari pengasingannya di luar negeri. Untuk alasan-alasan inilah pemerintah kemudian membentuk sebuah Dinas Keamanan Negara. Mereka bertugas mengeliminasi kelompok-kelompok oposisi secara fisik. Seorang penulis yang berada di pengasingan menyebutkan bahwa pemerintah berusaha keras untuk mengembalikan citra Salih sebagai seorang kriminal, melalui kampanye "anti-Salih". Dia juga menambahkan bahwa karena ketakutannya terhadap Salih, maka pemerintah mempressure Turki agar mengekstradisi pimpinan oposisi itu ke Uzbekistan. Turki kemudian ganti mempressure Salih agar secepatnya meninggalkan Turki, namun tidak mengekstradisikannya. Salihpun akhirnya memilih pindah ke Norwegia.

Pada tanggal 9 Januari 2000, Presiden Karimov kembali memenangkan 92 % suara dalam pemilu yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai sebuah kegagalan pemerintah dalam menerapkan dasar-dasar demokrasi. Pengertian negara demokrasi di Uzbekistan saat ini rasanya lebih tepat seperti apa yang diutarakan oleh profesor



Abdulhafidz Jalalov, seorang calon presiden "alternatif" tunggal dalam pemilu. Beliau, dengan sengaja memilih Karimov dalam proses pemilihan karena dia menginginkan stabilitas, perdamaian, kedaulatan bangsa dan negara, serta demi menjaga visi dan misi pembangunan di Uzbekistan.

Partai *Birlık* sendiri, saat ini telah memiliki sebuah Komisi Sentral, dengan beberapa anggotanya yang masih berada dipengasingan, dan sebagian yang lain ada didalam negeri. *Birlık* yang sekarang hanya mempunyai sedikit pengikut. Dan apabila mereka diberi kesempatan untuk berproses lebih lanjut, maka mereka tetap akan berdiri *vis-à-vis* dengan pemerintah Uzbek. *Birlık* menginginkan agar masyarakat internasional membuka mata dan mengetahui situasi serta kondisi politik yang terjadi sebenarnya di Uzbekistan. Selain itu ia juga ingin mendorong perkembangan organisasi-organisasi peduli HAM, serta berkampanye tentang ideologi, visi, misi, dan posisi partainya dikalangan *policy-maker* Barat sebagai usaha mempressure pemerintah Uzbekistan. *Birlık* mempunyai hubungan dekat dengan Amerika, dimana di Washington, didirikan Markas Besar Jaringan Informasi HAM se-Asia Tengah (*Central Asian Human Rights Information Network*) yang dipimpin oleh Abdumannob Polat, seorang aktivis sekaligus saudara dari Ketua Umum Partai *Birlık*, Abdurahim Polat. Banyak sekali aktivis-aktivis Partai *Birlık* lain yang kemudian menjadi pimpinan pada cabang-cabang HRSU (*Human Rights Society of Uzbekistan*) yang pusatnya ada di Tashkent. HRSU pusat dikepalai oleh Abdumannob Polat dan Sekretaris Jendral dijabat oleh Tolib Yakubov. Sebagai contoh, Muzafarmirza Ishakov, diangkat menjadi ketua HRSU cabang propinsi Andijan, dan Ahmad



Abdullaev, diangkat menjadi ketua HRSU cabang propinsi Namangan. Keduanya adalah aktivis *Birlik* yang sangat militan.

Hubungan antara *Birlik* dan *Erk*, sejak awal tahun 1990-an, yaitu ketika Muhammad Salih menjadi pimpinan *Erk* dan menyatakan keluar dari keanggotaan *Birlik*, penuh diwarnai dengan ketegangan-ketegangan. Keduanya saling menduga bahwa pihak yang lain telah membuat *deal-deal* dengan pemerintah Karimov. Ketegangan itu semakin berlanjut dengan munculnya persaingan-persaingan personal, tindakan-tindakan rekriminasi (tuduh-menuduh), saling tidak sepakat, dan perkelahian diantara masing-masing organisasi HAM yang ada di Uzbekistan (*HRSU* berafiliasi ke *Birlik* sedangkan *IHRSU* (*Independent Human Rights Society of Uzbekistan*) berafiliasi ke *Erk*. Hal ini justru dimanfaatkan pemerintah untuk memperlemah serta memecah belah oposisi-oposisi politiknya.

Dewasa ini, oposisi sekuler di Uzbekistan telah berhasil ditindas dan dipecah belah. Mereka tidak lagi menjadi ancaman serius bagi pemerintah. Masyarakat awam pun menganggap bahwa makna "demokrasi" itu sama saja dengan anarkhi. Keyakinan ini merupakan wujud keberhasilan pemerintah dalam menyebarkan opini publik bahwa memberikan kebebasan kepada kaum demokrat sama saja dengan menyulut terjadinya perang sipil seperti yang terjadi di Tajikistan dan kerusuhan sosial di Uzbekistan pada akhir tahun 1980-an. Gerakan oposisi itu sendiri ternyata juga gagal dalam membangun budaya politik yang koheren sehingga akhirnya gerakan ini lambat laun kehilangan loyalitas para pengikutnya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pada tahun-tahun pertama pasca proklamasi kemerdekaannya, Uzbekistan tengah dilanda euforia kedaulatan nasional dan era kebangkitan budaya tradisional. Sejak saat itu pula, masyarakat Uzbekistan lebih banyak disibukkan oleh masalah-masalah ekonomi dan membangun konstruksi sosial yang baru daripada memikirkan persoalan-persoalan politik. Kelompok-kelompok oposisi, yang berfungsi sebagai *balancer*, ditindas dan dieliminasi kekuatannya oleh pemerintah. Para pelajar, sarjana, dan kalangan intelektual, yang tergabung dalam kelompok oposisi tersebut, mengalami penyiksaan, pemenjaraan, serta pengasingan.

Beberapa tahun belakangan ini, seiring dengan makin kuatnya otoritarianisme yang diterapkan pemerintah Karimov, masyarakat semakin bertambah radikal. Masyarakat desa yang semula menjadi pendukung loyal Karimov, sekarang malah mendukung gagasan / ide-ide keislaman daripada hal-hal yang berbau demokratik. Ketika pemerintah menganggap bahwa dirinya telah berhasil menumpas gerakan-gerakan oposisi sekuler demokratik, secara tidak langsung ia juga turut menyuburkan kelompok-kelompok garis keras yang nantinya akan membahayakan rezimnya sendiri.



### III.1.2. Munculnya Oposisi Islam

Hampir 90 % penduduk Uzbekistan adalah muslim sunni<sup>18</sup> yang mengikuti mazhab Hanafi dalam Islam. Dengan bergulirnya *glasnost* yang kemudian disertai era kemerdekaan, maka kaum muslimin tersebut berharap bahwa mereka akan dapat lebih bebas dan terbuka dalam mengimplementasikan keyakinan mereka. Dan periode 1989-1991 merupakan saksi sejarah atas membanjirnya antusiasme rakyat Uzbekistan terhadap revivalisme Islam. Selama periode yang pendek ini, misionaris-misionaris asing mendapatkan akses yang mudah ke negeri ini untuk menyebarluaskan visi mereka tentang kebangkitan kehidupan beragama, dan masjid-masjid baru serta sekolah-sekolah keagamaan muncul dimana-mana dengan bantuan luar negeri dan donatur-donatur asing.

Para generasi muda muslim pergi ke luar negeri untuk belajar tentang Islam, dan Yayasan Islam Internasional mengirimkan banyak sekali literatur-literatur keagamaan. Namun kebebasan beragama ini juga ditafsirkan berbeda oleh masing-masing individu muslim di Uzbekistan. Beberapa diantaranya melanjutkan pendekatan sekuler yang menghilangkan Islam dari elemen budaya dalam sebuah

---

<sup>18</sup> Sunni adalah salah satu mazhab atau golongan (*firqoh*) dalam Islam yang mempunyai pengikut paling banyak dibanding dengan mazhab-mazhab lain. Paham Sunni berdasar pada sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW, disamping Al-Qur'an. Kelompok ini biasa juga disebut "Ahlussunnah Waljamaah". Ahlussunnah berarti "orang-orang yang menganut atau mengikuti sunnah", dan wajamaah berarti "mayoritas ummat". Yang dimaksud "mayoritas ummat" dikalangan Sunni adalah "mayoritas sahabat Nabi SAW". Dengan demikian istilah ahlussunnah wajamaah mengandung arti "orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan mayoritas sahabat, baik didalam syariat (hukum agama Islam) maupun akidah (kepercayaan)". Mazhab Sunni mempunyai banyak aliran dibidang fiqh, namun yang paling besar, terkenal, dan bertahan kuat sampai sekarang dengan pengikut yang banyak hanya empat, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Penamaan terhadap keempat mazhab ini disesuaikan dengan imam dan pendirinya masing-masing. Lebih jelasnya lihat dalam *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 298



kesatuan budaya nasional Uzbek. Sedangkan penduduk yang lainnya mempraktekkan Islam secara dangkal, tanpa praktek keagamaan serta menjadi pengikut fanatik doktrin Islamisme. Tokoh-tokoh agama dan pengikutnya terutama mereka yang termasuk golongan muda yang radikal, secara terang-terangan mengkritik tindak korupsi pemerintah dan menginginkan penerapan hukum syari'ah Islam dan pemerintahan masyarakat menurut aturan keadilan dan moralitas Islam.

Diawal tahun 1990-an, Pemerintah Karimov memanfaatkan revivalisme Islam sebagai alat untuk memperoleh dukungan dan legitimasi publik. Presiden Karimov mengadakan kunjungan resmi kenegaraan dan menjalankan ibadah haji ke Mekkah, Saudi Arabia, untuk membangun solidaritas sesama muslim dan membantunya untuk mendapatkan dukungan terhadap pemerintahannya diantara negara-negara Islam dan membangun kepercayaan sebagai seorang pemimpin muslim yang baik. Ketika ia disumpah jabatan sebagai presiden pertama Uzbekistan pada tahun 1991, Karimov memegang Al-Qur'an di satu tangan dan konstitusi ditangan yang lain. Bagaimanapun juga, dibawah ketaatan publik, pemerintah bersikap sangat ambivalen terhadap Islam dan meningkatkan kontrol yang ketat terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan organisasi-organisasi keislaman. Muftiyat Uzbekistan, tim sukses *Spiritual Directorate of Central Asia and Kazakhstan*, mengatur aktivitas komunitas muslim lokal, walaupun pemisahan resmi agama dan negara dijamin dalam konstitusi. Pemerintah Uzbek melanjutkan praktek Soviet dalam menjalankan hukum, mengancam aktivitas dan organisasi Islam, dan lebih banyak melakukan tindakan represif terhadap segala sesuatu yang tidak mendukung pemerintahannya.



Dimensi lain dari periode liberalisme religius ini adalah bahwa Islam "tidak resmi" menjadi lebih menonjol di Uzbekistan. Para muslim mulai mengikuti imam-imam yang independen yang menolak dikte dari negara (pemerintah) dalam melakukan aktivitas-aktivitas religius. Pengamat-pengamat muslim sering merasa enggan menerima aturan-aturan khusus bagi muslim, yang mereka anggap sebagai bentuk kontrol dari pemerintah. Oleh karena itulah ketegangan timbul diantara para penganut Islam kebanyakan dan mereka yang menjadi pengikut Islam "resmi" yang didukung oleh pihak keamanan.<sup>19</sup>

Beberapa dari kelompok Islam mulai tumbuh dan bermunculan ditahun 1991 baik itu level nasional maupun pada level regional. Gerakan Islam *Adolat* (Keadilan) yang didirikan di kota Namangan memperoleh banyak dukungan publik karena keberhasilannya dalam menumpas tindak kriminal dan memulihkan tatanan sosial berdasarkan hukum syari'ah ketika diberlakukan kontrol-kontrol yang sangat ketat terhadap oposisi. Dan di tahun 1992, ketika pemerintah melakukan tindakan-tindakan represif terhadap kelompok-kelompok Islam, sejumlah anggota *Adolat* dipenjarakan, namun pemimpinnya berhasil melarikan diri ke Afghanistan dan Iran. Partai lain yang berasal dari propinsi Namangan, *Touba* (repentance / tobat), juga mengalami hal yang serupa ditahun 1992. *Islamic Renaissance Party* pun mengalami nasib yang sama. Ia tidak diperbolehkan bergerak atau melakukan aktivitas secara terbuka

---

<sup>19</sup> Seiring dengan semakin meningkatnya *pressure-pressure* pemerintah, maka aktivitas-aktivitas bawah tanah yang dilakukan oleh kelompok Islam "terlarang" menjadi semakin meningkat pula. Lihat dalam Zamira Eshanova, "Central Asia : Are Radical Group Joining in Forces", <http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav101102>



sebelum akhirnya partai ini benar-benar menghilang dari permukaan. *IRP* dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun 1992, dan dalam kampanye-kampanye *IRP* selanjutnya banyak sekali anggota-anggota partai ini yang ditangkap. Abdullah Otaev, pemimpin *IRP* yang ada di Uzbekistan, menghilang pada bulan Desember 1992, dan meskipun pihak Tashkent "tidak menyadari" kepergiannya, para pengamat pada umumnya percaya bahwa ia telah ditahan dan dibunuh oleh Dinas Keamanan Negara. Ketika ia dinyatakan terlarang, *IRP* diyakini telah mempunyai pengikut sebanyak 50.000 orang, sebagian besar ada di Lembah Ferghana.<sup>20</sup>

Berbagai macam kegiatan keislaman mendapatkan dukungan dari luar negeri, khususnya mereka-mereka yang ada di Lembah Ferghana. Salah satu kelompok yang berselisih dengan pemerintah yang berada di areal itu adalah gerakan *Wahhabi*<sup>21</sup> yang menempati peringkat tertinggi dalam urutan tokoh / figur ideal dalam komunitas Islam di Uzbekistan. Tokoh dari gerakan *Wahhabi* di Uzbekistan ini yang paling terkenal adalah Abduvali Qari Mirzaev.

Penting untuk dicatat bahwa gerakan *Wahhabi* telah lama menjadi incaran pemerintah Soviet untuk menunjuk pada kelompok-kelompok muslim yang dicari

<sup>20</sup> Pusat *IRP* sendiri sebenarnya ada di Andijan dan Namangan, yaitu daerah yang selama ini menjadi fokus dari usaha-usaha pemerintah untuk menindas kelompok-kelompok Islam yang "tidak terdaftar". Lebih jelasnya lihat dalam Artie Mc Monel, "Islamic Radical Regroup in Central Asia" dalam <http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/cav051502.shtml>

<sup>21</sup> *Wahhabi* atau Wahabiyah, adalah gerakan sosial politik berdasarkan keislaman menurut alam pikiran pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787/1115-1201 H). Aliran Wahhabi merupakan aliran pemurnian yang ingin mengembalikan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh nabi Muhammad setelah Islam mengalami penyimpangan-penyimpangan yang membahayakan, terutama keimanan terhadap taulid atau keesaan Tuhan. Lebih jelasnya lihat dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 974



oleh pemerintah untuk ditindas, tidak dihormati baik seluruh ajaran / prinsipnya maupun aspirasi politik dari aliran *Wahhabi* tersebut. Bagaimanapun juga, hanya kelompok-kelompok tertentu saja di Lembah Ferghana dimana mereka menderita / mengalami nasib yang serupa dengan organisasi-organisasi lainnya, yaitu dipenjarakan, dilecehkan, dan diasingkan. Disisi lain Lembah Ferghana, berdiri pula pusat organisasi Islam *Lashkarlari* (Perjuangan Islam) yang dikemudian hari menjadi target utama dari kemarahan pemerintah setelah konfrontasi langsung antara pemimpinnya dengan Presiden Karimov pada bulan Desember 1991. Untuk menghindari hukuman pengasingan, beberapa dari kelompok-kelompok Islam itu berpindah dari Lembah Ferghana ke Tajikistan, Afghanistan, dan Iran. Beberapa dari mereka kemudian mendirikan IMU (Islamic Movement of Uzbekistan), yang anggotanya berjuang bersama dengan aktivis Islam lainnya melawan tentara pemerintah di Tajikistan selama negara itu dilanda perang sipil.<sup>22</sup> Diakhir tahun 1992, pemerintah Uzbek melarang semua kelompok-kelompok keagamaan yang tidak mendukung pemerintah dan menegaskan kembali kontrolnya pada aktivitas-aktivitas keagamaan.

Bagi pemerintah Uzbekistan, perang sipil di Tajikistan adalah sebuah peristiwa yang membahayakan. Alasannya yaitu yang pertama, karena gerakan Islam yang kuat di negeri itu dapat membantu kekuatan Islam di Uzbekistan, dan selanjutnya karena akomodasi kekuatan-kekuatan Islam yang memuncak pada *Peace*

---

<sup>22</sup> Evgenii Abdullaev, "Islam and The "Islamic Factor" in Contemporary Uzbekistan ", dalam [http://www.cac.org/journal/12\\_1997/st\\_12\\_abdullaev.shtml](http://www.cac.org/journal/12_1997/st_12_abdullaev.shtml)



*Accord* tahun 1997 menunjukkan teladan bagi legitimasi Islam sebagai kekuatan politik. Munculnya *Taliban* dan jalur perdagangan narkoba di Afghanistan juga dilihat oleh para elite Uzbek sebagai ancaman stabilitas. Dengan dukungan semangat juang yang tumbuh di Uzbekistan, faktor eksternal ini telah turut memberikan kontribusi bagi pemimpin-pemimpin Uzbek untuk membentengi pengikutnya dan memutuskan komunikasi diantara kelompok-kelompok Islam di Uzbekistan dan negara-negara lain. Anggota-anggota dari kelompok Islam yang lebih moderat merasa diri mereka ada dibawah serangan yang berlarut-larut. Peristiwa ini, ditambah dengan keputus-asaan ekonomi dan tidak adanya kebebasan berekspresi serta terlalu mengejar kepentingan-kepentingan dalam politik, semakin menambah usaha-usaha mempolitisir muslim sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak berkecimpung dalam lautan politik dan hanya murni bersikap religius.

Tipe protes yang lain dibawa oleh organisasi Islam internasional yang menamakan diri sebagai *Hizb ut-Tahrir al-Islami* (Partai Islam Liberal) yang aktif di Uzbekistan pada tahun 1990 dan selanjutnya menyebar kenegara-negara Asia Tengah yang lain.<sup>23</sup> *Hizb ut-Tahrir* menganjurkan cara non-kekerasan untuk meraih tujuan politik dalam menciptakan kekhalifahan Islam berdasarkan hukum syari'ah. Meskipun IMU di Uzbekistan bertujuan menjatuhkan rezim yang baru ini dan menggantinya dengan negara Islam Uzbekistan, fakta menunjukkan bahwa *Hizb-ut-Tharir* menolak cara-cara militer, sehingga membuat gerakan ini lebih bisa diterima

---

<sup>23</sup> ICG Asia Report No.31, 3 Oktober 2001, "The IMU and The Hizb-ut-Tahrir : Implications of The Afghanistan Campaign" dalam <http://www.crisisweb.org>



oleh banyak orang. *Hizb ut-Tahrir* menempati posisi khusus diantara agama dan politik. Disatu sisi, ia ingin kembali menghidupkan syi'ar Islam dengan benar dan sesuai syari'ah. Oleh karena itulah aktivitas bawah tanah gerakan ini, terutama cabang gerakan perempuannya sebagian besar difokuskan pada usaha-usaha untuk menjadikan kaum muslim kearah yang lebih baik. Aspirasi politik menempati urutan terakhir dimana ia difokuskan untuk menangani masalah-masalah dalam negeri Uzbekistan, meskipun demikian langkah untuk meraihnya masih belum jelas bagi sebagian anggotanya.

Ranking partai tersebut segera menanjak, dan hal itu terjadi pula pada partai yang sama di negara-negara tetangga. Kepala Departemen Kepolisian Wilayah Andijan mengakui bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk mencegah gerakan-gerakan rakyat yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan disisi lain mereka berusaha menemukan ideologi pemersatu bangsa. Dia mengutarakan bahwa propaganda pemerintah yang anti *Hizb ut-Tahrir* hanya akan berpengaruh sedikit pada kehidupan masyarakat. "Partai ini menyesuaikan selera rakyat biasa, dan jika orang-orang muslim mengikuti partai yang anti kekerasan ini, tapi bukan IMU, kami harus bekerja sama dengan mereka secara damai atau nanti mereka malah akan bergabung dengan IMU. Jika hal itu terjadi maka kita akan menghadapi problem yang sangat serius", demikian paparnya.

Sekarang ini, sejumlah kelompok-kelompok Islam di Uzbekistan memilih melakukan gerakan-gerakan bawah tanah, termasuk Sufi Naqshahbandiya dan Yasawirya yang sudah berpengalaman dalam mengikuti sejarah kebangkitan



kemerdekaan. Kelompok lain yang turut masuk dalam kategori bawah tanah adalah *Wahhabi*, *Hizb ut-Tahrir*, *IMU*, *Akrantiya* (*Hizb ut-Tahrir* versi radikal) dan sekelompok muslim *Syi'ah* yang jumlahnya kecil. Pemerintah Uzbekistan telah menggunakan berbagai cara untuk mengontrol kelompok-kelompok ini, termasuk pula usaha-usaha untuk memberantas mereka. Pemerintah juga tidak mengakui gerakan *Naqshabandiya* sebagai bagian dari sejarah pergerakan Islam di negeri ini. Anggota gerakan *Naqshabandiya* tersebut sekarang lebih radikal jika dibandingkan *Naqshabandiya* sebelum merdeka dulu.

Di sisi yang lain, pada tahun 2000 pemerintah berniat mengangkat Mufti Muhammad Yusuf Muhammad Sadiq ketika ia kembali ke Uzbekistan untuk menyatukan seluruh faksi Islam dibawah payung Kesatuan Muslim Uzbekistan. Mufti, yang datang dari Libya untuk mengunjungi orang tuanya di Andijan, menolak tawaran tersebut. Karena penolakan itulah, Mufti kemudian dituduh pemerintah bahwa ia telah menggelapkan dana bantuan dari luar negeri untuk tujuan-tujuan religius. Sementara dana itu tidak jelas digunakan untuk apa, pemerintah tetap melakukan serangan-serangan terhadap kelompok-kelompok Islam. Seorang Mufti yang baru di Uzbekistan, Abdurrasyid Qari Bahramov, yang ditunjuk oleh presiden karena memisahkan gereja dan negara dalam menyusun konstitusi, tidak mempunyai banyak pendukung, membuat pemerintah kesulitan dalam mengkonsolidasikan komunitas muslim maupun menggunakan organisasi Islam resmi sebagai alat yang efektif untuk mempengaruhi rakyat. Sekarang ini, ekstrimisme keagamaan bukanlah ancaman yang patut ditakutkan. Pemerintah hanya menggunakan ekstrimisme ini



sebagai tirai/tabir/tameng bagi kekuasaannya untuk menindas perbedaan-perbedaan politik yang ada.

Bukti nyata dari penindasan-penindasan pemerintah Uzbekistan dapat dilihat dalam penjara. Jumlah tahanan politik di Uzbekistan hampir mendekati angka 7.000 orang. Penahanan terhadap pemimpin-pemimpin keagamaan maupun sekuler yang kontra atau berseberangan dengan pemerintah ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tumbuhnya ketegangan sosial dan menciptakan sebuah kondisi dimana masyarakat lebih cenderung untuk mendukung pasukan oposisi bersenjata. Selama ¾ tahun terakhir, gerakan-gerakan oposisi Islam telah menjadi ancaman yang paling serius bagi pemerintah Uzbekistan. Sekarang ini, seseorang dapat membedakan dengan jelas antara yang militan seperti *IMU* dan gerakan-gerakan non-militan bawah tanah yang dimotori oleh *Hizb ut-Tahrir*. Bagaimanapun juga, oposisi non-militer akan menjadi semakin bertambah, dan siap untuk mengangkat senjata melawan rezim yang terus menyiksa dan mem-*pressure* rakyat.

### III.1.3. Munculnya Partai-Partai Politik Yang Diakui Oleh Pemerintah

Untuk menyangkal opini publik bahwa dirinya telah melakukan penindasan terhadap para kelompok oposisi politik, maka pemerintah Karimov "mendirikan" partai-partai yang "independen". Partai-partai politik ini sesungguhnya tidak mempunyai peranan apapun, ia juga tidak memiliki dukungan dan kredibilitas dimata masyarakat publik. Dalam *Narodnoe Slavo*, surat kabar harian milik pemerintah, disebutkan bahwa partai-partai politik itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam panggung politik Uzbekistan. Bahkan, sebagian besar rakyat Uzbek sendiri tidak pernah mengetahui tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh partai-partai tersebut. Keeksistensian parlemen sendiri sebenarnya patut diragukan, karena ia secara nyata tidak punya suara apapun dalam menentukan berbagai kebijakan, baik itu didalam maupun diluar negeri. Semua kekuasaan hanya berada pada satu tangan, yaitu presiden Uzbekistan. Presiden mempunyai hak prerogatif di hampir semua bidang.<sup>24</sup>

Partai Rakyat Demokrasi Uzbekistan (*People's Democratic Party of Uzbekistan*) adalah salah satu dari sekian banyak partai politik yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Dalam bahasa Uzbek, partai ini disebut dengan *Ozbekistan Khalq Demokratik Partiyasi*. PRDU dulunya adalah Partai Komunis

<sup>24</sup> Dalam Pasal 93 Bab XIX Konstitusi Republik Uzbekistan dicantumkan bahwa Presiden dijamin hak-haknya dalam memilih perdana menteri, wakil perdana menteri, menteri-menteri dalam kabinet, jenderal, maupun wakil jenderal. Presiden juga diperbolehkan untuk merekomendasikan nama-nama calon ketua dan anggota dalam mahkamah konstitusional, serta mengangkat dan memberhentikan hakim pada tingkat propinsi, kota, distrik, serta gubernur, bupati, serta berbagai kewenangan lainnya.



ketika Uzbekistan masih berada dalam lingkaran Republik Sosialis Uni Soviet. Partai Komunis ini merupakan pendukung utama kinerja pemerintah Soviet hingga saat-saat terakhir berlangsungnya kekuasaan Gorbachev, Agustus 1991. Melalui perubahan nama dari Partai Komunis menjadi Partai Rakyat Demokrasi Uzbekistan, partai politik ini hanya melakukan sedikit reformasi dalam hal struktur, administrasi, strategi, dan keanggotaan. PRDU juga masih memegang kendali kekuasaan serta tetap melanjutkan metode-metode Soviet pasca kemerdekaan Uzbekistan. Pada tahun 1991, anggota PRDU telah berjumlah lebih dari 350.000 orang. Ia menyatakan diri sebagai "pewaris" sah atas aset-aset Soviet di Uzbekistan, dan menjadi pendukung utama pemerintahan yang baru. Presiden Islam Karimov adalah Sekretaris I PRDU dimana ia menjabat sampai dengan tahun 1996. PRDU, dalam program-programnya hanya sedikit sekali melakukan pelayanan dibidang sosial. Ia malah mendorong pemerintah agar menghentikan anggaran negara untuk kebutuhan sosial seperti pemeliharaan sistem kesehatan yang pernah dilakukan Partai Komunis di masa Soviet. Komitmen untuk menjamin kesejahteraan masyarakat selalu digunakan PRDU sebagai dalih untuk menolak reformasi ekonomi. Selain itu, pendukung ideologi komunis yang tergabung dalam PRDU juga gagal dalam menggabungkan kekuatan-kekuatan signifikan di Uzbekistan. PRDU tidak pernah mendapatkan dukungan dari publik sama sekali, hal ini sangat berlainan dengan apa yang dialami bekas Partai Komunis di negara-negara tetangganya. Di Kyrgystan misalnya, Partai Komunispun memainkan peran yang serupa seperti rekannya di Rusia yang membesar-besarkan kejayaan Soviet. Dibawah pengaruh PRDU, pemerintah Uzbek



menentang kebangkitan kembali komunisme yang secara ideologis sangat identik dengan dominasi Rusia dan penindasan terhadap budaya nasional Uzbek.

Sebagian pengikut-pengikut komunis kemudian berpindah ke PRDU ketika Karimov mendirikannya. Orientasi mereka sudah jelas dan tak perlu diragukan lagi, yaitu untuk mempertahankan posisinya dalam sistem kekuasaan, seperti menentang partai politik dengan ideologi lain yang tidak sesuai. Meskipun partai ini tetap memiliki jumlah anggota yang begitu besar, namun ia tidak punya pengaruh apapun dalam menentukan kebijakan dibidang sosial maupun politik karena kekuasaan tetap berada ditangan Presiden Karimov. PRDU yang sekarang mempunyai perwakilan terbesar daripada partai-partai politik yang lain dalam menduduki kursi parlemen, yaitu sebanyak 48 wakil partai atau sekitar 19 % dari 250 buah kursi parlemen.<sup>25</sup>

Partai politik lain yang diakui keberadaannya oleh pemerintah adalah *Vatan Taraqqiyati Partiyasi* atau *Homeland Progress Party* (HPP) yang didirikan tahun 1992 oleh seorang mantan aktivis *Birlik* sekaligus seorang penyair yang bernama Usman Azim. HPP bertujuan untuk memajukan budaya demokrasi dilingkungan masyarakat sipil dan memperjuangkan sistem ekonomi pasar secara bertahap. Partai ini banyak menarik perhatian kalangan intelektual yang telah berpaling dari oposisi dengan menerima tawaran presiden untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pada

---

<sup>25</sup> Hanya partai-partai yang mau berkompromi dengan pemerintah sajalah yang mendapatkan kursi dalam parlemen Uzbekistan (*Oliy Majlis*). Hasil pemilu yang diselenggarakan tahun 1999 yang lalu menyebutkan bahwa *People's Democratic Party* atau *NDP* (yang dulunya adalah Partai Komunis) memperoleh 48 % kursi parlemen, Sedangkan *Self-Sacrifice Party* memperoleh sebanyak 34 %, *Fatherland Progress Party* 20 %, *Adolat Social Democratic Party* 11 %, dan *Milliy Tiklanish Partay* 10 %. Lebih lengkapnya lihat *Press Release "General Information on Uzbekistan"*, <http://www.uznews.com/general/shitml>.



pemilu yang diselenggarakan tahun 1999, partai ini berhasil mendapatkan 20 kursi atau 8 % suara.

Pasca referendum Maret 1995 yang menjamin jabatan kepresidenannya selama 5 tahun, Presiden Karimov melihat bahwa pembentukan partai-partai politik, lambat laun akan memadamkan kritikan-kritikan dari dunia internasional terhadap sistem politik Uzbekistan yang dikenal otoriter. Oleh karena itu, pemerintah memberikan pengakuan resmi kepada 2 partai politik baru yaitu *Adolat Social Democratic Party* dan *Miliy Tiklanish Demokratik* serta gerakan *Khalq Birligi*, dimana semuanya mencerminkan organisasi-organisasi yang pro pemerintah daripada pluralisme politik dalam arti yang sesungguhnya. Nama kedua partai itu hampir sama dengan nama-nama gerakan oposisi sebelumnya, *Adolat* dan *Birlik*, yang mungkin sengaja dibentuk untuk menggantikan opini masyarakat terhadap gerakan-gerakan bawah tanah tersebut.

*ASDP (Adolat social Demokratik Party)* didirikan pada tahun 1995. Masyarakat berharap bahwa partai tersebut kelak akan menjadi salah satu oposisi yang berpengaruh di Uzbekistan. Ketua *ASDP*, Shukrulla Mirsaidov, sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil presiden Uzbekistan. Namun ia hanya bertahan sampai tahun 1992 karena masalah-masalah internalnya dengan presiden. Ia tidak hanya dipaksa berhenti dari jabatannya, namun posisinya juga dieliminasi. Di tahun 1996, Mirsaidov berada dibawah pengawasan dan tekanan pemerintah. Tidak lama kemudian, ia dan anaknya diusir dari rumahnya sendiri. Meskipun demikian, Mirsaidov tetap melanjutkan perannya sebagai pihak oposisi dan memimpin *DOCC*



(*Democratic Opposition Coordination Council*) terhitung sejak tahun 1992. *DOCC* ini bertujuan untuk menyatukan suara pihak-pihak oposisi. Banyak pengamat berpendapat bahwa pembentukan dewan ini sebenarnya tidak efektif, karena malah akan memberikan efek yang buruk pada sistem pluralisme politik di Uzbekistan. Mirsaidov akhirnya menarik diri dari kehidupan berpolitik pada tahun 1998 ketika dia sendiri menyatakan bahwa menyatukan pihak oposisi adalah suatu hal yang tidak mungkin dan justru akan menimbulkan perseteruan internal diantara mereka sendiri. *ASDP* yang pernah dipimpin Mirsaidov, sekarang telah digantikan oleh sebuah partai lain yang menggunakan nama serupa, namun tanpa tendensi oposisi apapun. Partai ini dipimpin oleh Turghunpolat Daminov, seorang kandidat utama dalam pemilihan parlemen tahun 1999. Banyak kalangan mengakui bahwa saat ini, sangat sulit untuk membedakan antara program partai tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Islam Karimov.

Pada bulan April 2000, *Fidokorlar Miliy Demokratik Partiyasi*, yaitu sebuah partai yang terkenal paling dekat dengan Karimov, dan *Vatan Taraqqiyati Partiyasi* resmi bergabung. Partai baru itu tetap memakai nama *Fidokorlar Miliy Demokratik Partiyasi* (*Fidokorlar National Demokratik Party*). Seorang anggota dari tim redaksi surat kabar partai tersebut, menginformasikan bahwa *FMDP* mempunyai anggota berjumlah 65.000 orang dan sebanyak 54 orang perwakilan duduk di kursi parlemen. *FMDP* adalah faksi kedua terbesar dalam *Oliy Majlis* (Parlemen Uzbekistan).

Pada tahun 1996, pemerintah memperkenalkan sebuah peraturan baru yang lebih ketat dan mengikat partai-partai politik dan kemudian disetujui oleh parlemen



pada bulan Januari 1997. Aturan ini melarang pembentukan partai-partai politik baru yang didirikan berdasarkan garis etnik dan keagamaan. Dalam iklim kepura-puraan pluralisme ini, *ODHIR* (Office of Democratic Institutions and Human Right) dari *OSCE* (Organisation for Security and Cooperation in Europe) Mengirimkan sebuah kelompok kecil yang terdiri atas para ahli untuk menilai jalannya pemilu parlemen yang diselenggarakan pada tahun 1999. Namun mereka menolak untuk mengirimkan tim pengamat pada pemilihan presiden yang diadakan bulan Januari 2000 dengan alasan proses pemilihan tersebut sudah bisa diprediksi kecacatannya. Presiden Islam Karimov sendiri kemudian ganti menyampaikan kritikan pada pihak *OSCE*, yaitu bahwasanya beliau mempertanyakan kembali visi dan misi *OSCE* yang memfokuskan diri pada pembangunan demokrasi, perlindungan HAM, serta kebebasan pers.

Di Uzbekistan, perkembangan partai dan institusi politik lainnya menunjukkan sebuah loyalitas yang absolut antara pengikut partai dengan institusinya. Jarang sekali ada perselisihan terbuka dan hampir semua pertanyaan-pertanyaan kunci tentang politik telah diatur sedemikian rupa sehingga jauh dari pengamatan publik. Kasus Shukrulla Mirsaidov misalnya, adalah contoh kasus yang pertama kali diperdebatkan. Mirsaidov adalah wakil presiden yang pertama sekaligus yang terakhir di Uzbekistan. Mirsaidov merupakan representasi dari kepentingan para elite Tashkent yang menempati posisi penting dalam struktur perimbangan kekuasaan Uzbekistan. Posisi Mirsaidov sebagai wakil presiden dan pengawas anggaran yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya telah dipahami sebagai sarana akomodasi dari kelompok ini. Pada tahun 1991, isu perselisihan tersebut mulai mengemuka dimana



200 orang anggota dewan parlementer mendukung Mirsaidov yang sedang terlibat ketegangan dengan Karimov. Mirsaidov kemudian dituduh menyalahgunakan kekuasaan dengan menggelapkan dana pemerintah. Oleh karena itu ia kemudian dikeluarkan dari politik hingga pada tahun 1995 ketika ia muncul sebagai Ketua Umum Partai *Adolat*.

Contoh lain penggunaan institusi untuk mendukung loyalitas sistem terjadi pada perkembangan organisasi *Kamolot* atau organisasi keperempuanan. Peristiwa ini bermula dari anggaran dana *Kamolot* yang diperuntukkan bagi para muda-mudi berbakat dan berprestasi yang akhirnya berubah menjadi organisasi massa kepemudaan, seperti halnya *Komsomol* atau Liga Komunis Muda yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin meniti karir dalam Partai Komunis. Perubahan yang terjadi pada tubuh *Kamolot* itu dilatarbelakangi oleh berbagai kekhawatiran terhadap para pemuda yang sangat rentan pada pengaruh kelompok radikal. Organisasi ini dibuat semenarik mungkin agar para pemuda tidak merasakan "kehilangan" terhadap kelompok-kelompok Islam. Pada tanggal 25 April 2001, pemerintah mensponsori kongres pertama Gerakan *Kamolot Muda*. Namun dukungan ini harus dibayar dengan loyalitas yang tinggi kepada pemerintah.

Hanya ada sedikit pertanda bahwa organisasi ini akan membuktikan dirinya lebih daripada inovasi birokratik lainnya, dengan prospek yang kurang dalam membangun loyalitas diantara mereka yang cenderung condong ke gerakan-gerakan radikal bawah tanah. Gerakan yang baru saja didirikan kemudian langsung dikritisi oleh analis-analis independen atas kelemahan mereka seperti halnya partai-partai



politik resmi yang berpengalaman dalam mengatasi problema sosial dan ekonomi. Seorang pejuang veteran (alm) dari *Centre of Secondary Specialised and professional Education of the Ministry of Publik Education* menyatakan, "Negara kami seperti sebuah pohon sakit yang hanya sedikit memberikan buah, dan organisasi yang baru ini tidak mampu melindungi para pemuda kita dari pengaruh negatif. Kemiskinan, korupsi, dan tidak adanya ideologi pemersatu tidak pernah diatasi oleh pemimpin tertinggi negeri ini. Bagaimana seseorang dapat mengharapkan organisasi kepemudaan yang miskin ini untuk mengatasi problem masa kini yang banyak dialami oleh kaum laki-laki dan perempuan muda."<sup>26</sup> Ketakutan akan kehilangan orang-orang muda selalu ditunjukkan oleh pemerintah pusat dan mereka melemparkan tuduhan kepada gubernur regional bahwa mereka tidak menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kaum muda sehingga pemerintah pusat sendiri merasa berhak untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut pada level nasional. Emigrasi kaum muda Uzbekistan dan para intelektual berbakat dan profesional kemudian berlanjut pada problem yang serius seperti halnya penambahan jumlah pengikut keleompok-kelompok religius yang terlarang.

---

<sup>26</sup> *ICG Asia Report No.21, 21 Agustus 2001, "Uzbekistan at Ten :Repression and Instability" dalam <http://www.crisisweb.org>*

## III.2. Reformasi Ekonomi Model Uzbek

Untuk memulihkan kondisi perekonomian negara pasca kemerdekaan yang penuh dengan turbulensi dan ketidakpastian, maka pemerintah melakukan program reformasi ekonomi. Reformasi ini merupakan satu dari sekian banyak paket pembangunan yang akan diterapkan di Uzbekistan.

Presiden Karimov sangat berhati-hati dalam memilih model pembangunan yang akan diterapkan di Uzbekistan. Ia tidak ingin Uzbekistan mengalami kegagalan dalam mewujudkan sebuah peradaban baru yang diharapkan akan lebih baik dari masa sebelumnya. Model pembangunan ala Turki sempat dijadikan bahan pertimbangan dimana sekularisme dijadikan landasan utama bagi pemerintah Attaturk untuk membangun Turki modern. Sekularisme Turki ini dianggap akan dapat membangun budaya politik yang demokratis lewat gaya kepemimpinan otoritarianisme. Selain itu, Karimov juga bercermin pada Korea Selatan yang mengalami kemajuan cepat dalam waktu singkat dengan berorientasi pada reformasi ekonomi dan pluralisme demokrasi. Model pembangunan ala Cina juga tak luput dari sasaran pertimbangan, dimana didalam nya, pemerintah menjalankan reformasi ekonomi, namun hanya sedikit sekali melakukan reformasi dibidang politik.

Namun demikian, meskipun Karimov banyak berkaca ke mancanegara untuk menentukan model pembangunan mana yang akan dipakainya, tidak satupun dari model-model itu yang benar-benar diimplementasikan. Pemerintah akhirnya menentukan sendiri model pembangunan yang digunakan untuk mengejar



kemakmuran rakyat. Model ini disebut dengan "Model Uzbek".<sup>1</sup> Dalam bukunya yang berjudul *Own Model of Transition to Market Relations*, Presiden Islam Karimov menyatakan bahwa Uzbekistan akan menggunakan reformasi ekonomi model Uzbek dalam membangun perekonomian negaranya.<sup>2</sup> Reformasi ekonomi model Uzbek ini merupakan reformasi yang berorientasi pada sistem ekonomi pasar. Menurut Karimov, reformasi ini didasarkan pada 5 prinsip pokok kebijakan pemerintah dalam periode transisi, yaitu :

1. Seluruh kebijakan yang diambil dalam bidang perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
2. Solusi-solusi yang diambil harus dapat menciptakan stabilisasi ekonomi, mengatasi masalah pengangguran, dan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi.
3. Pengaturan sistem perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar.
4. Negara mengurangi perannya dalam manajemen produksi dengan memberi kebebasan pada pihak *producer* untuk memilih area bisnisnya, lingkup dan tipe produksinya, seerta memilih *partner* bisnis yang disukainya.

<sup>1</sup> Islam Karimov, *The Idea of National Independence : Basic Definitions and Principle*, lihat dalam ICG Asia Report No. 21, 21 Agustus 2001

<sup>2</sup> Lihat dalam *Press Release*, "The Uzbek Model of Economic Reform : Ten Years of Transition", [http://www.press\\_service\\_uz/eng/pressa-eng9.htm](http://www.press_service_uz/eng/pressa-eng9.htm)

5. Tetap mempertahankan peran aktif negara dalam menentukan kebijakan investasi, penarikan modal asing, mengatur perekonomian, dan menjaga keamanan masyarakat.

Namun ternyata, implementasi program pembaharuan dan reformasi ekonomi yang diterapkan di Uzbekistan sangat jauh dari teori yang ada. Industri berat, ekspor barang-barang tambang yang merupakan hasil utama negeri ini, seperti kapas yang dianggap pemerintah sebagai aset yang strategis, tetap berada dibawah kontrol negara secara langsung. Sistem perlindungan (*patronage*), yang menduduki posisi penting dalam kekuasaan, juga menempati urutan tertinggi dalam mengontrol kekayaan negara. Ekspor negara terbesar, yaitu kapas dan emas, ada dibawah kontrol sejumlah individu yang mempunyai hubungan dekat dengan presiden.

Produksi kapas, yaitu hasil bumi yang memberikan kontribusi besar bagi kekayaan Uzbekistan, dipaksa untuk mengikuti sistem kuota, seperti halnya yang pernah dilakukan pada masa Soviet. Sistem yang sama berlaku pula pada penjualan hasil panen petani kepada para pembeli. Harga pasar ditentukan oleh negara. Para petani kapas ini tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Uzbekistan merupakan negara terakhir diantara bekas-bekas republik Soviet lain yang menerapkan reformasi ekonomi dan sistem privatisasi. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70 % GDP (Gross Domestic Product) negara ini dikuasai oleh pemerintah.<sup>3</sup> Pajak tertinggi negara adalah untuk pemerintah. Yang

---

<sup>3</sup> Ron Synovitz, "Uzbekistan : Little Progress Seen in Agricultural Reforms", dalam [http://www.rferl.org/ncr/features/1997/04/E\\_RU\\_97041655006.html](http://www.rferl.org/ncr/features/1997/04/E_RU_97041655006.html)



lebih parah lagi, sebagian besar bisnis di negara ini sangat dekat dengan urusan politik (dan bahkan dibiayai). Hal tersebut dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menjamin ganti rugi jika mereka dihadapkan pada hukum ataupun kesulitan-kesulitan yang lain. Pemerintah juga mempertahankan kontrol yang ketat terhadap lisensi, perijinan, dan berbagai macam transaksi perbankan untuk mendapatkan keuntungan dan memperkuat sistem *patronage*, serta meluaskan pengaruhnya.

Pada tahun 1996, pemerintah Uzbekistan telah mengoperasikan sebuah sistem *multiple exchange rates* yang turut menyebabkan munculnya pasar gelap dalam pertukaran mata uang dan permasalahan inflasi yang berlarut-larut. Untuk memperoleh ijin perubahan mata uang, perusahaan biasanya menyediakan dana khusus untuk itu. Dengan ijin tersebut, para *bussinesman* dapat membeli mata uang seharga tiga kali lebih murah daripada tanpa ijin sama sekali. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan akses ini posisinya menjadi aman ketika mereka melakukan transaksi mata uang dipasar gelap. Seperti halnya yang dikatakan oleh seorang banker pada *ICG*, bahwa *MCRS* (Multiple Exchange Rates System) telah menyebabkan jutaan dolar dalam ekonomi pasar gelap dimiliki oleh orang-orang tertentu. Hal ini menyebabkan persaingan-persaingan yang tidak sehat muncul dan semakin marak mewarnai perekonomian Uzbekistan.

Aktivitas ekonomi yang penuh diwarnai dengan budaya korupsi dan kriminalitas ini, sebenarnya juga sama seperti yang terjadi pada periode Soviet, malah semakin parah sejak Uzbekistan resmi merdeka. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam melaksanakan reformasi, baik itu pada bidang politik maupun ekonomi.



Seorang pengamat kawasan Asia Tengah mengungkapkan bahwa kesalahan pemerintah Uzbekistan sebenarnya sudah dimulai sejak awal. Pasca pemilu 1991 lalu, pemerintah membebaskan semua narapidana yang sebelumnya ditahan karena melakukan tindak korupsi. Para mantan napi ini kemudian kembali menguasai panggung kekuasaan dengan menempati jabatan-jabatan tinggi dalam struktur pemerintahan negara. Dia juga menambahkan bahwa sejak kemerdekaan Uzbekistan dikumandangkan, angka kejahatan korupsi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, malah makin lama makin meningkat. Aksi penyuapan, nepotisme, perampokan, serta kronisme, yang semakin merajalela memicu timbulnya frustrasi pada masyarakat publik sekaligus memudahkan kepercayaan bangsa-bangsa lain akan potensi *leadership* Uzbekistan.

Para elite politik Uzbekistan sering bekerja sama dengan kelompok-kelompok kriminal untuk memperoleh *krysha* atau perlindungan. Tokoh-tokoh mafia ini memegang kendali terhadap jaringan-jaringan kejahatan dan dikenal oleh publik sebagai orang terkaya di Uzbekistan. Kelompok-kelompok ini tidak hanya berbisnis di Uzbekistan, tapi juga diketahui telah membuka restoran-restoran dan kasino-kasino di Eropa dan membeli rumah-rumah mewah di luar negeri. Akibatnya, reformasi ekonomi dan politik tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya.

Usaha-usaha mengkritisi tindak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Uzbekistan memiliki resiko tinggi karena sistem hukum Uzbekistan sendiri sama sekali jauh dari tingkat independensi dan tidak dapat menjamin keselamatan para kritikus tersebut dari tindakan sewenang-wenang pemerintah pusat. Sejumlah jurnalis



mengungkapkan sebuah fakta yang terjadi pada rekan mereka. Majid Abduraimov, seorang jurnalis dari Propinsi Sukhandarya, ditangkap pada bulan Maret 2001 atas dugaan penyuapan dan dihukum penjara selama beberapa tahun. Peristiwa ini bermula dari sebuah laporan yang ditulis oleh Abduraimov yang menyebutkan tentang tindak korupsi yang dilakukan oleh Kepala Perusahaan Produksi Padi di Surkhandarya. Karena merasa dirinya diserang oleh pers, maka ia segera meminta perlindungan kepada Menteri Dalam Negeri. Sayangnya, pihak Mendagri sendiri tidak mau memberikan bantuan. Akhirnya, polisi lokal bekerja sama dengan seorang bisnisman menangkap wartawan ini. Seorang tak dikenal, memasukkan uang senilai US \$ 6.000 ke dalam mobil reporter tersebut. Polisi kemudian datang dan menahannya dengan tuduhan perampokan.<sup>4</sup> Banyak jurnalis yang kemudian terpaksa memakai nama samaran agar terhindar dari kejaran pemerintah. Wartawan-wartawan yang termasuk “berani” seperti halnya contoh diatas, sebagian besar mengakhiri karirnya dibalik jeruji penjara.

---

<sup>4</sup> ICG Asia Report No.21, 21 Agustus 2001, “*Uzbekistan at Ten : Repression and Instability*” dalam <http://www.crisisweb.com>

### III.3. Persaingan Antar Etnis dan Jaringan *Patronage* di Uzbekistan

Periode pemerintahan Uni Soviet, melalui kebijakan Rusifikasi dan Sovietisasinya, telah melakukan banyak hal dalam membentuk dan mengembangkan kesadaran nasional masyarakat Uzbek, serta suku-suku lain diluar Uzbek, sebagai bagian dari nasion Soviet. Dibawah payung sosialisme ini, semua diatur dan diarahkan hingga menjadi sebuah konfigurasi yang unik selama lebih dari tujuh puluh tahun. Namun seiring dengan perubahan peta politik dunia yang terjadi di akhir Perang Dingin, maka kondisi ini pun ikut berubah.

Berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet, turut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat negeri Tirai Besi. Suku-suku yang selama ini hidup dibawah kontrol dan kendali pemerintah Soviet mulai bergolak. Di Uzbekistan, orang-orang Rusia yang sejak awal dikucilkan oleh masyarakat setempat, sebagian memilih untuk kembali ke negeri asalnya.<sup>1</sup> Dan meskipun sisanya tetap tinggal di Uzbekistan, mereka masih mengalami nasib yang sama. Etnis Rusia saat ini hanya berjumlah 3,4 % dari seluruh penduduk Uzbekistan.

Selain para imigran Rusia, peristiwa kekerasan etnis di Uzbekistan juga terjadi antara pogrom (penduduk lokal) dengan orang-orang Turki-Meskhethian. Bangsa Turki keturunan Meskhethian ini sebelumnya telah dideportasi ke Asia Tengah (tepatnya ke daerah sekitar Lembah Ferghana) dari tempat asalnya, Kaukasus, sejak tahun 1944 oleh pemerintahan Stalin. Kasus pembunuhan terhadap etnis Turki-

---

<sup>1</sup> KOMPAS, 15 Maret 1993



Meskhethian ini terjadi pada awal tahun 1990-an, yang bermula dari percekocokan dan perseteruan antara kedua etnis tersebut. Orang-orang Turki Meskhethian banyak yang dibunuh karena mereka dianggap seenaknya menaikkan harga barang di pasar lokal. Selain itu, peristiwa ini turut dipicu oleh adanya persepsi yang beredar dikalangan masyarakat bahwa Meskhethian lebih baik dibanding Uzbek.<sup>2</sup> Oleh karena itulah mereka merasa berhak untuk meningkatkan kekuatannya di pasar-pasar lokal.

Daerah lain yang beresiko tinggi terhadap kekerasan maupun perang antar etnis adalah area di sekitar Samarkand dan Bukhara, yang sebagian besar penduduknya terdiri atas etnik Tajik. Meskipun tidak ada permintaan pada pemerintah agar wilayah ini dikhususkan untuk etnis Tajik, namun klaim itu tetap ada. Oleh karena itulah budaya, bahasa, dan identitas Tajik yang ada disana ditindas habis-habisan oleh pemerintah Uzbek di era Soviet. Dan meskipun demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan diawal kemerdekaan Uzbekistan menuntut pengakuan atas budaya nasional Tajik, pemerintah hanya memberikan sedikit ruang gerak bagi bangsa Tajik. Posisi orang-orang Tajik sendiri makin lama semakin terpojok seiring dengan meletusnya perang sipil di Tajikistan. Akibat dari perang tersebut, banyak sekali suku Tajik yang semula tinggal di Tajikistan mengungsi ke saudaranya yang ada di Uzbekistan.<sup>3</sup> Namun pemerintah Uzbek secara tegas menolak menerima pengungsi dari Tajikistan dan bahkan langsung memutuskan semua hubungannya

---

<sup>2</sup> ICG Asia Report Np.21, 21 Agustus 2001, "Uzbekistan at Ten : Repression and Instability" dalam <http://www.crisisweb.org>

<sup>3</sup> Loc. Cit



dengan Tajikistan. Perang sipil di Tajikistan membuat aspirasi bangsa Tajik semakin melemah. Dan dalam usaha untuk membangun identitas etnik yang lebih homogen di Uzbekistan, serta mencegah kemungkinan munculnya nasionalisme dikalangan bangsa Tajik, pemerintah Uzbek telah menghancurkan buku-buku yang ditulis dalam bahasa Tajik yang dianggap menyimpang dari ideologi nasional Uzbek. Hubungan antara pemerintah Uzbek dengan etnik Tajik semakin memburuk ketika pemerintah menggelar operasi keamanan yang dilakukan untuk mencegah serangan kelompok Islam militan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebanyak 73 orang etnis Tajik di Distrik Sariasiya, Propinsi Surkhandarya, telah dipenjara selama 3 sampai 18 tahun pada bulan Juni 2001 karena dituduh berkolaborasi dengan *IMU*.<sup>4</sup>

Ketegangan terjadi juga pada etnis Uzbek. Pada bulan Maret 2001, sekitar 50 orang etnis Uzbek yang berwarga negara Tajik dan tinggal di Uzbekistan di deportasi ke perbatasan Tajik, dimana pihak yang berwenang di Tajikistan menolak untuk menerimanya. Suku Uzbek ini kemudian melarikan diri ke propinsi Surkhandarya selama terjadinya perang sipil di Tajikistan, dan pemerintah Uzbek percaya bahwa kedekatan mereka dengan perbatasan Tajik dapat memfasilitasi kolaborasi antara *IMU* dan warga negara Tajikistan. Sebuah laporan yang mencatat tentang insiden ini mengungkapkan bahwa hal ini mungkin saja akan menjadi sebuah pertandadimulainya kampanye ke luar negeri yang memaksa keluar orang-orang Uzbek yang menjadi warga negara Tajikistan. Deportasi terhadap kelompok-

---

<sup>4</sup> KOMPAS, 16 Juli 2001



kelompok yang dicurigai ini hampir sama dengan kebijakan yang dikeluarkan Stalin dalam mendeportasi suku Chechen, Korea, Tatar, dan etnis-etnis lain selama periode Soviet. Tindakan-tindakan represif ini, yang jauh dari usaha-usaha pemulihan keamanan, hanya akan menyalakan api perlawanan diantara suku-suku Uzbek dan Tajik terhadap pemerintah Uzbekistan.

Selain mayoritas suku Uzbek yang tinggal di Uzbekistan, minoritas suku Uzbek lainnya juga hidup di negara-negara tetangga. Perkiraan menyebutkan bahwa sebanyak 2,5 juta etnis Uzbek ada di Osh dan propinsi Jalalabad, Kyrgystan. Mereka juga ada di daerah Shinkent dan Jambil, Kazakhstan. Selain itu mereka turut pula menempati Propinsi Sughel dan daerah Hisar di Tajikistan, serta wilayah oase Tazhaus dan Charjev di Turkmenistan. Untuk mencegah perjalanan bebas ke Uzbekistan, maka pemerintah Uzbek melakukan perubahan visa yang aturannya selalu mengalami perubahan dan menyesuaikan hukum yang berlaku di perbatasan. Penduduk di selatan Kyrgystan tidak boleh memasuki daerah teritorial Uzbekistan lebih dari 100 km. Dan untuk memperoleh visa Uzbekistan agar bisa bepergian ke Tashkent (sekitar 400 km dari Osh), mereka harus bepergian melalui jalan darat selama 15 jam (hanya ada satu jalan ke sana) ke kedutaan Uzbekistan di Bishkek.

Selama perang sipil di Tajikistan, pengungsi Uzbek yang melarikan diri ke Uzbekistan ditolak kewarganegaraannya dan dituduh menetap secara ilegal. Aktivis HAM di Jalalabad dan propinsi Osh di Kyrgystan mengeluhkan penculikan warga negara Kyrgys yang merupakan etnis Uzbek di Kyrgys oleh Dinas Keamanan nasional Uzbekistan (*Uzbek National Security Service*) dan mereka ditransfer secara



diam-diam ke Uzbekistan. Sebuah organisasi HAM di Jalalabad mengatakan pada ICG bahwa selama tahun 1999 minimal ada 4 orang warga negara Kyrgys diculik dan mungkin sekarang telah dikirim ke penjara selama 12 sampai 16 tahun di Uzbekistan. Kepala Jaksa Penuntut Umum di Uzbekistan keberatan atas permintaan Kyrgystan atas permohonannya untuk mengembalikan warga negara ilegal tersebut yang dilakukan oleh orang-orang Uzbek.<sup>5</sup>

Selain berbagai kerusuhan etnis dan *pressure-pressure* pemerintah yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat Uzbekistan pasca kemerdekaan, jaringan *patronage* juga semakin marak beredar di kalangan rakyat. Jaringan perlindungan ini (yang juga ada di Rusia) merupakan jaringan kriminal terkuat di Uzbekistan. Para pejabat, pembesar, pengusaha, serta konglomerat dinegeri ini pada umumnya mempunyai jaringan perlindungan yang terdiri dari kelompok-kelompok mafia agar terhindar dari jeratan hukum.<sup>6</sup> Eksistensi jaringan-jaringan ini, telah meruntuhkan gerakan pembaharuan politik nasional dan dipihak lain, ia justru digunakan Moskow untuk kembali menggunakan kontrolnya.

Munculnya jaringan *patronage*, secara tidak langsung turut pula menumbuhkan suburkan budaya korupsi dan nepotisme. Para pejabat yang telah memperoleh kekebalan hukum akan lebih leluasa lagi mengeruk kekayaan negara dengan mengikutsertakan keluarga dan teman-temannya. Sistem nepotisme ini dapat

<sup>5</sup> Muhammad Salih, "Secret and Deceptive Information in Uzbekistan" dalam <http://www.Uzbekistanerk.org/s12en010603>

<sup>6</sup> KOMPAS, 8 Oktober 2001



dijumpai mulai dari bawah hingga pucuk pimpinan elit-elit politik serta ekonom-ekonom negara. Kasus skandal gubernur propinsi Samarkand yang diungkap oleh sebuah media mencerminkan betapa mengakarnya budaya ini. Gubernur Propinsi Samarkand, menempatkan saudara laki-lakinya pada jabatan Kepala Departemen Dalam Negeri di Distrik Narpay, keponakannya sebagai Kepala *State Automobile Inspection* di Distrik Kattaqorghan, dan saudaranya yang lain sebagai jaksa di Distrik Istikhan. Lebih jauh lagi, ia juga memposisikan 3 orang kerabatnya dalam Dinas Perpajakan di Distrik Kattaqorghan. Totalnya, lebih dari 20 keluarga dan teman-teman dekatnya menikmati jabatan gubernur tersebut.<sup>7</sup>

Nepotisme dan korupsi, selalu saja berkaitan erat. Demikian pula dengan jabatan dan bisnis. Iklim bisnis di Uzbekistan dijalankan oleh orang-orang yang punya hubungan baik dengan mereka yang duduk di pemerintahan. Loyalitas kepada presiden adalah syarat utama bagi promosi jabatan dan peningkatan karir di segala sektor kehidupan, termasuk pula didalamnya sektor ekonomi. “ Kami tidak akan dapat menemukan orang luar disegala macam bisnis. Kita semua punya pelindung di pegawai-pegawai kepresidenan ataupun menteri-menteri dalam kabinet. Saya memiliki seorang saudara ipar di Dinas Perpajakan Tashkent yang menolong saya untuk mencari pekerjaan di *Privatisation Department of Tashkent City Mayor's Office*”. Demikian kata seorang pemuda yang datang ke Tashkent dari Osh beberapa tahun yang lalu dan sedang mengurus pembelian rumah seharga \$ 50.000 dan sebuah

---

<sup>7</sup> KOMPAS, 10 Juli 2002

mobil *Daewoo Nexia* baru seharga \$ 4.000 meskipun gajinya per bulan hanya \$ 15 saja.<sup>8</sup>

Dari berbagai peristiwa diatas dapat dilihat bahwasanya reformasi yang dilakukan Karimov, dalam bidang apapun, dapat dikatakan sebagai reformasi yang semu karena pada dasarnya ia tidak melakukan perubahan apapun. Hal ini terbukti dari kondisi sosial masyarakat Uzbekistan yang tak satupun mengalami perubahan sejak berpisah dari Soviet. Janji akan mewujudkan "masa depan yang cerah" bagi Uzbekistan tampaknya hanya sekedar retorika belaka.

---

<sup>8</sup> *ICG Asia Report No.63, 18 Pebruari 2003 "Uzbekistan Reform Program : Illusion or Reality"*  
dalam <http://www.crisisweb.org>



## BAB V

### KESIMPULAN

Republik Uzbekistan dibentuk sebagai suatu kesatuan politik oleh pemerintah Bolshevik di Moskow pada tahun 1924 sesuai kebijakan pembatasan nasional yang memecah Asia Tengah secara etnis berdasarkan unit-unit administratif. Selanjutnya Uzbekistan menjadi bagian dari Republik Sosialis Uni Soviet yang mempunyai wilayah terluas ke-5 dengan komunitas muslim terbesar dari seluruh republik yang ada. Uzbekistan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1991, 4 bulan sebelum Uni Soviet resmi membubarkan diri.

Setelah proklamasi kemerdekaan Uzbekistan dikumandangkan, maka yang terjadi selanjutnya adalah era turbulensi yang penuh diwarnai dengan kekacauan dan kerusuhan sosial. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan Partai Komunis, maka partai-partai politik dan berbagai kelompok aktivis lain mulai muncul meramaikan panggung percaturan politik dalam negeri yang semakin marak sejak periode reformasi glasnost dan perestroika yang digulirkan Gorbachev. Ada sebuah harapan besar bahwa proklamasi kemerdekaan Uzbekistan akan membawa pluralisme politik dan kehidupan ekonomi yang lebih baik.

Di awal kemerdekaan Uzbekistan, negara ini dipimpin oleh Presiden Islam Karimov yang memulai karir politiknya sejak tahun 1989 dimana ia menjabat sebagai Sekretaris I Partai Komunis Uzbekistan. Sejak awal, ia mendukung upaya pemisahan Tashkent dengan Moskow. Di bawah kepemimpinannya, Partai Komunis Uzbekistan



mengadopsi isu-isu baru yang sedang berkembang dan mewujudkannya dalam program budaya nasionalis, seperti menjadikan bahasa uzbek sebagai bahasa negara, mencabut pelarangan terhadap hukum-hukum Islam, serta menumbuh kembangkan budaya nasional dan berbagai tradisi lokal.

Islam Karimov menjadi presiden pertama Uzbekistan yang terpilih pada pemilu bulan Desember 1991. Dan pada tahun 1992, Karimov mulai mengadopsi dan menerapkan kebijakan otoritarianisme yang semula ingin dirubahnya. Sejak saat itu Karimov melakukan penyerangan terhadap partai-partai politik yang baru saja berdiri, mengebiri kebebasan pers, dan menangkap serta memenjarakan tokoh-tokoh keagamaan. Selain itu ia juga kembali memegang kontrol penuh terhadap kekuasaan negara yang diwujudkan dalam pembentukan Dinas Keamanan Negara.

Kegagalan Karimov dalam melakukan reformasi dalam negeri, baik itu dibidang ekonomi, sosial, maupun politik, sebenarnya merupakan pukulan telak bagi Uzbekistan yang tengah berada dalam proses transisi menuju suatu pemerintahan demokrasi yang sangat berbeda dengan era Soviet sebelumnya. Kegagalannya ini turut pula memicu ketidakpercayaan badan-badan ekonomi dunia yang berada di Uzbekistan untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian. Begitu juga dengan investor-investor asing yang menanamkan modalnya di negeri ini. Dan selama ini, Uzbekistan masih mengandalkan bantuan dari Rusia serta negara-negara anggota CIS lainnya, untuk mengatur jalannya roda perekonomian negara serta untuk membantu menangani kelompok-kelompok radikal yang ingin menggulingkan pemerintah Uzbekistan.



Peristiwa serangan terorisme yang dilancarkan pada tanggal 11 September 2001 yang lalu, sungguh membawa perubahan yang besar bagi kehidupan ekonomi dan keamanan Uzbekistan. Semenjak Amerika merambah negeri yang kaya akan kapas ini dalam konteks memerangi isu terorisme, kondisi perekonomian Uzbekistan mulai pulih. Amerika telah mengucurkan dana bantuan sebesar milyaran dolar ke Uzbekistan dan tetap menempatkan sebagian pasukannya di Uzbekistan untuk membantu tentara Uzbek dalam menghadapi serangan kelompok Islam radikal.

Perubahan kebijakan luar negeri yang diambil Uzbekistan, yaitu yang awalnya condong pada Rusia hingga kemudian beralih ke Amerika, lebih banyak mengarah pada bantuan ekonomi serta keamanan yang dinilai lebih besar jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rusia sendiri, pasca disintegrasi Uni Soviet, lebih banyak disibukkan oleh permasalahan-permasalahan dalam negeri yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, seperti tingginya angka kriminalitas, merosotnya GNP secara tajam, dan lain sebagainya. Keputusan Presiden Uzbekistan Islam Karimov yang bersedia menjalin kerja sama dengan Amerika dalam konteks memerangi terorisme ini merupakan salah satu usaha untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai *top leader* dalam panggung percaturan politik di Uzbekistan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Akiner, Shirin, 1996, *Between Development and Destruction : An Equiry Into The Causes of Conflict*, London : Mac millan Press
- Al-Wakil, Muhammad Sayyid Dr. , 1998, *Wajah Dunia Islam dari Dinasti Bani Umayyah hingga Imperialisme Modern*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar
- Armstrong, Karen, 2002, *ISLAM : Sejarah Singkat*, Yogyakarta : Penerbit Jendela
- Badan Penerbit UNEJ, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember
- Bakri, Umar Surya, 1997, *Ekonomi Politik Internasional*, Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jayabaya
- Budiman, Arief Dr., 1996, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Chomsky, Noam, 2001, *Maling Teriak Maling : Amerika Sang Teroris*, Bandung : Mizan
- Coplin, William D dan Marsedes Marbun, 1992, *Pengantar Politik Internasional*, Bandung : CV. Sinar Baru Offset
- Dougherty, James dan Robert Pfaltzgraff, Jr. , 1997, *Contending Theories of International Relations*, New York : Longman
- Ensiklopedi Umum*, 1984, Yogyakarta : Penerbit Yayasan Kanisius
- Ensiklopedia Islam Indonesia*, 1992, Jakarta : Penerbit Djambatan
- Ensiklopedi Islam*, 1994, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Frankel, Joseph, 1980, *Hubungan Internasional*, Jakarta : Aris Sungguh Bersaudara
- The Liang Gie, 1984, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, Yogyakarta : UGM Press



- Hadi, sutrisno, 1984, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset
- Hanafi, Hassan, 2001, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Penerbit Jendela
- Huntington, Samuel P. , 1996, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta : Qalam
- Jundi, Anwar, 1994, *Islam Setelah Komunis*, Jakarta : Gema Insani Press
- Kolarz, Walter, 1994, *Komunisme dan Kolonialisme*, Surabaya : Usaha Nasional
- Mas' oed, Mohtar Dr., 1994, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta : LP3ES
- Mc Cleland, Charles A., 1986, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, Jakarta : Rajawali Press
- Menashri, David, 1998, *Central Asia Meets The Middle East*, London : Frank Cass Publishers
- Nye, Joseph S. Jr., 1992, *Memimpin Dunia : Sifat Kekuatan Amerika yang Berubah*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Plano, J. C. Robert E. R. dan Helena S. Robin, 1985, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta : Rajawali
- Romli, Asep Syamsul M., S.IP, *Demonologi Islam : Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, Jakarta : Gema Insani Press
- Surakhmad, Winarno, 1994, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung : Tarsito
- Susanto, Dwi dan Zainuddin Djafar, 1990, *Perubahan Politik di Negara-negara Eropa Timur*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Warsito, Tulus, 1998, *Teori-teori Politik Luar Negeri : Relevansi dan Keterbatasannya*, Yogyakarta, Biograff Publishing
- Worldmark Encyclopedia of The Nations*, 1971, New York, Worldmark Press. L.td
- Yakan, Fathi, 1991, *ISLAM : Ditengah Persekongkolan Musuh Abad 20*, Jakarta : Gema Insani Press

### **Artikel dan Publikasi**

Analisa CSIS no. 7 / Th XIII / Juli 1984  
Jurnal Politik dan Dakwah Al-Wa'ie no. 7 / Th I / 1-31 Maret 2001  
HAI no. 37 / XV / 10 September 1992  
KOMPAS, 22 Juli 1992  
KOMPAS, 23 Juli 1992  
KOMPAS, 24 Juli 1992  
KOMPAS, 12 Maret 1993  
KOMPAS, 9 April 1995  
KOMPAS, 16 April 2001  
KOMPAS, 31 Maret 2001  
KOMPAS, 16 Juli 2001  
KOMPAS, 5 Oktober 2001  
KOMPAS, 6 Oktober 2001  
KOMPAS, 7 Oktober 2001  
KOMPAS, 10 Januari 2002  
KOMPAS, 26 Januari 2002  
KOMPAS, 28 Januari 2002  
KOMPAS, 10 Juli 2002  
Suara Hidayatullah edisi 02 / Th VI / Juni 1993  
Suara Hidayatullah edisi 01 / Th VII / Mei 1994

### **Website**

- ◆ **Press Release "Uzbekistan : 11 years of Independence"**  
(<http://www.Uzbekistanembassy.uk.net/main/press/texts/independence.htm>  
diakses tanggal 23 Agustus 2002)
- ◆ **"Silencing Central Asia : The Voice of Dissident"**  
JOINT HEARING before the SUBCOMMITTEE ON INTERNATIONAL OPERATIONS and HUMAN RIGHTS AND SUBCOMMITTEE ON THE MIDDLE EAST and SOUTH ASIA of the "COMMITTEE ON INTERNATIONAL RELATIONS HOUSE OF REPRESENTATIVES 107<sup>th</sup> CONGRESS"  
([http://www.House.gov/international\\_relations](http://www.House.gov/international_relations)  
diakses tanggal 23 Agustus 2002)
- ◆ **Turaev, Faruk, 2002, "Uzbekistan : There's No Place Like Home"**  
(<http://www.eurasiainet.org/department/insight/articles/cav081102.shtml>  
diakses tanggal 15 Agustus 2002)



- ◆ Blua, Antoine, 2002, "**Central Asia : Militarization Could Come at Cost of Regional Stability**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav090702.shtml>)  
diakses tanggal 9 September 2002)
- ◆ Human Rights Watch Press Release, 2002, "**U.S. Strengthens Human Rights Effort on Uzbekistan**"  
(<http://www.hrw.org>)  
diakses tanggal 11 September 2002)
- ◆ Fitzpatrick, Catherine, 2002, "**Is The Human Rights Situation in Eurasia Worse Since 11 September ?**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav091202.shtml>)  
diakses tanggal 15 September 2002
- ◆ Eshanova, Zamira, 2002, "**Uzbek Government Seeks To Improve Human Rights Image, But Some Questions Motives**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav082602.shtml>)  
diakses tanggal 15 September 2002)
- ◆ Simes, Dimitri, 2001, "**What War Means**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav092101.shtml>)  
diakses tanggal 15 September 2002)
- ◆ Torbakov, Igor, 2002, "**Trend Towards Political Confrontation In Central Asian States Accelerating Since 11 September**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav032602.shtml>)  
diakses tanggal 15 September 2002)
- ◆ Cohen, Ariel, 2002, "**U.S. Officials Relying on Engagement Strategy to Promote Change in Central Asia**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav111402.shtml>)  
diakses tanggal 21 September 2002)
- ◆ Donovan, Jeffrey, 2002, "**Central Asia : Verdict Still Out on U.S. Engagement Policy**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav112402.shtml>)  
diakses tanggal 27 November 2002)
- ◆ Press Service of The President of The Republic of Uzbekistan, "**Constitution of The Republic of Uzbekistan**"  
([http://www.pres.service.uz/eng/pressa\\_eng/pressa\\_eng9.html](http://www.pres.service.uz/eng/pressa_eng/pressa_eng9.html))



diakses tanggal 27 November 2002)

- ◆ *The Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, "Uzbekistan : Country Report on Human rights Practices-2001"*  
(<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8366.htm>  
diakses tanggal 27 November 2002)
- ◆ Blagov, Sergei, 2002, "**Karimov Comes To The United States Seeking More Assistance and Investment**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/business/articles/eav031102.shtml>  
diakses tanggal 29 November 2002)
- ◆ Polat, Andumannob, 2002, "**Uzbekistan : What Policy Must The U.S. Have ?**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav030902.shtml>  
diakses tanggal 3 Desember 2002)
- ◆ Eshanova, Zamira, 2002, "**Karimov Moves To Bolster Authoritarian Rule in Uzbekistan**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav120702.shtml>  
diakses tanggal 11 Desember 2002)
- ◆ Apelbaum, Alex, 2002, "**U.S. Congress Consider Steps to Keep Internet Open In Countries With Repressive Government**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav102302.shtml>  
diakses tanggal 11 Desember 2002)
- ◆ Aliyev, Kenan, 2002, "**Karimov Maintain Low Profile During U.S. Visit**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav031302.shtml>  
diakses tanggal 11 Desember 2002)
- ◆ Cohen, Ariel, 2002, "**U.S. Officials Give High Marks to Karimov on Washington Visit**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav031802.shtml>  
diakses tanggal 11 Desember 2002)
- ◆ Alibekov, Ibrahim, 2002, "**IMU Reportedly Expands, Prepares to Strike Western Targets**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav102902.shtml>  
diakses tanggal 27 Desember 2002)
- ◆ Eshanova, Zamira, 2002, "**Central Asia : Are Radical Group Joining Forces ?**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav101102.shtml>



diakses tanggal 27 desember 2002)

- ◆ McConnel, Artic, 2002, "**Islamic Radical Regroup in Central Asia**"  
([http://www.eurasianet.org/department\\_insight\\_articles/eav051502.shtml](http://www.eurasianet.org/department_insight_articles/eav051502.shtml))  
diakses tanggal 13 November 2002)
- ◆ ICG Central Asia Briefing Paper, 2001, "**Central Asian Perspectives on 11 September and The Afghan Crisis**"  
(<http://www.crisisweb.org>)  
diakses tanggal 13 November 2002)
- ◆ Synovit, Ron, 2002, "**Uzbekistan : Little Progress Seen In Agricultural Reform**"  
(<http://www.rferl.org>)  
diakses tanggal 13 November 2002)
- ◆ Blua, Antoine, 2002, "**Tashkent Moves Toward Unifying Currency Rates**",  
([http://www.eurasianet.org/department\\_insight\\_articles/eav042802.shtml](http://www.eurasianet.org/department_insight_articles/eav042802.shtml))  
diakses tanggal 13 November 2002)
- ◆ Annonymous, 2002, "**Tamerlane vs. Marx**"  
(<http://www.Bullatomsci.org>)  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)
- ◆ ICG Asia Report No.31, tanggal 18 Pebruari 2003, "**Uzbekistan Reform Program : Illusion or Reality ?**"  
(<http://www.crisisweb.org>)  
diakses tanggal 3 Mei 2003)
- ◆ Ibragimov, Zakirjan, 2002, "**Ferghana Valley's Unemployed Feed A Thirsty Russian Labor Market**"  
([http://www.eurasianet.org/department\\_insight\\_articles/eav100302.shtml](http://www.eurasianet.org/department_insight_articles/eav100302.shtml))  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)
- ◆ ICG Asia Report No.26, tanggal 27 November 2001, "**Afghanistan and Central Asia : Priorities For Reconstruction and Development**"  
(<http://www.crisisweb.org>)  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)
- ◆ ICG Asia Report No.21, tanggal 21 Agustus 2001, "**Uzbekistan at Ten : Repression and Instability**"  
(<http://www.crisisweb.org>)  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)



- ◆ Pannier, Bruce, 2002, "***Uzbekistan : Right Groups Say Press Crackdown Underway***"  
(<http://www.rferl.org>  
diakses tanggal 12 Januari 2003)
- ◆ Salih, Muhammad, 2002, "***Secret and Deceptive Information in Uzbekistan***"  
(<http://www.uzbekistanerk.org/s12en010603.html>  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)
- ◆ ***Uzbekistan Amnesty International Report 2002***  
(<http://www.amnesty.org>  
diakses tanggal 10 Januari 2003)
- ◆ Blua, Antoine, 2002, "***Uzbekistan : Case Highlights Plight of Religious Minorities in Central Asia***"  
(<http://www.eurasianet.org/departement/insight/articles/eav110902.shtml>  
diakses tanggal 13 Desember 2002)
- ◆ —, 2000, "***The Truth About Celebrating The Independence of Uzbekistan***"  
(<http://www.khilafah.com>  
diakses tanggal 13 Oktober 2002)
- ◆ —, "***President Islam Karimov : The Avowed Leader of the 21<sup>st</sup> Century***"  
([http://www.ucas.org/english/enlibrary/lib\\_18\\_12\\_02.htm](http://www.ucas.org/english/enlibrary/lib_18_12_02.htm)  
diakses tanggal 13 Oktober 2002)
- ◆ Eshanova, Zamira, 2002, "***Central Asia : Increase in Polygamy Attributed to Economic Hardship Return***"  
(<http://www.eurasianet.org/departement/insight/articles/eav102002.shtml>  
diakses tanggal 13 November 2002)
- ◆ Stobdan, Piere, 2002, "***Central Asia in Geo-Political Transition***"  
(<http://www.idsa-india.org>  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)
- ◆ Pannier, Bruce, 2001, "***Central Asia : Ten Years After***"  
([http://www.rferl.org/ncu/features/1997\\_04/P.RU.970416155006.html](http://www.rferl.org/ncu/features/1997_04/P.RU.970416155006.html)  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)
- ◆ Laroni, Nereo, 1998, "***Uzbekistan : A Difficult Transition***"  
(<http://www.marcopolo.org>  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)



- ◆ Polat, Ibrahim, 2002, "**Central Asia : Border Disputes Increase Potential For Conflict**"  
(<http://www.worldnews.com>  
diakses tanggal 14 Maret 2002)
- ◆ Eshanova, Zamira, 2002, "**History of Uzbekistan**"  
(<http://www.uzbekistan.org>  
diakses tanggal 22 Juli 2002)
- ◆ Rashidov, Sharif, 2002, "**Uzbek Devices Economic Reform Plan**"  
(<http://www.uzhond.uz/2002/February/12-09.htm>  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)
- ◆ *Press Service of The President of The Republic of Uzbekistan*, 2002, "**The Uzbek Model of Economic Reform : Ten Years of Transition**"  
([http://www.press-service.uz/eng/press\\_eng/pressa\\_eng9.htm](http://www.press-service.uz/eng/press_eng/pressa_eng9.htm)  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)
- ◆ Carlson, Charles, 2003, "**Think-Tank Report : Uzbekistan Must Reform or Face Upheaval**"  
(<http://www.eurasianet.org/departmennt/rights/articles/eavf022103.shtml>  
diakses tanggal 3 Januari 2003)
- ◆ Pannier, Bruce, 2001, "**Uzbekistan : The Changing Role of The 'Marhalla'**"  
(<http://www.rfert.org/nca/features/2001/04/20042001102506.asp>  
diakses tanggal 12 Oktober 2002)
- ◆ Salih, Muhammad, 2002, "**Another Victim of the President Karimov's Regime Tortured**"  
(<http://www.muslimuzbekistan.com/eng/ennews/2002/03/ennews14032002.html>  
diakses tanggal 29 Oktober 2002)
- ◆ *ICG Asia Report No. 31*, tanggal 6 Juli 2002, "**Central Asia : Drugs and Conflict**"  
(<http://www.crisisweb.org>  
diakses tanggal 18 Juli 2002)
- ◆ *ICG Asia Report No.35*, tanggal 15 Juli 2002, "**The IMU and the Hizb-ut-Tahrir : Implications of Afghanistan Campaign**"  
(<http://www.crisisweb.org>  
diakses tanggal 18 Juli 2002)

- ◆ Eshanova, Zamira, 2002, "**Uzbekistan : Merchants, Consumers Paying High Price For The Presidential Decrees**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav080102.shtml>  
diakses tanggal 3 Pebruari 2002)
- ◆ Turacv, Faruk, 2002, "**Uzbekistan : Death at The Border**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav090202.shtml>  
diakses tanggal 24 agustus 2002)
- ◆ Blua, Antoine, 2002, "**Central Asia : Challenges to Civic Education Remain**"  
(<http://www.eurasianet.org/department/insight/articles/eav101402.shtml>  
diakses tanggal 30 November 2002)
- ◆ Yakubov, Tolib, 2001, "**IMU (Islamic Movement of Uzbekistan)**"  
(<http://www.cns.mns.edu/research/wtcol/imu.htm>  
diakses tanggal 30 November 2002)
- ◆ —, 2000, "**Uzbekistan : The World Factbook 2000**"  
(<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uz.html>  
diakses tanggal 22 Juli 2002)
- ◆ —, 2000, "**UNDP Uzbekistan : Human Development Report**"  
(<http://www.cer.uz/NHHR/2000/2000-e.htm>  
diakses tanggal 22 Juli 2002)
- ◆ —, 2000, "**Uzbekistan : The Rhetoric of Human Rights Committee**"  
(<http://www.amnesty.org>  
diakses tanggal 30 November 2002)
- ◆ —, 2000, "**Central Asia : No Excuses For Escalating Human Rights Violation**"  
(<http://www.amnesty.org>  
diakses tanggal 30 November 2002)
- ◆ ICG Asia Report No.20, 4 Juli 2001, "**Central Asia : Fault Lines in The New Security Map**"  
(<http://www.crisisweb.org>  
diakses tanggal 30 November 2002)
- ◆ —, 2001, "**Uzbek Government Seen As Increasingly Repressive**"  
([http://www.rferl.org/welcome/english/release/2001/03/30\\_300301.html](http://www.rferl.org/welcome/english/release/2001/03/30_300301.html)  
diakses tanggal 22 Juli 2002)



- ◆ Brown, Bess, 2002, "**Presidential Election in Uzbekistan**"  
([http://www.rferl.org/welcome/english/release/2002/01/24\\_240102.html](http://www.rferl.org/welcome/english/release/2002/01/24_240102.html)  
diakses tanggal 22 Juli 2002)
- ◆ Cavannaugh, Cassandra, 1992, "**Crackdown on The Opposition in Uzbekistan**"  
([http://www.rferl.org/welcome/english/release/1992/06/31\\_310692.html](http://www.rferl.org/welcome/english/release/1992/06/31_310692.html)  
diakses tanggal 22 Juli 2002)
- ◆ *The International Journal of not for-profit- Law*, vol.2 No.2, "**New Law in Uzbekistan : Law on Non-Governmental, Non-Commercial Organization**"  
([http://www.ncnl.org/journal/vol2i252/cc\\_nis.htm](http://www.ncnl.org/journal/vol2i252/cc_nis.htm)  
diakses tanggal 30 November 2002)
- ◆ Starr, Frederick, 2001, "**Making Eurasia Stable**"  
(<http://www.eurasianet.org/departement/insight/articles/eav030501>  
diakses tanggal 22 Juli 2002)
- ◆ —, 2000, "**Republic of Uzbekistan : Election of Deputies to The Oliy Majlis**"  
(<http://www.osce.org/odhr/election/uzboo-1-final.htm>  
diakses tanggal 30 November 2002)
- ◆ Ilkhamov, Alisher, 2000, "**A Bicameral Parliament for Uzbekistan**"  
(<http://www.eurasianet.org/departement/insight/articles/eav062200.shtml>  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)
- ◆ Abdullaev, Evgenii, 1997, "**Islam and The Islamic Factor in Contemporary Uzbekistan**"  
([http://www.cac.org/journal/12\\_1997/st\\_12\\_abdullaev.shtml](http://www.cac.org/journal/12_1997/st_12_abdullaev.shtml)  
diakses tanggal 24 Agustus 2002)
- ◆ Polat, Abdurrahim, 1999, "**Birlik Against President Karimov's Ruthless Statement**"  
(<http://www.birlik.net/appeal/baysap99.html>  
diakses tanggal 22 Juli 2002)
- ◆ Yakvalhodjayev, Furkat, 2000, "**Uzbekistan : In Spite of Public Outcry Journalist Remains Imprisoned**"  
(<http://www.rferl.org/ncr/features/2000/03/F.R11000302144118.htm>  
diakses tanggal 22 Juli 2002)







# CONSTITUTION

Constitution of State Symbols

## Constitution of the Republic of Uzbekistan

### CONTENT

Law of the Republic of Uzbekistan ON THE ADOPTION OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Law of the Republic of Uzbekistan PROCLAIMING THE DATE OF ADOPTION OF THE NEW CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN A NATIONAL HOLIDAY

Law of the Republic of Uzbekistan ON THE PROCEDURE FOR PUTTING THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTO FORCE

PREAMBLE

- Chapter 1: State Sovereignty
- Chapter 2: Democracy
- Chapter 3: Supremacy of the Constitution and the Law
- Chapter 4: Foreign Policy

**Part two**

**BASIC HUMAN AND CIVIL RIGHTS, FREEDOMS AND DUTIES**

- Chapter 5: General Provisions
- Chapter 6: Citizenship
- Chapter 7: Personal Rights and Freedoms
- Chapter 8: Political Rights
- Chapter 9: Economic and Social Rights
- Chapter 10: Guarantees of Human Rights and Freedoms
- Chapter 11: Duties of Citizens

**Part three**

**SOCIETY AND THE INDIVIDUAL**

- Chapter 12: The Economic Foundation of Society
- Chapter 13: Public Associations
- Chapter 14: Family
- Chapter 15: Mass Media

**Part four**

**ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL STRUCTURE AND STATE SYSTEM**



Part five

ORGANIZATION OF STATE AUTHORITY

- Chapter 10. Oily Mejlis of the Republic of Uzbekistan
- Chapter 11. The President of the Republic of Uzbekistan
- Chapter 12. Cabinet of Ministers
- Chapter 13. Fundamental Principles of Local Bodies of State Authority
- Chapter 14. Judicial Authority in the Republic of Uzbekistan.
- Chapter 15. Electoral System
- Chapter 16. Procurator's Office
- Chapter 17. Finance and Crediting
- Chapter 18. Defence and Security

Part six

PROCEDURE FOR AMENDING THE CONSTITUTION

ON THE ADOPTION OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

The Supreme Council of the republic of Uzbekistan has decreed the following

This Draft Constitution of the Republic of Uzbekistan presented by the Constitutional Commission shall be approved as a whole.

The Constitution of the Republic of Uzbekistan shall go into effect on December 8, 1992.

In commemoration of adopting the Constitution of the independent Republic of Uzbekistan, December 8, the day on which the Constitution was adopted, shall be proclaimed a national holiday – the Constitution Day of the Republic of Uzbekistan.

December 8 shall be an official day off.

#### ON THE PROCEDURE FOR PUTTING THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN INTO FORCE

The Supreme Council of the Republic of Uzbekistan has decreed the following:

1. The laws of the Republic of Uzbekistan and other acts passed by bodies of state authority prior to December 8, 1992, shall retain their force as long as they do not oppose to the Constitution of the Republic of Uzbekistan.
2. Until the election of the Oliy Majlis (Supreme Assembly), the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan shall exercise all powers vested in the Oliy Majlis by the Constitution of the Republic of Uzbekistan.  
The Presidium of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan and People's Deputies of the republic of Uzbekistan shall retain their powers until the election of the Oliy Majlis in accordance with the new Law on Elections to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.  
The Constitutional Supervision Committee of the Republic of Uzbekistan shall retain its powers until the adoption of the Law on the Constitutional Court of the republic of Uzbekistan and the election of the Constitutional Court.
3. The Higher Arbitration Court of the republic of Uzbekistan and arbitration courts of the republic of Karakalpakstan and the regions of the Republic of Uzbekistan shall be transformed respectively into the Higher Economic Court of the republic of Uzbekistan and the economic courts of the Republic of Uzbekistan.



these positions are elected or appointed in a prescribed manner.

4. The Cabinet of Ministers, as well as representative, executive and administrative branches of the local authorities shall exercise the powers vested in them by the Constitution of the Republic of Uzbekistan and the legislative acts passed prior to the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan as long as they uphold the Constitution of the Republic of Uzbekistan.

5. Courts, agencies of the Procurator's Office and other state bodies shall exercise the powers vested in them by the Constitution of the Republic of Uzbekistan, and shall be subject to the laws and legislative acts passed prior to the adoption of the present Constitution as long as they uphold the Constitution of the Republic of Uzbekistan.

New appointments of regional, city and district judges shall be made in accordance with the procedure prescribed by the newly-adopted Constitution of the Republic of Uzbekistan.

6. The Presidium of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan shall determine the procedure for bringing the legislation of the Republic of Uzbekistan in conformity with the Constitution of the Republic of Uzbekistan. All the laws envisaged by the Constitution shall be passed within two years. The Presidium of the Supreme Council shall draft the law on relations to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan during 1993 and submit it for a nation-wide discussion.

7. In accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan adopted on December 8, 1992 "Providing the Date of Adoption of the New Constitution of the Republic of Uzbekistan, a National Holiday" (Article 77 in the Code of Labour Laws of the Republic of Uzbekistan after the words "September 1 - Independence Day" shall be supplemented with the words "December 8 - Constitution Day of the Republic of Uzbekistan").

8. The Constitution (Fundamental Law) of the Republic of Uzbekistan of 1978 shall be deemed as having lost its force as of December 8, 1992.

*President of the Republic of Uzbekistan*

I. KARMOV

## PREAMBLE

The people of Uzbekistan,

solemnly declaring their adherence to human rights and principles of state sovereignty aware of their ultimate responsibility to the present and the future generations, relying on historical experience in the development of Uzbek statehood, affirming their commitment to the ideals of democracy and social justice recognizing priority of the generally accepted norms of the international law aspiring to a worthy life for the citizens of the Republic, setting forth the task of creating a humane and democratic rule of law, aiming to ensure civil peace and national accord represented by their plenipotentiary deputies adopt the present Constitution of the Republic of Uzbekistan

## PART ONE

### FUNDAMENTAL PRINCIPLES

#### Chapter 1 State Sovereignty

**Article 1.** Uzbekistan is a sovereign democratic republic. Both names of the state – the Republic of Uzbekistan and Uzbekistan – shall be equivalent.

**Article 2.** The state shall express the will of the people and save their interests. State bodies and officials shall be accountable to the society and the citizens.

**Article 3.** The Republic of Uzbekistan shall determine its national state and administrative-territorial structure its structure of state authority and administration, and shall pursue independent home and foreign policies.



**Article 5.** The Republic of Uzbekistan shall have its **state symbols - the flag, the emblem, and the anthem**, sanctioned by the law.

**Article 6.** The capital of the Republic of Uzbekistan shall be the city of Tashkent.

## Chapter 2 Democracy

**Article 7.** The people are the sole source of state power. State power in the Republic of Uzbekistan shall be exercised in the interests of the people and solely by the bodies empowered therefore by the Constitution of the Republic of Uzbekistan and the laws passed on its basis. Any seizure of powers belonging to state authority, suspension or termination of activity of the bodies of state authority contrary to the procedure prescribed by the Constitution as well as the formation of any new or parallel bodies of state authority shall be regarded as unconstitutional and punishable by law.

**Article 8.** All citizens of the Republic of Uzbekistan, regardless of their nationality, constitute the people of Uzbekistan.

**Article 9.** Major matters of public and state life shall be submitted for a nation-wide discussion and put to a direct vote of the people (a referendum). The procedure for holding referendums shall be specified by law.

**Article 10.** The Oliy Majlis (Supreme Assembly) and President of the Republic, elected by the people, shall have the exclusive right to act on behalf of the people. No section of society, political party, public association, movement or individual shall have the right to act on behalf of the people of Uzbekistan.

**Article 11.** The principle of the separation of power between the legislative, executive and judicial authorities shall underlie the system of state authority in the Republic of Uzbekistan.

**Article 12.** In the Republic of Uzbekistan, public life shall develop on the basis of a diversity of political institutions, ideologies and opinions. No ideology shall be granted the status of state ideology.

**Article 14.** The state shall function on the principles of social justice and legality in the interests of the people and society.

### Chapter 3. Supremacy of the Constitution and the Law

**Article 15.** The Constitution and the laws of the Republic of Uzbekistan shall have absolute supremacy in the Republic of Uzbekistan. The state, its bodies, officials, public associations and citizens shall act in accordance with the Constitution and the laws.

**Article 16.** None of the provisions of the present Constitution shall be interpreted in a way detrimental to the rights and interests of the Republic of Uzbekistan. None of the laws or normative legal acts shall run counter to the norms and principles established by the Constitution.

### Chapter 4. Foreign Policy

**Article 17.** The Republic of Uzbekistan shall have full rights in international relations. Its foreign policy shall be based on the principles of sovereign equality of the states, non-use of force or threat of its use, inviolability of frontiers, peaceful settlement of disputes, non-interference in the internal affairs of other states, and other universally recognized norms of international law.

The Republic may form alliances, join or withdraw from unions and other inter-state organizations proceeding from the ultimate interests of the state and the people, their well-being and security.

## PART TWO

### BASIC HUMAN AND CIVIL RIGHTS, FREEDOMS AND DUTIES

#### Chapter 5. General Provisions



Any privileges may be granted solely by the law and shall conform to the principles of social justice.

**Article 19.** Both citizens of the Republic of Uzbekistan and the state shall be bound by mutual rights and mutual responsibility. Citizens' rights and freedoms, established by the Constitution and the laws, shall be inalienable. No one shall have the power to deny a citizen his rights and freedoms, or to infringe on them except by the sentence of a court.

**Article 20.** The exercise of rights and freedoms by a citizen shall not encroach on the lawful interests, rights and freedoms of other citizens, the state or society.

### Chapter 6 Citizenship

**Article 21.** In the Republic of Uzbekistan, uniform citizenship shall be established throughout its territory. Citizenship in the Republic of Uzbekistan shall be equal for all regardless of the grounds of its acquisition. Every citizen of the Republic of Karakalpakstan shall be a citizen of the Republic of Uzbekistan. The grounds and procedure for acquiring and forfeiting citizenship shall be defined by law.

**Article 22.** The Republic of Uzbekistan shall guarantee legal protection to all its citizens both on the territory of the republic and abroad.

**Article 23.** Foreign citizens and stateless persons, during their stay on the territory of the Republic of Uzbekistan, shall be guaranteed the rights and freedoms in accordance with the norms of international law.

They shall perform the duties established by the Constitution, laws, and international agreements signed by the Republic of Uzbekistan.

### Chapter 7 Personal Rights and Freedoms

**Article 24.** The right to exist is the inalienable right of every human being. Attempts on anyone's life shall be regarded as the gravest crime.

**Article 26.** No one may be adjudged guilty of a crime except by the sentence of a court and in conformity with the law. Such a person shall be guaranteed the right to legal defence during open court proceedings. No one may be subject to torture, violence or any other cruel or humiliating treatment. No one may be subject to any medical or scientific experiments without his consent.

**Article 27.** Everyone shall be entitled to protection against encroachments on his honour, dignity, and interference in his private life, and shall be guaranteed inviolability of the home.

No one may enter a home, carry out a search or an examination, or violate the privacy of correspondence and telephone conversations, except on lawful grounds and in accordance with the procedure prescribed by law.

**Article 28.** Any citizen of the Republic of Uzbekistan shall have the right to freedom of movement on the territory of the Republic, as well as a free entry to and exit from it, except in the events specified by law.

**Article 29.** Everyone shall be guaranteed freedom of thought, speech and convictions. Everyone shall have the right to seek, obtain and disseminate any information, except that which is directed against the existing constitutional system and in some other instances specified by law.

Freedom of opinion and its expression may be restricted by law if any state or other secret is involved.

**Article 30.** All state bodies, public associations and officials in the Republic of Uzbekistan shall allow any citizen access to documents, resolutions and other materials, relating to their rights and interests.

**Article 31.** Freedom of conscience is guaranteed to all. Everyone shall have the right to profess or not to profess any religion. Any compulsory imposition of religion shall be impermissible.

#### Chapter 8. Political Rights

**Article 32.** All citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to participate in the management and administration of public and state affairs, both directly and through representation. They may exercise this right by way of self-government, referendums and democratic formation of state bodies.



**Article 34** All citizens of the republic of Uzbekistan shall have the right to form trade unions, political parties and any other public associations and to participate in mass movements.

No one may infringe on the rights, freedoms and dignity of the individuals constituting the minority opposition in political parties, public associations and mass movements, as well as in representative bodies of authority.

**Article 35.** Everyone shall have the right, both individually and collectively, to submit applications and proposals and to lodge complaints with competent state bodies, institutions and public representatives.

Such applications, proposals and complaints shall be considered in accordance with the procedure and within the time-limit specified by law.

#### Chapter 9. Economic and Social Rights

**Article 36.** Everyone shall have the right to own property. The privacy of bank deposits and the right to inheritance shall be guaranteed by law.

**Article 37.** Everyone shall have the right to work, including the right to choose their occupation. Every citizen shall be entitled to fair conditions of labour and protection against unemployment in accordance with the procedure prescribed by law.

Any forced labour shall be prohibited, except as punishment under the sentence of a court, or in some other instances specified by law.

**Article 38.** Citizens working on hire shall be entitled to a paid rest. The number of working hours and the duration of paid leave shall be specified by law.

**Article 39.** Everyone shall have the right to social security in old age, in the event of disability and loss of the bread-winner as well as in some other cases specified by law.

**Article 40.** Everyone shall have the right to receive skilled medical care.

**Article 41.** Everyone shall have the right to education. The state shall guarantee free secondary education. Schooling shall be under state supervision.

**Article 42.** Everyone shall be guaranteed the freedom of scientific research and engineering work, as well as the right to enjoy cultural benefits. The state shall promote the cultural, scientific and technical development of society.

#### *Chapter 10. Guarantees of Human Rights and Freedoms*

**Article 43.** The state shall safeguard the rights and freedoms of citizens proclaimed by the Constitution and laws.

**Article 44.** Everyone shall be entitled to legally defend his rights and freedoms, and shall have the right to appeal any unlawful action of state bodies, officials and public associations.

**Article 45.** The rights of minors, the disabled, and the elderly shall be protected by the state.

**Article 46.** Women and men shall have equal rights.

#### *Chapter 11. Duties of Citizens*

**Article 47.** All citizens shall perform the duties established by the Constitution.

**Article 48.** All citizens shall be obliged to observe the Constitution and laws and to respect the rights, freedoms, honour and dignity of others.

**Article 49.** It is the duty of every citizen to protect the historical, spiritual and cultural heritage of the people of Uzbekistan. Cultural monuments shall have protection by the state.



### PART THREE

#### SOCIETY AND THE INDIVIDUAL

##### Chapter 12. The Economic Foundation of Society

**Article 53.** The economy of Uzbekistan, evolving towards market relations, is based on various forms of ownership. The state shall guarantee freedom of economic activity, entrepreneurship and labour with due regard for the priority of consumers' rights, as well as equality and legal protection of all forms of ownership.

Private property, along with the other types of property, shall be inviolable and protected by the state. An owner may be deprived of his property solely in the cases and in accordance with the procedure prescribed by law.

**Article 54.** An owner shall possess, use and dispose of his property. The use of any property must not be harmful to the ecological environment, nor shall it infringe on the rights and legally protected interests of citizens, juridical entities or the state.

**Article 55.** The land, its minerals, fauna, and flora, as well as other natural resources shall constitute the national wealth, and shall be rationally used and protected by the state.

##### Chapter 13. Public Associations

**Article 56.** Trade unions, political parties, and scientific societies, as well as women's, veterans' and youth leagues, professional associations, mass movements and other organizations registered in accordance with

territorial integrity and security of the Republic, as well as the constitutional rights and freedoms of its citizens, advocating war and social, national, racial and religious hostility, and encroaching on the health and morality of the people, as well as of any armed associations and political parties based on the national or religious principles.

All secret societies and associations shall be banned.

**Article 58.** The state shall safeguard the rights and lawful interests of public associations and provide them with equal legal possibilities for participating in public life.

Interference by state bodies and officials in the activity of public associations, as well as interference by public associations in the activity of state bodies and officials is impermissible.

**Article 59.** Trade unions shall express and protect the socio-economic rights and interests of the working people. Membership in trade unions is optional.

**Article 60.** Political parties shall express the political will of various sections and groups of the population, and through their democratically elected representatives shall participate in the formation of state authority. Political parties shall submit public reports on their financial sources to the Dily Majlis or their plenipotentiary body in a prescribed manner.

**Article 61.** Religious organizations and associations shall be separated from the state and equal before law. The state shall not interfere with the activity of religious associations.

**Article 62.** Public associations may be dissolved or banned, or subject to restricted activity, solely by the sentence of a court.

#### Chapter 14. Family

**Article 63.** The family is the primary unit of society and shall have the right to state and societal protection. Marriage shall be based on the willing consent and equality of both parties.



**Article 65.** All children shall be equal before the law regardless of their origin and the civic status of their parents. Motherhood and childhood shall be protected by the state.

**Article 66.** Able-bodied children who are of age shall be obliged to care for their parents.

*Chapter 15 Mass Media*

**Article 67.** The mass media shall be free and act in accordance with the law. It shall bear responsibility for trustworthiness of information in a prescribed manner. Censorship is impermissible.

**PART FOUR**

**ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL STRUCTURE AND STATE SYSTEM**

*Chapter 16 Administrative and Territorial Structure of the Republic of Uzbekistan*

**Article 68.** The Republic of Uzbekistan shall consist of regions, districts, cities, towns, settlements, *hushabiy* and *auls* (villages) in Uzbekistan and the Republic of Karakalpakstan.

**Article 69.** Any alteration of the boundaries of the Republic of Karakalpakstan, regions, the city of Tashkent, as well as the formation and amendment of regions, cities, towns and districts shall be sanctioned by the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.

*Chapter 17 Republic of Karakalpakstan*

Article 71. The republic of Karakalpakstan shall have its own Constitution.

The Constitution of the Republic of Karakalpakstan must be in accordance with the Constitution of the Republic of Uzbekistan.

Article 72. The laws of the Republic of Uzbekistan shall be binding on the territory of the Republic of Karakalpakstan.

Article 73. The territory and boundaries of the Republic of Karakalpakstan may not be altered without the consent of Karakalpakstan. The republic of Karakalpakstan shall be independent in determining its administrative and territorial structure.

Article 74. The Republic of Karakalpakstan shall have the right to secede from the Republic of Uzbekistan on the basis of a nation-wide referendum held by the people of Karakalpakstan.

Article 75. Relationship between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Karakalpakstan within the framework of the Constitution of the Republic of Uzbekistan shall be regulated by treaties and agreements concluded by the Republic of Uzbekistan and the Republic of Karakalpakstan.

Any disputes between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Karakalpakstan shall be settled by the way of reconciliation.

## PART FIVE

### ORGANIZATION OF STATE AUTHORITY

#### Chapter 18. Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Article 76. The highest state representative body is the Oliy Majlis (the Suprema Assembly) of the Republic of

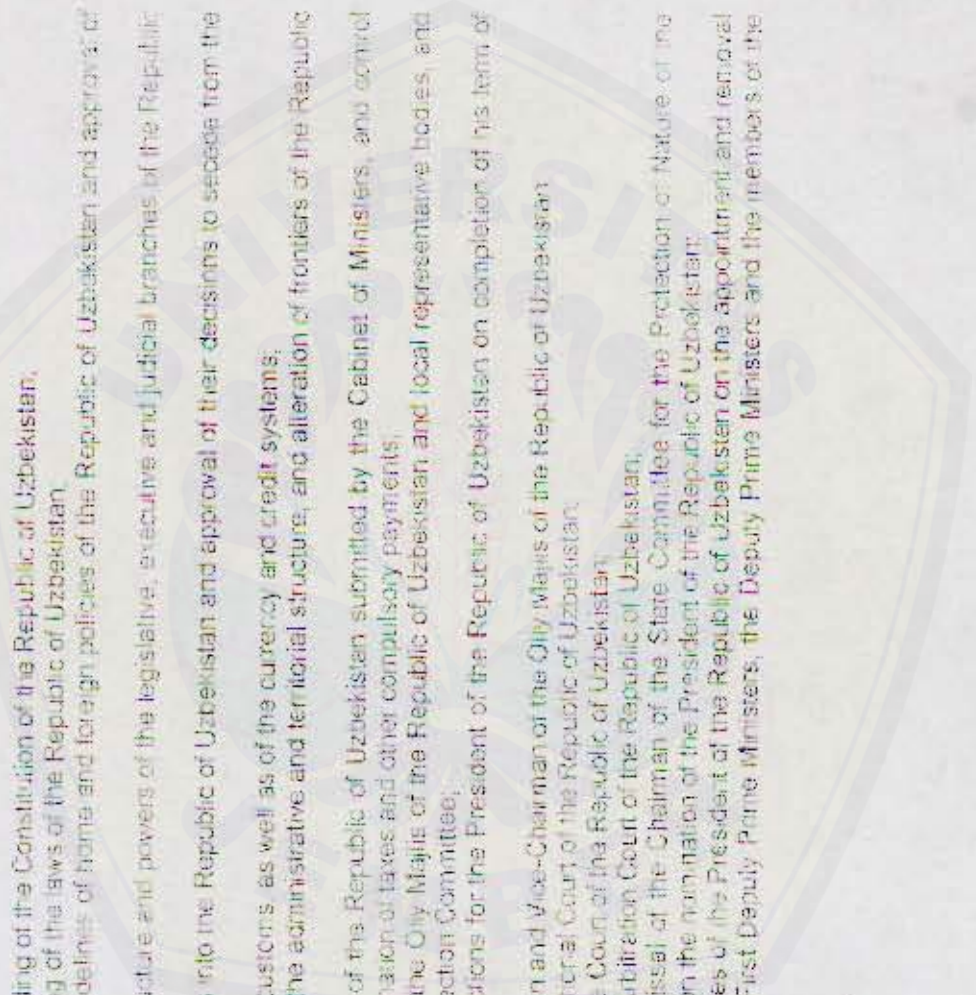


constituencies on a multi-party basis for a term of five years.

All citizens of the Republic of Uzbekistan who have reached the age of 25 by election day, shall be eligible for election to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Requirements to candidates shall be determined by law.

Article 78. The exclusive powers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall include:

- 1) the adoption and amending of the Constitution of the Republic of Uzbekistan;
- 2) enactment and amending of the laws of the Republic of Uzbekistan;
- 3) determination of the guidelines of home and foreign policies of the Republic of Uzbekistan and approval of long-term projects;
- 4) determination of the structure and powers of the legislative, executive and judicial branches of the Republic of Uzbekistan;
- 5) admission of new states into the Republic of Uzbekistan and approval of their decisions to secede from the Republic of Uzbekistan;
- 6) legislative regulation of customs as well as of the currency and credit systems;
- 7) legislative regulation of the administrative and territorial structure, and alteration of frontiers of the Republic of Uzbekistan;
- 8) approval of the budget of the Republic of Uzbekistan submitted by the Cabinet of Ministers, and control over its execution; determination of taxes and other compulsory payments;
- 9) scheduling elections to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and local representative bodies, and formation of the Central Election Committee;
- 10) setting the date of elections for the President of the Republic of Uzbekistan on completion of his term of office;
- 11) election of the Chairman and Vice-Chairman of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan;
- 12) election of the Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan;
- 13) election of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan;
- 14) election of the Higher Arbitration Court of the Republic of Uzbekistan;
- 15) appointment and dismissal of the Chairman of the State Committee for the Protection of Nature of the Republic of Uzbekistan upon the nomination of the President of the Republic of Uzbekistan;
- 16) ratification of the decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on the appointment and removal of the Prime Minister, the First Deputy Prime Ministers, the Deputy Prime Ministers and the members of the



upon the nomination of the President of the Republic of Uzbekistan,  
19) ratification of the decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on the formation and abolition of ministries, state committees and other bodies of state administration;  
20) ratification of the decrees of the President of the Republic of Uzbekistan on general and partial mobilization, and on the declaration, prolongation and discontinuance of a state of emergency;  
21) ratification and denouncement of international treaties and agreements;  
22) institution of state awards and honorary titles;  
23) formation, annulment and renaming of districts, towns, cities and regions and alteration of their boundaries;  
24) execution of other powers defined by the present Constitution.

**Article 79.** A session of the Oliy Majlis shall be legally qualified if it is attended by at least 2/3 of the total number of the deputies.

**Article 80.** The President of the Republic of Uzbekistan, the Prime Minister, and the members of the Cabinet of Ministers, the Chairman of the Constitutional Court, the Supreme Court and the Higher Arbitration Court, the Procurator-General of the Republic and the Chairman of the Board of the Central Bank shall have the right to attend the sessions of the Oliy Majlis.

**Article 81.** Upon completion of its term, the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall retain its powers until the newly-elected Oliy Majlis is convened.

The first session of the newly-elected Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall be convened by the Central Electoral Committee within two months of the elections.

**Article 82.** The right to initiate legislation in the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan is vested in the President of the Republic of Uzbekistan, the Republic of Karakalpakstan through the highest body of state authority, the deputies of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, the Constitutional Court, the Supreme Court, the Higher Arbitration Court and the Procurator-General of the Republic of Uzbekistan.

**Article 83.** The Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall pass laws, resolutions and other acts. Any law



**Article 84.** The Chairman and the Vice-Chairmen of the Oliy Majlis shall be elected from among the deputies of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan by secret ballot.  
The Chairman and the Vice-Chairmen of the Oliy Majlis shall present annual reports to the Oliy Majlis.

One of the Vice-Chairmen of the Oliy Majlis, a deputy of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, shall represent Karakalpakstan.

The Chairman and the Vice-Chairmen of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall be elected for the same term as the Oliy Majlis.

No one may be elected Chairman of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan for more than two consecutive terms.

The Chairman of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan may be recalled before completion of his term of office by the decision of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan approved by more than 2/3 of the deputies of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan by secret ballot.

**Article 85.** The Chairman of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall

- 1) exercise the general direction over a preliminary review of matters to be submitted to the Oliy Majlis;
- 2) convene the sessions of the Oliy Majlis and draft their agenda together with the Chairmen of the committees and commissions;
- 3) preside at the sessions of the Oliy Majlis;
- 4) coordinate the work of the committees and commissions of the Oliy Majlis;
- 5) organize the control over the execution of the laws and the decisions passed by the Oliy Majlis;
- 6) direct inter-parliamentary relations and the work of the groups connected with international parliamentary organizations;
- 7) nominate candidates for the posts of the Vice-Chairmen of the Oliy Majlis and the Chairmen of the committees and commissions of the Oliy Majlis;
- 8) alter the composition of the committees and commissions and submit them for confirmation to the Oliy Majlis on the proposal of the Chairmen of the committees and commissions.

- 11) appoint and dismiss the editors of the organs of the press of the Oliy Majlis,
- 12) approve the estimated allowances of the deputies and the administrative expenses of the Oliy Majlis,
- 13) sign the resolutions passed by the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.

The Chairman of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall issue ordinances.

**Article 86.** The Oliy Majlis shall elect committees and commissions to draft laws, conduct preliminary review of matters to be submitted to the Oliy Majlis, and control the execution of the laws and other decisions passed by the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.

In the event of necessity, the Oliy Majlis shall form deputies, auditing and other commissions which shall function on a permanent or temporary basis.

**Article 87.** The expenses of the deputies connected with their work for the Oliy Majlis shall be reimbursed in prescribed manner. The deputies working for the Oliy Majlis on a permanent basis may not hold any other paid posts, nor engage in commercial activity during their term of office.

**Article 88.** Deputies of the Oliy Majlis shall have the right of immunity. They may not be prosecuted, arrested or incur a court-imposed administrative penalty without the sanction of the Oliy Majlis.

#### Chapter 19. The President of the Republic of Uzbekistan

**Article 89.** The President of the Republic of Uzbekistan is head of state and executive authority in the Republic of Uzbekistan. The President of the Republic of Uzbekistan simultaneously serves as Chairman of the Cabinet of Ministers.

**Article 90.** Any citizen of the Republic of Uzbekistan who has reached the age of 35, is in full command of the state language and has permanently resided in Uzbekistan for at least 10 years, immediately preceding the elections, shall be eligible for the post of President of the Republic of Uzbekistan. A person may not be elected to the office of President of the Republic of Uzbekistan for more than two consecutive terms.

The President of the Republic of Uzbekistan shall be elected for a term of five years. He shall be elected by



**Article 81.** During his term of office, the President may not hold any other paid post, serve as a deputy of a representative body or engage in commercial activity. The President shall enjoy personal immunity and protection under law.

**Article 92.** The President shall be regarded as having assumed office upon taking the following oath at a session of the Oliy Majlis:

"I do solemnly swear to faithfully serve the people of Uzbekistan, to strictly comply with the Constitution and the laws of the Republic, to guarantee the rights and freedoms of its citizens, and to conscientiously perform the duties of the President of the Republic of Uzbekistan."

**Article 93.** The President of the Republic of Uzbekistan shall:

- 1) guarantee the rights and freedoms of citizens and observance of the Constitution and the laws of the Republic of Uzbekistan;
- 2) protect the sovereignty, security, and territorial integrity of the Republic of Uzbekistan, and implement the decisions regarding its national-state structure;
- 3) represent the Republic of Uzbekistan in domestic matters and in international relations;
- 4) conduct negotiations, sign treaties and agreements in behalf of the Republic of Uzbekistan, and ensure the observance of the treaties and agreements signed by the Republic and the fulfillment of its commitments;
- 5) receive letters of credence and recall from diplomats and other representatives accredited to him;
- 6) appoint and recall diplomats and other representatives of the Republic of Uzbekistan to foreign states;
- 7) present annual reports to the Oliy Majlis on the domestic and international situation;
- 8) form the administration and lead it, ensure interaction between the highest bodies of state authority and administration, set up and dissolve ministries, state committees and other bodies of administration of the Republic of Uzbekistan with subsequent confirmation by the Oliy Majlis;
- 9) appoint and dismiss the Prime Minister, his First Deputy, the Deputy Prime Ministers, the members of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, the Procurator-General of the Republic of Uzbekistan and his Deputies, with subsequent confirmation by the Oliy Majlis;
- 10) present to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan his nominees for the posts of Chairman and members of the Constitutional Court, the Supreme Court, and the Higher Economic Court, as well as the Chairman of the Board of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, and the Chairman of the State Committee for the Protection of Nature of the Republic of Uzbekistan.



- act discrediting the honour and dignity of a khokim;
- 13) suspend and repeal any acts passed by the bodies of state administration or khokims;
- 14) sign the laws of the Republic of Uzbekistan. The President may refer any law, with his own amendments, to the Oliy Majlis for additional consideration and vote. Should the Oliy Majlis confirm its earlier decision by a majority of 2/3 of its total voting power, the Presidents shall sign the law;
- 15) have the right to proclaim a state of emergency throughout the Republic of Uzbekistan or in a particular locality in cases of emergency (such as a real outside threat, mass disturbances, major catastrophes, natural calamities or epidemics), in the interests of people's security. The President shall submit his decision to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan for confirmation within three days. The terms and the procedure for the imposition of the state of emergency shall be specified by law;
- 16) serve as the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic and is empowered to appoint and dismiss the high command of the Armed Forces and confer top military ranks;
- 17) proclaim a state of war in the event of an armed attack on the republic of Uzbekistan or when it is necessary to meet international obligations relating to mutual defence against aggression, and submit the decision to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan for confirmation;
- 18) award orders, medals and certificates of honour of the Republic of Uzbekistan, and confer qualification and honorary titles of the Republic of Uzbekistan;
- 19) rule on matters of citizenship of the Republic of Uzbekistan and on granting political asylum;
- 20) issue acts of amnesty and grant pardon to citizens convicted by the courts of the Republic of Uzbekistan;
- 21) form the national security and state control services, appoint and dismiss their heads, and exercised other powers vested in him.

The President shall not have the right to transfer his powers to a state body or official

**Article 94.** The President of the Republic of Uzbekistan shall issue decrees, enactments and ordinances binding on the entire territory of the Republic on the basis of and for enforcement of the Constitution and the laws of the Republic of Uzbekistan

**Article 95.** Should any insurmountable differences arise between the deputies of the Oliy Majlis, jeopardizing its normal functioning, or should it repeatedly make decisions in opposition to the Constitution, the Oliy Majlis may be dissolved by a decision of the President, sanctioned by the Constitutional Court. In the event of the dissolution of the Oliy Majlis elections shall be held within three months. The Oliy Majlis may not be dissolved during a state of emergency



**Article 97.** Upon completion of his term of office, the President shall be a lifetime member of the Constitutional Court.

#### Chapter 20. Cabinet of Ministers

**Article 98.** The Cabinet of Ministers shall be formed by the President of the Republic of Uzbekistan and approved by the Oliy Majlis.

The head of government of the Republic of Kazakhstan shall be an ex officio member of the Cabinet of Ministers.

The Cabinet of Ministers shall provide guidance for the economic, social and cultural development of the Republic of Uzbekistan. It should also be responsible for the execution of the laws and other decisions of the Oliy Majlis, as well as of the decrees and other enactments issued by the President of the Republic of Uzbekistan.

The Cabinet of Ministers shall issue enactments and ordinances in accordance with the current legislation. This shall be binding on all bodies of administration, enterprises, institutions, organizations, officials and citizens throughout the Republic of Uzbekistan.

The Cabinet of Ministers shall tender its resignation to the newly-elected Oliy Majlis.

The procedure for the work of the Cabinet of Ministers and its powers shall be defined by law.

#### Chapter 21. Fundamental Principles of Local Bodies of State Authority

**Article 99.** The Soviets of People's Deputies led by khokims are the representative bodies of authority in regions, districts, cities and towns, except in towns subordinate to district centres, and city districts. They shall act upon all matters within their authority, in accordance with the interests of the state and citizens.

conduct the economic, social and cultural development within their territories, propose and implement the local budget, determine the local taxes and fees, and propose non-budget funds, direct the municipal economy, protect the environment, ensure the registration of civil status acts, pass normative acts and exercise other powers in conformity with the Constitution and the legislation of the Republic of Uzbekistan

**Article 101** The local authorities shall enforce the laws of the Republic of Uzbekistan, the decrees of the President and the decisions of the higher bodies of state authority. They shall also direct the work of the subordinate Soviets of People's Deputies and participate in the discussion of national and local matters

The decisions of the higher bodies on matters within their authority shall be binding on the subordinate bodies.

The term of office of the Soviets of People's Deputies and khokims is five years.

**Article 102** The khokims of regions, districts, cities and towns shall serve as heads of both representative and executive authorities of their respective territories

The khokim of the region and city of Tashkent shall be appointed and dismissed by the President with subsequent confirmation by the appropriate Soviet of People's Deputies

The khokims of districts, cities and towns shall be appointed and dismissed by the khokim of the appropriate region, with subsequent confirmation by the appropriate Soviet of People's Deputies

The khokims of city districts shall be appointed and dismissed by the khokim of the city with subsequent confirmation by the city Soviet or People's Deputies

The khokims of towns subordinate to district centres shall be appointed and dismissed by the khokim of the district with subsequent confirmation by the district Soviet of People's Deputies

**Article 103** The khokims of regions, districts, cities and towns shall exercise their powers in accordance with



Organization of the work and the powers of khokims and local Soviets of People's Deputies, as well as the procedure for elections to the local Soviets of People's Deputies shall be specified by law.

**Article 104** The khokim shall make decisions within his vested powers which are binding on all enterprises, institutions, organizations, associations, officials, and citizens on the relevant territory.

**Article 105** Residents of settlements, districts and auls (villages) as well as of residential neighbourhoods (*markaziyas*) in cities, towns, settlements and villages shall decide all local matters at general meetings. These local self-governing bodies shall elect Chairmen (*aksakal*) and his advisers for a term of 2.5 years.

The procedure for elections, organization of the work and the powers of self-governing bodies shall be specified by law.

#### Chapter 22 Judicial Authority in the Republic of Uzbekistan.

**Article 106.** The judicial authority in the republic of Uzbekistan shall function independently from the legislative and executive branches, political parties and public organizations.

**Article 107.** The judicial system in the Republic of Uzbekistan shall consist of the Constitutional Court of the Republic, the Supreme Court, the Higher Economic Court of the Republic of Uzbekistan, along with the Supreme Court and the Arbitration Court of the Republic of Karakalpakstan. These courts shall be elected for a term of five years. The judicial branch also includes regional, district, town, city, Tashkent city courts and arbitration courts appointed for a term of five years. Organization and procedure for the operation of the courts shall be specified by law. Formation of extraordinary court shall be inadmissible.

**Article 108.** The Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan shall hear cases relating to the Constitutionality of acts passed by the legislative and executive branches.

The Constitutional Court shall be elected from political and legal scholars and shall consist of a Chairman, Vice-Chairman and judges including a representative of the Republic of Karakalpakstan.

The judges of the Constitutional Court shall have the right of immunity.

The judges of the Constitutional Court shall be independent in their work and subject solely to the Constitution of the Republic of Uzbekistan.

**Article 109.** The Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan shall:

- 1) judge the constitutionality of the laws of the Republic of Uzbekistan and other acts passed by the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, the decrees issued by the President of the Republic of Uzbekistan, the enactments of the government and the ordinances of local authorities as well as obligations of the Republic of Uzbekistan under inter-state treaties and other documents;
- 2) conform the constitutionality of the Constitution and laws of the Republic of Karakalpakstan to the Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan;
- 3) interpret the Constitution and the laws of the Republic of Uzbekistan;
- 4) hear other cases coming within its authority under the Constitution and the laws of the Republic of Uzbekistan.

The judgements of the Constitutional Court shall take effect upon publication. They shall be final and shall not be subject to appeal.

The organization and procedure of the Constitutional Court shall be specified by law.

**Article 110.** The Supreme Court of the Republic of Uzbekistan shall be the highest judicial body of civil, criminal and administrative law.

The rulings of the Supreme Court shall be final and binding throughout the Republic of Uzbekistan.

The Supreme Court of the Republic of Uzbekistan shall have the right to supervise the administration of justice by the Supreme Court of the Republic of Karakalpakstan as well as by regional, city, town and district courts.

**Article 111.** Any economic and management disputes that may arise between entrepreneurs, enterprises,



**Article 112.** Judges shall be independent and subject solely to the law. Any interference in the work of judges in administering the law shall be inadmissible and punishable by law.

The immunity of judges shall be guaranteed by law. The Chairmen and the members of the Supreme Court and the Higher Arbitration Court may not be deputies of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Judges, including district ones, may not belong to any political parties or movements, nor hold any other paid posts.

Before the completion of his term of office, a judge may be removed from his post only on grounds specified by law.

**Article 113.** Legal proceedings in all courts shall be open to the public. Hearings in camera shall be only allowed in cases prescribed by law.

**Article 114.** All court verdicts shall be binding on state bodies, public associations, enterprises, institutions, organizations, officials and citizens.

**Article 115.** All legal proceedings in the Republic of Uzbekistan shall be conducted in Uzbek, Karakalpak or in the language spoken by the majority of the people in the locality. Any person participating in court proceedings who does not know the language in which they are being conducted, shall have the following right to be fully acquainted with the materials in the case: to have the services of an interpreter during the proceedings; and to address the court in his native language.

**Article 116.** Any defendant shall have the right to defence.

The right to legal assistance shall be guaranteed at any stage of the investigation and judicial proceedings. Legal assistance to citizens, enterprises, institutions and organizations shall be given by the College of Barristers. Organization and procedure of the College of Barristers shall be specified by law.

#### Chapter 23. Electoral System

**Article 117.** All citizens of the Republic of Uzbekistan are guaranteed the equal right to vote. Every citizen shall have only one vote. Any citizen shall be eligible for election to public office.

prison may neither vote nor be eligible for election. Any other direct or indirect infringement on the citizens' voting rights is inadmissible.

A citizen of the Republic of Uzbekistan may not simultaneously be elected to more than two representative bodies. The electoral procedure shall be specified by law.

#### Chapter 24. Procurator's Office

**Article 118.** The Procurator-General of the Republics of Uzbekistan and the procurator subordinate to him shall supervise the strict and uniform observance of the laws on the territory of the Republic of Uzbekistan.

**Article 119.** The Procurator-General of the Republic of Uzbekistan shall direct the centralized system of agencies of the procurator's office.

The Procurator of the Republic of Karakalpakstan shall be appointed by the highest representative body of the Republic of Karakalpakstan and subject to confirmation by the Procurator-General of the Republic of Uzbekistan.

The procurators of regions, districts, cities and towns shall be appointed by the Procurator-General of the Republic of Uzbekistan.

The term of office shall be 5 years for the Procurator-General of the Republic of Uzbekistan, the Procurator of the Republic of Karakalpakstan and procurators of regions, districts, cities and towns.

**Article 120.** The agencies of the Procurator's Office of the Republic of Uzbekistan shall exercise their powers independently of any state bodies, public associations and officials, and shall be subject solely to the law.

While in office, procurators shall suspend their membership in political parties and any other public associations pursuing political goals.

Organization, powers and procedure for the agencies of the Procurator's Office shall be specified by law.



The law-enforcement agencies may enlist the assistance of public associations and citizens to safeguard law and order, as well as the rights and freedoms of citizens.

#### Chapter 25. Finance and Crediting

Article 122. The Republic of Uzbekistan shall have independent financial, monetary and credit systems

The state budget of Uzbekistan shall consist of the national budget, the budget of the Republic of Karakalpakstan and local budgets.

Article 123. The Republic of Uzbekistan shall have a single taxation system. The right to determine taxes shall belong to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.

Article 124. The banking system of the Republic of Uzbekistan shall be directed by the Central Bank of the Republic.

#### Chapter 26. Defence and Security

Article 125. The Armed Forces of the Republic of Uzbekistan shall be formed to defend the state sovereignty and territorial integrity of the Republic of Uzbekistan, as well as the peaceful life and security of its citizens. The structure and organization of the Armed Forces shall be specified by law.

Article 126. The Republic of Uzbekistan shall maintain the Armed Forces to ensure its security at a level of reasonable sufficiency.

### PART SIX

#### PROCEDURE FOR AMENDING THE CONSTITUTION



MILIK UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Article 128. The Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan may pass a law altering or amending the Constitution within six months of submission of the relevant proposal, with due regard for its nationwide discussion. Should the Oliy Majlis of the republic of Uzbekistan reject an amendment to the Constitution, a repeated proposal may not be submitted for one year.

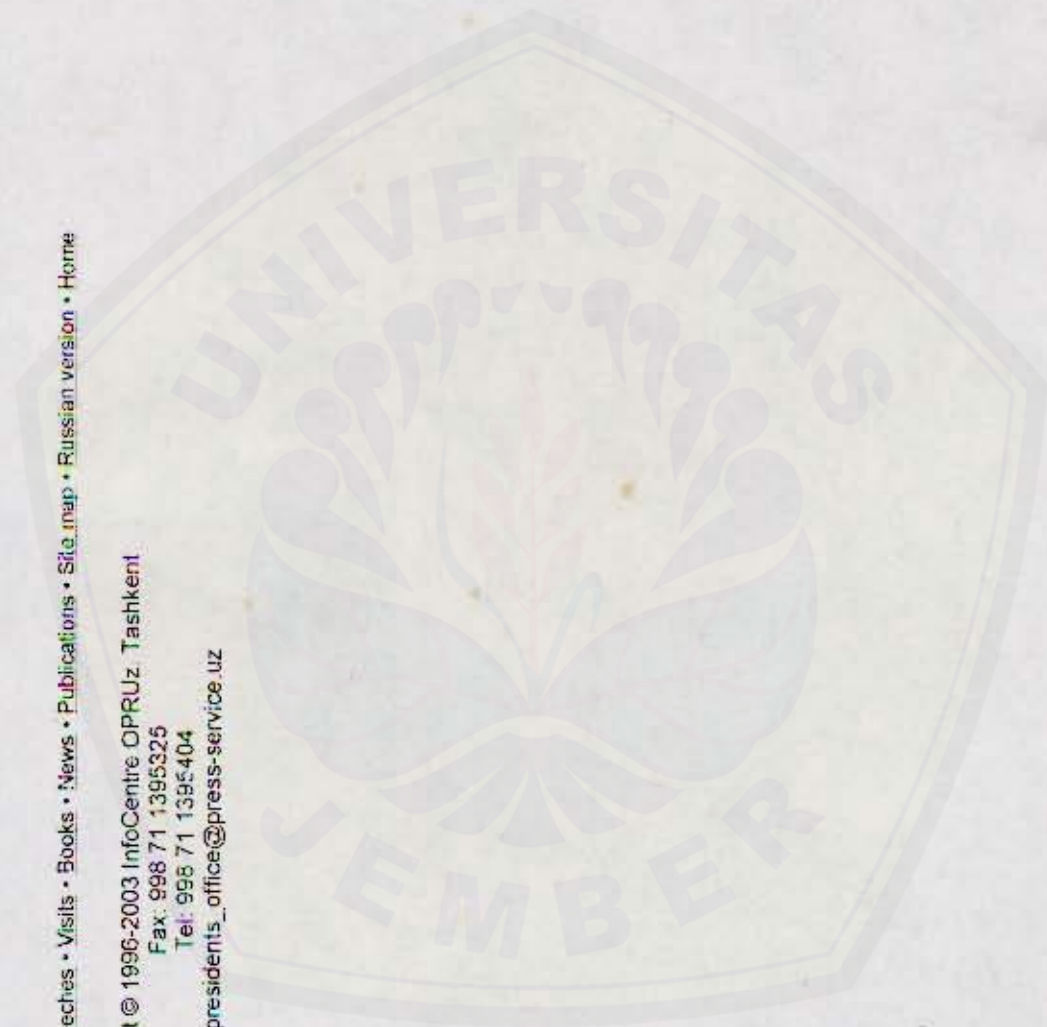
President • Constitution • Documents • Speeches • Visits • Books • News • Publications • Site map • Russian version • Home

Copyright © 1996-2003 InfoCentre OPRUz, Tashkent

Fax: 998 71 1395325

Tel: 998 71 1395404

presidents\_office@press-service.uz



mbler's  
p100  
nter